

Berdasarkan komponen pembentuk PDRB, pertumbuhan PDRB juga dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi, yaitu kontribusi baik dari sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sektor primer memberikan kontribusi terendah terhadap PDRB Kota Surabaya dibandingkan dua sektor yang lainnya. Pada tabel 1.1 memberikan informasi bahwa subsektor yang paling dominan pada sektor tersier dan sekunder dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya tahun 2014 atas dasar harga berlaku yaitu subsektor perdagangan, hotel dan restoran serta industri pengolahan. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2014 menghasilkan PDRB sebesar Rp160.756.578,98 juta yang lebih tinggi dibanding pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp138.630.911,21 juta. Sementara industri pengolahan pada tahun 2014 menghasilkan PDRB sebesar Rp72.505.649,49 juta dan pada tahun 2013 menghasilkan PDRB sebesar Rp64.263.111,74 juta.

Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2014 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2013	%	2014	%
I. Primer	86.094,93	0,08	87.562,26	0,08
Pertanian	79.001,28	0,07	80.101,56	0,07
Pertambangan dan Penggalan	7.093,65	0,01	7.460,70	0,01
II. Sekunder	32.065.288,93	29,38	34.124.176,78	29,12
Industri Pengolahan	22.390.903,12	20,52	23.570.649,59	20,18
Listrik, Gas dan Air Bersih	2.274.285,70	2,08	2.424.240,73	2,08
Bangunan/Konstruksi	7.400.100,11	6,78	8.129.286,46	6,96
III. Tersier	76.985.918,03	70,54	82.583.557,11	70,71
Perdagangan, Hotel dan Restoran	47.766.042,34	43,77	51.528.225,81	44,12
Pengangkutan dan Komunikasi	13.160.461,86	12,06	14.043.910,32	12,02
Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan	7.109.284,28	6,51	7.597.909,61	6,51
Jasa-Jasa	8.950.129,55	8,20	9.413.511,37	8,06
Jumlah	109.137.301,87	100	116.795.296,14	100

Sumber data: BPS Kota Surabaya, Januari 2015

Catatan : *) data sementara

Sama halnya seperti PDRB atas dasar harga berlaku, kondisi PDRB ADHK menunjukkan struktur yang tidak jauh berbeda, dimana PDRB Kota Surabaya ADHK juga mengalami peningkatan. PDRB Kota Surabaya mulanya sebesar Rp109.137.301,87 juta pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp116.795.296,14 juta pada tahun 2014. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran masih menempati posisi pertama dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya meskipun pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan yang sedikit melambat dibanding tahun 2013. Hal tersebut seiring dengan sebutan Kota Surabaya sebagai

11117	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	2.079.659.562,00	1.651.019.982,00	79,39
11201	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.169.158.767,00	2.275.976.617,00	71,82
11202	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.030.665.722,00	2.307.234.950,00	76,13
11215	Program Keluarga Berencana	3.999.827.509,00	3.379.542.382,00	84,49
11301	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.255.816.358,00	1.019.694.149,00	81,20
11302	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.075.015.401,00	900.907.844,00	83,80
11316	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	88.991.818.493,00	77.524.550.938,00	87,11
11321	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	35.502.624.483,00	28.707.564.540,00	80,86
11401	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.705.912.827,00	1.307.145.074,00	76,62
11402	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	998.104.591,00	732.966.273,00	73,44
11416	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	16.319.989.750,00	11.957.780.852,00	73,27
11417	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	3.444.758.163,00	2.569.609.265,00	74,59
11501	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.446.978.507,00	1.312.456.558,00	90,70
11502	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	655.072.984,00	574.298.741,00	87,67
11517	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	35.073.448.625,00	19.687.953.082,00	56,13
11518	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3.197.316.054,00	2.467.216.290,00	77,17
11601	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.414.431.793,00	1.271.987.756,00	89,93
11602	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	354.252.390,00	301.187.532,00	85,02
11616	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	5.721.360.969,00	5.192.668.952,00	90,76
11701	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.994.466.039,00	6.580.228.253,00	94,08
11702	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	795.503.285,00	707.213.386,00	88,90
11717	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	6.102.114.878,00	5.371.364.255,00	88,02
11801	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	948.335.354,00	788.605.081,00	83,16

oo

11802	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	674.515.110,00	489.393.516,00	72,55
11816	Program peningkatan peran serta kepemudaan	5.913.582.090,00	5.336.434.590,00	90,24
11820	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	70.740.986.778,00	51.725.130.902,00	73,12
11901	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.025.113.350,00	2.500.046.932,00	82,64
11902	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.965.583.126,00	2.575.707.116,00	86,85
11916	Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	47.487.688.137,00	41.504.269.737,00	87,40
12001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	81.521.670.293,00	72.308.032.463,00	88,70
12002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.430.237.240,00	45.692.101.318,00	90,60
12015	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	61.712.941.377,00	37.472.772.729,00	60,72
12017	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	53.611.441.602,00	44.568.667.934,00	83,13
12020	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	6.231.751.562,00	5.411.729.833,00	86,84
12024	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	232.397.500,00	182.560.447,00	78,56
12025	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	5.029.377.162,00	2.323.165.513,00	46,19
12026	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	3.484.155.452,00	2.873.792.796,00	82,48
12029	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	12.987.056.748,00	10.625.252.341,00	81,81
12031	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	114.536.714.072,00	96.777.024.386,00	84,49
12032	Program Penataan Daerah Otonom	4.033.349.439,00	3.129.273.335,00	77,58
12101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	556.475.263,00	502.577.971,00	90,31
12102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	145.552.500,00	119.550.307,00	82,14
12116	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	4.793.431.415,00	4.522.509.569,00	94,35
12220	Program Penanggulangan Kemiskinan	17.024.491.691,00	13.947.699.675,00	81,93
12415	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1.640.259.554,00	1.519.954.918,00	92,67
12501	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.168.760.970,00	1.968.473.017,00	90,76

oo

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Surabaya telah menganut anggaran defisit.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2014 sebesar Rp6.150.194.212.902,80, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.247.459.154.137,00, Dana Perimbangan sebesar Rp1.597.890.575.334,40, Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp823.489.838.067,00, Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp448.297.975.000,40, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya Rp7.067.090.000,00, Bagi Hasil Lainnya Propinsi sebesar Rp2.360.319.364,00, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp23.629.261.000,00. Sedangkan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2013 sebesar Rp5.255.244.153.444,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.657.109.226.595,00, Dana Perimbangan sebesar Rp1.567.049.863.846,00, Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp664.150.585.652,00, Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp359.911.885.000,00, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya Rp6.173.385.000,00, Bagi Hasil Lainnya Propinsi sebesar sebesar Rp757.294.351,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp.91.913.000,00.

Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp.6.052.441.118.039,47 (tercapai 98,41%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.307.323.863.978,47 (tercapai 101,84%), Dana Perimbangan sebesar Rp1.488.374.891.545,00 (tercapai 93,15%), Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar Rp779.576.048.153,00 (tercapai 94,67%), Penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp448.340.154.000,00 (tercapai 100,01%), Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah

Penjelasan terkait belum tercapainya target belanja beberapa SKPD selama tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

Hal - hal yang mempengaruhi penyerapan adalah sebagai berikut :

- a. Penyerapan DAK Bidang Pendidikan untuk tahun 2014 tidak maksimal karena terkendala juknis pusat yang multi tafsir sehingga sulit untuk dilaksanakan;
- b. Adanya beberapa kegiatan yang penyerapannya belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena adanya kendala teknis;
- c. Terdapat sisa mati dari banyak kegiatan yang telah terlaksana dikarenakan efisiensi biaya.

2. Dinas Kesehatan

Beberapa hal yang menyebabkan belum terlaksananya belanja adalah sebagai berikut :

- a. Klaim JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) rumah sakit menurun karena pasien SKM (Surat Keterangan Miskin) / JKN sudah didaftarkan sebagai PBI Kota (Program Bantuan Iuran);
- b. Biaya operasional pelayanan kesehatan Puskesmas dan JKN diserap sesuai dengan kebutuhan;
- c. Pengadaan alat pengukuran panjang bayi untuk kegiatan pelayanan kesehatan keluarga mengalami gagal lelang dan lelang ulang dilaksanakan di bulan Desember.

3. RSUD dr. M. Soewandhie

Adapun rincian permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a. Pada kegiatan penyediaan barang dan jasa perkantoran, anggaran untuk biaya listrik tidak terserap seluruhnya karena rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik ternyata dilakukan secara bertahap, sedangkan anggaran untuk rencana penambahan tenaga kontrak tidak dapat dilaksanakan karena rumah sakit mendapat tambahan CPNS sebanyak 43 orang;
- b. Pada kegiatan pelayanan perawatan dan gizi pasien rumah sakit, anggaran untuk makanan pasien disesuaikan dengan jumlah pasien dan kondisi penyakit serta diet pasien yang ada di rumah sakit. Di samping itu juga adanya efisiensi harga pada pembelian barang;
- c. Pada kegiatan pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit, anggaran belanja untuk pelaksanaan bimbingan akreditasi yang direncanakan untuk

oo

narasumber dari RSUP Sanglah Denpasar tidak dapat terlaksana karena padatnya jadwal RSUP Sanglah. Selain itu juga terdapat sisa mati antara pagu yang direncanakan dengan nilai kontrak.

4. RSUD Bhakti Dharma Husada

Yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja RSUD Bhakti Dharma Husada antara lain :

- a. Belanja jasa pelayanan untuk kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya baru terealisasi sampai dengan bulan Agustus 2014;
- b. Belanja makan minum pasien untuk kegiatan pelayanan perawatan dan gizi masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. Adanya efisiensi harga pada kegiatan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan karena penggunaan *e-katalog* dari kementerian kesehatan dengan harga yang lebih murah.

5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Kendala yang ditemui dalam realisasi anggaran belanja antara lain :

- a. Adanya gagal lelang dan perubahan DED pada beberapa kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan.
 - Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan
 - Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan
 - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
- b. Pada kegiatan pengadaan tanah ada kendala teknis terkait dengan peta bidang dari BPN yang tidak bisa diprediksi serta hasil pengukuran ulang dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang baru diserahkan mendekati akhir tahun.

6. Dinas Kebakaran

Hal - hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja adalah :

- Pada kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran, penyerapan belanja disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

oo

7. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Kendala yang mempengaruhi realisasi anggaran Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah antara lain :

- a. Pada kegiatan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan terdapat beberapa permasalahan antara lain :
 - Penetapan lokasi PAUD masih dalam proses koordinasi dengan pihak kecamatan untuk alternatif lokasi yang baru pada kegiatan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan;
 - Lokasi Kalianak Genting masih dalam proses persiapan peta bidang;
 - Lokasi Perak Utara masyarakatnya tidak ada yang mau melepaskan asetnya;
- b. Pada kegiatan pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah belum ada kepastian batas tanah aset dari PD Pasar Surya, sedangkan untuk pembangunan Pasar Kutisari masih dalam proses perencanaan;
- c. Untuk kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan masih dalam proses peta bidang;
- d. Untuk kegiatan pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk fasilitas penunjang sarana transportasi perkotaan tidak jadi direalisasikan;
- e. Untuk kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah ada 30 permohonan sertifikasi yang masih dalam proses di BPN.

8. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Hal-hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan dasar sembilan tahun ada 2 lokasi paket pekerjaan (SDN, SMPN Dukuh Lempung dan Platuk Donomulyo) yang baru terealisasi di awal Oktober 2014 terkait penyelesaian tuntutan warga;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana sanitasi (DAK bidang sanitasi) permasalahannya terkait dengan petunjuk teknis DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat menjelaskan perlu adanya pembentukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknis dan Pemberdayaan. Dan mekanisme pembentukan Tenaga Fasilitator Lapangan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan masyarakat masih belum terlaksana dikarenakan masih belum jelas metode pemilihannya.

oo

9. Dinas Perhubungan

Adapun hal yang berpengaruh pada penyerapan anggaran yaitu :

- a. Kegiatan peningkatan/pengembangan terminal angkutan umum, ada beberapa paket pekerjaan yang belum bisa dilaksanakan yaitu :
 - Pembangunan landasan dan pekerjaan pengurukan serta saluran Terminal TOW belum bisa dilaksanakan karena belum ada kepastian hukum status tanah dan terkait dengan kerjasama pihak ketiga;
 - Pembangunan fasilitas angkutan massal terpadu di terminal Joyoboyo belum bisa dilaksanakan karena perlu adanya *review* design;
 - Penyusunan Pra Perencanaan Terminal Intermoda Keputran belum bisa terlaksana karena belum adanya kepastian lokasi;
 - Pembangunan ruang tunggu bus antar kota dan area pujasera di terminal TOW, pelaksana tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai progres kontrak sehingga dikenakan sanksi pemutusan kontrak serta *blacklist*.
- b. Kegiatan pengembangan sarana prasarana perhubungan ada 2 paket pekerjaan yang belum bisa dilaksanakan yaitu :
 - Pekerjaan pembangunan halte penunjang AMC koridor I mengalami gagal lelang pada putaran khusus 15;
 - Pengawasan pembangunan halte penunjang AMC koridor I pelaksanaan pembangunan fisiknya gagal dilaksanakan sehingga kegiatan pengawasannya juga tidak terlaksana.

10. Badan Lingkungan Hidup

Hal-hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain :

- a. Terdapat penghematan belanja cetak piagam peserta pelaksanaan kemah hijau, penyuluhan lingkungan pada pelajar dan pelaksanaan lomba asah terampil pada kegiatan pelaksanaan pendidikan lingkungan karena piagam langsung cetak;
- b. Untuk kegiatan pemantauan kualitas air laut di kawasan pesisir dan laut, ada penghematan waktu pengambilan sample air laut pada jasa uji laboratorium oleh petugas BLH Propinsi Jawa Timur dari semula 8 titik 8 hari menjadi 8 titik 4 hari;
- c. Kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya air, belanja paket jasa konsultasi manajemen untuk Legalisasi rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI SPAM) tidak direalisasikan karena sesuai aturan PP No. 16 Tahun 2005 tentang

oo

Pengembangan SPAM dan arahan dari Bagian Hukum Pemkot Surabaya cukup diatur dengan Peraturan Walikota.

11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Hal-hal yang berpengaruh pada penyerapan anggaran yaitu :

- a. Penyerapan beberapa anggaran kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Adanya efisiensi pekerjaan sehingga terdapat sisa PL dan sisa kontrak.

12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Terdapat beberapa kendala dalam penyerapan anggaran antara lain :

- a. Untuk kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan seperti belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga serta belanja bahan bakar minyak/gas;
- b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan untuk belanja cetak formulir *non security* dimana pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa setelah penentuan HPS, metode pelaksanaan dari lelang menjadi pengadaan langsung sehingga terjadi adanya sisa anggaran;
- c. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan, adanya programer yang *resign* dan sisa mati pada belanja jasa publikasi serta belanja sewa gedung/kantor/tempat yang HPS di bawah Standar Satuan Harga.

13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam penyerapan anggaran antara lain :

- a. Kegiatan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah terkendala keikutsertaan pameran ke luar kota tidak dapat terealisasi dikarenakan beberapa tempat pameran belum mempunyai peluang yang bagus;
- b. Kegiatan peningkatan dan pengembangan usaha koperasi aktif, penyerapan disesuaikan dengan kehadiran peserta bimtek serta dan harga pembelian barang untuk menunjang kegiatan, selain itu disesuaikan juga dengan kebutuhan dan jadwal pameran serta kebijakan Walikota dengan melihat prospek peluang bisnis yang dapat menguntungkan bagi peserta pameran. Disamping itu untuk penyerapan uang kinerja juga belum dapat terserap maksimal;
- c. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan, penyerapan anggaran terkendala oleh rencana pembangunan sentra PKL Pegirian

oo

Lanjutan yang mengalami gagal lelang (peserta kurang dari 3), biaya perencanaan dan pengawasan sebagian tidak terserap karena pembangunan fisik tidak semua dilelang tetapi ada yang penunjukan langsung.

14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Permasalahan yang mempengaruhi penyerapan adalah :

- a. Kegiatan koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata yaitu penyerapan uang kinerja tidak maksimal sehingga ada sisa anggaran dari uang kinerja;
- b. Kegiatan pengembangan obyek dan daya tarik Wisata Ampel juga dari penyerapan uang kinerja yang tidak maksimal sehingga ada sisa anggaran dari uang kinerja.

15. Dinas Pemuda dan Olah Raga

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam penyerapan anggaran adalah :

- a. Kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi yaitu adanya alokasi bantuan transportasi yang tidak terserap karena sudah mendapat honor program Puslatcab dan SIAPP GRAKK;
- b. Kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan lapangan olahraga dikarenakan penggunaan BBM yang tidak maksimal karena tidak ada *event*/pertandingan besar;
- c. Kegiatan peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga penyerapan anggarannya tidak maksimal karena adanya sisa mati dan efisiensi belanja;
- d. Kegiatan penyelenggaraan pertandingan olahraga prestasi kendala penyerapan karena alokasi kegiatan untuk KONI banyak yang tidak dilaksanakan oleh cabor anggota KONI.

16. Bagian Perlengkapan

Penyerapan anggaran belanja dipengaruhi oleh beberapa kendala antara lain:

- a. Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah dikarenakan belum tersusunnya perencanaan yang sesuai dengan kegiatan;
- b. Kegiatan evaluasi dan penghapusan aset/barang daerah penyerapan anggaran terkendala karena belum akurasi usulan untuk penghapusan barang;
- c. Kegiatan pelayanan unit layanan pengadaan krena belum tersusunnya anggaran yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan;

oo

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Di Pemerintah Kota Surabaya entitas pelaporan dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Surabaya menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk Neraca yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

❖ Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

❖ Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa Uang Persediaan, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/ LPJ UP/TU.

❖ Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

oo

❖ **Transaksi dalam mata uang asing**

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

❖ **Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.

Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang.

Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

Kas terdiri atas Kas di Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan. Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

❖ **Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

oo

❖ **Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang antara lain terdiri dari :

- a. Piutang Pajak
- b. Piutang Retribusi
- c. Piutang Dana Bagi Hasil
- d. Piutang Dana Alokasi Umum
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

❖ **Piutang Lain-Lain**

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.

Piutang Lain-Lain terdiri dari :

- a. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran
- b. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah
- c. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
- d. Piutang Dividen
- e. Piutang Bagi Hasil Laba usaha Perusahaan Daerah
- f. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

oo

❖ **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri
- Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Persediaan antara lain terdiri dari :

- a) persediaan alat tulis kantor
- b) persediaan alat listrik
- c) persediaan material/bahan
- d) persediaan benda pos
- e) persediaan bahan bakar
- f) persediaan bahan makanan pokok

❖ **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah

oo

- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*). Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20%.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah , misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Investasi Jangka panjang terdiri dari:

- Investasi Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
Terdiri dari : penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara serta investasi permanen lainnya.
- Investasi Non Permanen yaitu : investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

oo

Terdiri dari : pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, investasi non permanen lainnya.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.

❖ **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
2. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Selain itu juga mempunyai nilai yang material sesuai nilai minimum kapitalisasi sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. biaya impor
2. biaya persiapan tempat
3. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*)
4. biaya pemasangan (*installation cost*)
5. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur
6. biaya konstruksi
7. biaya kepanitiaan

Aset tetap terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

oo

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan sampai dengan 31 Desember 2013 belum dilaksanakan dan bertahap akan diterapkan setelah penataan aset tetap di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya selesai dilaksanakan.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

❖ **Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk beberapa tahun anggaran menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga.

❖ **Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah Daerah / Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah / Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

oo

2. **Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3. **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa :

- a) **Bangun, Kelola/Guna, Serah** adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

oo

- b) **Bangun, Serah, Kelola/Guna** adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

- c) **Kerjasama Operasi (KSO)** adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya.

Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

4. **Aset Tidak Berwujud**

Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh : hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud meliputi :

- a. software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
- b. lisensi dan *franchise*
- c. hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya
- d. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

5. **Aset Lain-Lain**

Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

oo

❖ **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi terdiri dari :

- **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Terdiri dari : Utang Taspem, Utang askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

- **Utang Bunga**

Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang.

Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah.

Utang bunga terdiri dari : Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.

- **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang.

Terdiri dari : Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

- **Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periode yang bersangkutan.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.

oo

Terdiri dari : setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak ketiga, uang muka lelang penjualan aset daerah.

- **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

❖ **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

1. Utang Dalam Negeri : Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Utang Luar Negeri : Utang Luar Negeri Sektor Perbankan.

❖ **Ekuitas Dana**

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam :

a. **Ekuitas Dana Lancar**

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

oo

Terdiri dari : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang, cadangan persediaan, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Terdiri dari : diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, diinvestasikan dalam Aset Tetap, diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan), dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Terdiri atas : diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

❖ **Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa**

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :

1. Kesalahan yang tidak berulang

Adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- ó Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembedaan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- ó Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.
- ó Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah

oo

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. tidak merupakan kegiatan normal dari entitas
- b. tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang
- c. berada diluar kendali atau pengaruh entitas
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran II Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas menuju AkruaI) dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

❖ **Penyajian Laporan Keuangan**

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasikan
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akruaI
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

oo

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Neraca, Realisasi Anggaran dan Arus Kas.

5.1 PENJELASAN LAPORAN NERACA

Neraca merupakan Lampiran II dari Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 dan disusun berdasarkan peraturan yang ada dan disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk Posisi Keuangan per 31 Desember 2014 Pemerintah Kota Surabaya secara umum sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Aset	Rp 38.605.937.665.339,57
2.	Kewajiban	Rp 105.182.299.203,24
3.	Ekuitas Dana	Rp 38.500.755.366.136,33

Jumlah **Aset** sebesar Rp38.605.937.665.339,57; terdiri dari Aset lancar sebesar Rp1.715.672.127.791,80; Investasi Jangka panjang sebesar Rp1.894.028.603.745,46; Aset Tetap sebesar Rp34.690.400.238.417,64 serta Aset lainnya sebesar Rp305.836.695.384,67.

Jumlah **Kewajiban** sebesar Rp105.182.299.203,24; terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp105.182.299.203,24; dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00.

Total **Ekuitas Dana** sebesar Rp38.500.755.366.136,33; terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.610.489.828.588,56; Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp36.890.265.537.547,77.

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
I. ASET	Rp38.605.937.665.339,57	Rp37.450.893.488.257,31

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur

oo

dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Aset tahun 2014 sebesar Rp38.605.937.665.339,57 dan tahun 2013 sebesar Rp37.450.893.488.257,31 mengalami kenaikan sebesar 3,08%.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki aset sebesar Rp38.605.937.665.339,57 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

No.	Aset	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1	Aset lancar	1,715,672,127,791.80	1,398,840,797,561.11
2	Investasi jangka panjang	1,894,028,603,745.46	1,826,649,121,407.40
3	Aset tetap	34,690,400,238,417.64	32,904,208,124,230.20
4	Aset lainnya	305,836,695,384.67	1,321,195,445,058.60
Jumlah Aset		38.605.937.665.339,57	37.450.893.488.257,31

A. ASET LANCAR	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp1.715.672.127.791,80	Rp1.398.840.797.561,11

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD RSUD dr. M.Soewandhie, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Persediaan.

Jumlah Aset Lancar tahun 2014 sebesar Rp1 Rp1.715.672.127.791,80 dan tahun 2013 sebesar Rp1.398.840.797.561,11 mengalami kenaikan sebesar 22,65%.

1. Kas di Kas Daerah	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp1.238.263.150.104,76	Rp978.204.777.201,54

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan bank per 31 Desember 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut :

oo

No.	Bank/Rekening	2014	2013
1	Giro Bank Jatim No. Rek 0011007000	Rp 288,263,150,104.76	Rp 378,204,777,201.54
2	Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB243552)	Rp 100,000,000,000.00	Rp 100,000,000,000.00
3	Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB243793)	Rp 100,000,000,000.00	Rp 100,000,000,000.00
4	Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB252459)	Rp 50,000,000,000.00	-
5	Deposito Bank Mandiri berjangka satu bulan (AD327247)	-	Rp 50,000,000,000.00
6	Deposito Bank Mandiri berjangka satu bulan (AD327248)	-	Rp 50,000,000,000.00
7	Deposito Bank Mandiri berjangka satu bulan (AD394838)	Rp 100,000,000,000.00	-
8	Deposito Bank Mandiri berjangka satu bulan (AD394839)	Rp 100,000,000,000.00	-
9	Deposito BNI berjangka satu bulan (PAA884242)	-	Rp 50,000,000,000.00
10	Deposito BNI berjangka satu bulan (PAA884243)	-	Rp 50,000,000,000.00
11	Deposito BNI berjangka satu bulan (PAB041637)	Rp 100,000,000,000.00	-
12	Deposito BNI berjangka satu bulan (PAB041639)	Rp 100,000,000,000.00	-
13	Deposito BRI berjangka satu bulan (DC2841017)	Rp 100,000,000,000.00	Rp 100,000,000,000.00
14	Deposito BTN berjangka satu bulan (PAA884243)	-	Rp 100,000,000,000.00
15	Deposito BTN berjangka satu bulan (A1552783)	Rp 100,000,000,000.00	-
16	Deposito BTN berjangka satu bulan (A1552784)	Rp 100,000,000,000.00	-
Jumlah Bank/Rekening		Rp 1,238,263,150,104.76	Rp 978,204,777,201.54

2. Kas di Bendahara

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Pengeluaran

Rp83.538.522,00

Rp1.351.684.885,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 sebesar Rp83.538.522,00 terdiri dari :

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Perhubungan	502.00
2.	Sekretariat DPRD	83,538,000.00
3.	Kecamatan Wiyung	20.00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran		83,538,522.00

oo

Sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp83.538.522,00 telah disetor kembali oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kas Umum Daerah pada Januari 2015.

3. Kas di Bendahara	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Penerimaan	Rp108.286.008,00	Rp182.819.245,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp108.286.008,00 telah disetor oleh bendahara penerimaan ke Kas Umum Daerah pada Januari 2015.

Kas di Bendahara Penerimaan SKPD sebesar Rp108.286.008,00 terdapat pada SKPD :

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	35,907,000.00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18,269,000.00
3	Dinas Perhubungan	44,268,400.00
4	RSUD Bhakti Dharma Husada	9,841,608.00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		108,286,008.00

4. Kas di BLUD RSUD	31 Desember 2014	31 Desember 2013
dr.M.Soewandhie	Rp92.413.827.517,85	Rp33.903.803.392,69

Saldo kas di BLUD RSUD dr. SOEWANDHIE per 31 Desember 2014 sebesar Rp92.413.827.517,85 terdiri dari :

No.	Bank/Rekening	2014	2013
1.	Bank Jatim No. Rek .0011.233.074	52.383.283.342,85	13.879.646.077,69
2.	Deposito Bank Jatim (berjangka 1 bulan)		
	- DB 221302	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	- DB 221303	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	- DB 221305	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	- DB 221306	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	- DB 283687	20.000.000.000,00	0,00
3.	Kas tunai	30.544.175,00	24.157.315,00
Jumlah Kas di BLUD RSUD dr. Soewandhie		92.413.827.517,85	33.903.803.392,69

5. Kas di Bendahara	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Kapitasi	Rp14.144.539.444,00	Rp0,00

Saldo kas di Bendahara Kapitasi yang terdapat di FKTP Dinas Kesehatan per 31 Desember 2014 sebesar Rp14.144.539.444,00.

oo

6. Piutang Pajak

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Rp599.682.744.180,00

Rp579.935.528.005,00

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp599.682.744.180,00 dan Rp579.935.528.005,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	2014	2013
1	Piutang Pajak Hotel	Rp 11.077.073.210,00	Rp 8.967.496.292,00
2	Piutang Pajak Restoran	Rp 14.471.338.380,00	Rp 13.376.410.192,00
3	Piutang Pajak Hiburan	Rp 1.329.491.097,00	Rp 1.335.491.097,00
4	Piutang Pajak Reklame	Rp 36.472.724.270,00	Rp 30.429.161.720,00
5	Piutang Pajak Penerangan	Rp 89.648.644,00	Rp 90.766.446,00
6	Pajak Parkir	Rp 508.664.957,00	Rp 514.320.528,00
7	BPHTB	Rp 2.215.236.587,00	Rp 2.437.170.562,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 533.453.268.795,00	Rp 522.714.292.788,00
9	Pajak Air Tanah	Rp 65.298.240,00	Rp 70.418.380,00
	Jumlah (lampiran 1)	Rp 599.682.744.180,00	Rp 579.935.528.005,00

Mutasi Piutang Pajak tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal per 1 Januari 2014	Rp 579,935,528,005.00
2.	Penambahan Tahun 2014	Rp 99,882,890,737.00
3.	Pengurangan Tahun 2014	Rp (80,135,674,562.00)
4.	Saldo Akhir per 31 Desember 2014	Rp 599,682,744,180.00

Mutasi Piutang Pajak Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 1-1-2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2014
1	Pajak Hotel	8,967,496,292.00	3,526,557,332.00	1,416,980,414.00	11,077,073,210.00
2	Pajak Restoran	13,376,410,192.00	1,356,103,569.00	261,175,381.00	14,471,338,380.00
3	Pajak Hiburan	1,335,491,097.00	1,511,969,784.00	1,517,969,784.00	1,329,491,097.00
4	Pajak Reklame	30,429,161,720.00	14,459,353,350.00	8,415,790,800.00	36,472,724,270.00
5	PPJ Non PLN	90,766,446.00	8,972,185.00	10,089,987.00	89,648,644.00
6	Pajak Parkir	514,320,528.00	305,049,206.00	310,704,777.00	508,664,957.00
7	BPHTB	2,437,170,562.00	-	221,933,975.00	2,215,236,587.00
8	PBB	522,714,292,788.00	78,653,514,011.00	67,914,538,004.00	533,453,268,795.00
9	Air Tanah	70,418,380.00	61,371,300.00	66,491,440.00	65,298,240.00
	Jumlah	579,935,528,005.00	99,882,890,737.00	80,135,674,562.00	599,682,744,180.00

oo

Perkembangan saldo Piutang PBB tersebut dari saat pelimpahan sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

No	KKP Pratama	Berita Acara Serah Terima	Nilai (Rp)
1	Surabaya Genteng	BA-03/WPJ.11/KP.09/2011	14.232.153.134,00
2	Surabaya Gubeng	BA-04/WPJ.11/KP.04/2011	73.079.350.000,00
3	Surabaya Krembangan	BA-042/WPJ.11/KP.0201/2011	15.416.160.000,00
4	Surabaya Pabean Cantikan	BA-05/WPJ.11/KP.03/2011	11.389.989.441,00
5	Surabaya Rungkut	BA-02/WPJ.11/KP08/2011	67.851.398.000,00
6	Surabaya Saw ahan	BA-03/WPJ.11/KP.06/2011	42.979.818.000,00
7	Surabaya Simkerto	BA-03/WPJ.11/KP.1004/2011	17.400.283.000,00
8	Surabaya Mulyorejo	BA-10/WPJ.11/KP.12/2011	74.832.464.908,00
9	Surabaya Sukomanunggal	BA-12/WPJ.11/KP.01/2011	146.121.706.871,00
10	Surabaya Tegalsari	BA-04/WPJ.11/KP.0501/2011	15.511.255.775,00
11	Surabaya Wonocolo	BA-03/WPJ.11/KP.07/2011	59.334.972.590,00
12	Surabaya Karangpilang	BA-03 A/WPJ.11/KP.13/2011	81.369.451.362,00
Total			619.519.003.081,00
Koreksi Tambah Tahun 2011			785.227.405,00
Koreksi Kurang Tahun 2011			(18.226.432.683,00)
Penerbitan SPPT PBB TA 2011			441.089.588.831,00
Pelunasan PBB TA 2011			(467.815.337.823,00)
Saldo Piutang PBB (per 31 Des 2011)			575.352.048.811,00
Koreksi Tambah Tahun 2012			8.097.548.164,00
Koreksi Kurang Tahun 2012			(993.772.745,00)
Penerbitan SPPT PBB TA 2012			494.666.680.974,00
Pelunasan PBB TA 2012			(543.663.130.253,00)
Saldo Piutang PBB TA 2012 (per 31 Desember)			533.459.374.951,00
Koreksi Tambah Tahun 2013			28.290.203.817,00
Koreksi Kurang Tahun 2013			(1.211.824.816,00)
Penerbitan SPPT PBB TA 2013			567.279.520.912,00
Pelunasan PBB TA 2013			(605.102.982.076,00)
Saldo Piutang PBB TA 2013 (per 31 Desember)			522.714.292.788,00
Koreksi Tambah Tahun 2014			23.946.011.645,00
Koreksi Kurang Tahun 2014			(2.735.569.490,00)
Penerbitan SPPT PBB TA 2014			672.546.952.462,00
Pelunasan PBB TA 2014			(683.018.418.610,00)
Saldo Piutang PBB TA 2014 (per 31 Desember)			533.453.268.795,00

Piutang PBB per 31 Desember 2014 senilai Rp533.453.268.795,00 tersebut belum memperhitungkan denda keterlambatan. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar yaitu sebagai berikut:

No.	Kategori Piutang	Piutang (Rp)
1.	Konfirmasi (WP yang telah membayar akan tetapi masih tercatat pada piutang PBB)	6.773.137.410,00
2.	Telah dilakukan penagihan dan angsuran (termasuk diantaranya tanah kosong, rumah kosong, fasum, fasos, tanah pemerintahan)	201.679.576.815,00
3.	SPPT ganda Nomor Objek Pajak (NOP)	7.461.354.329,00
4.	Belum ditemukan obyek dan wajib pajak	90.992.990.675,00
5.	Sedang dan akan diidentifikasi	226.546.209.566,00
JUMLAH		533.453.268.795,00

oo

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk memperbaiki permasalahan tersebut antara lain yaitu :

- ❖ Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Timur I dan KPP Pratama serta Bank tempat dilakukan pembayaran PBB;
- ❖ Melakukan kegiatan/pekerjaan atas pemutakhiran dan pendataan PBB;
- ❖ Menyusun Peraturan Walikota yang berkaitan dengan tindak lanjut piutang PBB antara lain: (1) Penagihan Pajak Daerah; (2) Penghapusan Piutang Daerah yang sudah kadaluarsa.

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
7. Piutang Retribusi	Rp67.406.396.625,01	Rp57.984.042.393,92

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp67.406.396.625,01 dan Rp57.984.042.393,92 dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN		2014		2013
1	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp	227.269.575,00	Rp	88.653.875,00
2	Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi)	Rp	758.346.735,00	Rp	758.346.735,00
3	Retribusi Kebersihan pada PDAM	Rp	494.694.980,00	Rp	1.349.348.779,60
4	Retribusi THR	Rp	350.179.100,00	Rp	327.477.914,00
5	Retribusi Balai Pemuda	Rp	503.370.000,00	Rp	181.776.000,00
6	Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan)	Rp	1.400.050.426,08	Rp	1.400.050.426,08
7	Retribusi IMB - Ciptakarya	Rp	55.310.348.409,00	Rp	49.908.574.797,00
8	Retribusi SKRK-Ciptakarya	Rp	524.717.223,00	Rp	420.905.623,00
9	Retribusi sewa stand Terminal	Rp	324.956.354,00	Rp	297.927.693,00
10	Retribusi Pelayanan-BDH	Rp	6.916.701.511,00	Rp	2.284.459.379,56
11	Retribusi Ijin Gangguan (HO)	Rp	5.914.500,00	Rp	21.891.180,00
12	Retribusi Gelanggang Remaja	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000,00
13	Retribusi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	Rp	588.847.811,93	Rp	240.152.091,68
14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp	-	Rp	703.477.900,00
Jumlah			Rp 67.406.396.625,01	Rp	57.984.042.393,92

oo

Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo Awal 1-1-2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2014
1.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	88.653.875,00	138.615.700,00	-	227.269.575,00
2.	Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi)	758.346.735,00	-	-	758.346.735,00
3.	Retribusi Kebersihan pada PDAM	1.349.348.779,60	494.694.980,00	1.349.348.779,60	494.694.980,00
4.	Retribusi THR	327.477.914,00	153.094.773,00	130.393.587,00	350.179.100,00
5.	Retribusi Balai Pemuda	181.776.000,00	321.594.000,00	-	503.370.000,00
6.	Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan)	1.400.050.426,08	-	-	1.400.050.426,08
7.	Retribusi IMB - Ciptakarya	49.908.574.797,00	181.558.248.066,00	176.156.474.454,00	55.310.348.409,00
8.	Retribusi SKRK-Ciptakarya	420.905.623,00	1.158.175.346,00	1.054.363.746,00	524.717.223,00
9.	Retribusi sewa stand Terminal	297.927.693,00	307.183.197,00	280.154.536,00	324.956.354,00
10.	Retribusi Pelayanan Kesehatan -BDH	2.284.459.379,56	6.873.648.806,00	2.241.406.674,56	6.916.701.511,00
11.	Retribusi Ijin Gangguan (HO) BLH	21.891.180,00	15.052.057.208,00	15.068.033.888,00	5.914.500,00
12.	Retribusi Gelanggang Remaja (Dispora)	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
13.	Retribusi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	240.152.091,68	506.631.114,04	157.935.393,79	588.847.811,93
14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	703.477.900,00	5.692.935.596,00	6.396.413.496,00	0,00
	Jumlah	57.984.042.393,92	212.256.878.786,04	202.834.524.554,95	67.406.396.625,01

Sumber data : SKPD Kota Surabaya, diolah

8. Piutang lain-lain	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp129.158.706.489,62	Rp138.610.115.263,18

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp129.158.706.489,62 dan Rp138.610.115.263,18, dengan rincian saldo sebagai berikut:

oo

URAIAN		2014	2013
1. Piutang RSUD dr Soewandhie			
a	Piutang jamkesmas kuota RSUD dr. Soewandhie	Rp 11.864.264.215,00	Rp 14.053.323.269,16
b	Piutang jamkesmas non kuota RSUD dr Soewandhie	Rp 1.175.738.054,12	Rp 1.993.031.000,00
c	Piutang askes sosial RSUD dr. Soewandhie	Rp -	Rp 218.453.000,00
d	Piutang obat askes RSUD dr. Soewandhie	Rp -	Rp 193.844.191,00
e	Piutang obat In Health RSUD dr. Soewandhie	Rp 931.443,00	Rp 812.133,00
f	Piutang In Health RSUD dr. Soewandhie	Rp 5.334.650,00	Rp 2.225.250,00
g	Piutang PT. KAI RSUD dr. Soewandhie	Rp 64.549.300,00	Rp 107.945.025,00
h	Piutang Jamkesda RSUD dr. Soewandhie	Rp 210.847.678,00	Rp 97.706.751,00
2. Piutang Lain-lain eks DPRD		Rp 185.274.343,50	Rp 185.274.343,50
3. Piutang bantuan Parpol Bakesbang Linmas		Rp 155.000.000,00	Rp 155.000.000,00
4. Piutang sewa gedung Siola			
a	Piutang Gedung Tunjungan Center Lt I,II,III	Rp 1.958.343.229,00	Rp 1.883.022.336,00
b	Piutang JPO dan Pertokoan diatas Jl. Tunjungan dan Jl Tanjung Anom	Rp 274.916.762,00	Rp 264.343.040,00
c	Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan PT Tunjungan City Hopefull	Rp 1.658.398.524,00	Rp 1.487.352.937,00
5. Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya		Rp 2.696.404.190,00	Rp 2.696.404.190,00
6. Piutang kepada rekanan penyedia barang jasa			
a	Koreksi atas sanksi administrasi penyedia barang jasa berdasarkan perhitungan bersama PPK SKPD	Rp 384.498.301,00	Rp 384.498.301,00
b	Koreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan	Rp 871.922.880,00	Rp 871.922.880,00
c	Piutang atas denda keterlambatan (Ciptakarya)	Rp -	Rp 31.281.816,00
7. Piutang dana bagi hasil dari Provinsi			
a	Piutang DBH Provinsi . Pajak	Rp 102.584.767.826,00	Rp 113.168.501.192,00
b	Piutang DBH Provinsi . Sumbangan Pihak Ketiga	Rp -	Rp 11.588.083,00
8. Piutang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pusat yang Kurang Bayar		Rp 4.594.251.633,00	Rp -
9. Piutang sewa Gelora 10 Nopember – Dispora		Rp 89.550.000,00	Rp 89.550.000,00
10. Piutang dividen PT. SKU Tahun 2012		Rp 274.277.461,00	Rp 274.277.461,00
11. Piutang kontribusi Bangun Guna/Kelola Serah Pasar Turi beserta sanksi denda 1% per bulan		Rp -	Rp 439.758.064,52
12. Piutang Bantuan Parpol Pemilu 2014		Rp 109.436.000,00	Rp -
Jumlah		Rp 129.158.706.489,62	Rp 138.610.115.263,18

oo

Mutasi Piutang Lain-lain Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal 1-1-2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2014
1.	Piutang RSUD dr. Soewandhie				
	• Piutang Jamkesmas Kuota	14.053.323.269,16	87.067.838.285,00	89.256.897.339,16	11.864.264.215,00
	• Piutang Jamkesmas Non Kuota	1.993.031.000,00	32.510.863.149,12	33.328.156.095,00	1.175.738.054,12
	• Piutang askes sosial	218.453.000,00	-	218.453.000,00	0,00
	• Piutang Obat Askes	193.844.191,00	-	193.844.191,00	0,00
	• Piutang Obat In Health	812.133,00	11.672.355,00	11.553.045,00	931.443,00
	• Piutang In Health	2.225.250,00	30.949.250,00	27.839.850,00	5.334.650,00
	• Piutang kepada PT KAI	107.945.025,00	255.772.564,00	299.168.289,00	64.549.300,00
	• Piutang Jamkesda	97.706.751,00	2.811.327.554,50	2.698.186.627,50	210.847.678,00
2.	Piutang Lain-lain eks	185.274.343,50	-	-	185.274.343,50
3.	Piutang bantuan Parpol Bakesbanglinmas	155.000.000,00	-	-	155.000.000,00
4.	Piutang sewa gedung Siola				
	• Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan PT. Tunjungan City Hopefull	1.487.352.937,00	1.658.398.524,00	1.487.352.937,00	1.658.398.524,00
	• Piutang Gedung Tunjungan Center Lt I,II,III	1.883.022.336,00	1.958.343.229,00	1.883.022.336,00	1.958.343.229,00
	• Piutang JPO dan Pertokoan diatas Jl. Tunjungan dan Jl Tanjung Anom	264.343.040,00	274.916.762,00	264.343.040,00	274.916.762,00
5.	Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya	2.696.404.190,00	-	-	2.696.404.190,00
6.	Piutang kepada Rekanan penyedia barang jasa				
	• Koreksi atas sanksi administrasi penyedia barang jasa berdasarkan perhitungan bersama PPK SKPD	384.498.301,00	-	-	384.498.301,00
	• Koreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan	871.922.880,00	-	-	871.922.880,00
	• Piutang atas denda keterlambatan	31.281.816,00	-	31.281.816,00	0,00
7.	Piutang dana bagi hasil dari Pemprov				
	• Bagi Hasil Pajak	113.168.501.192,00	102.584.767.826,00	113.168.501.192,00	102.584.767.826,00
	• Sumbangan Pihak Ketiga	11.588.083,00	-	11.588.083,00	0,00
8.	Piutang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pusat yang Kurang Bayar	0,00	4.594.251.633,00	-	4.594.251.633,00
9.	Piutang sewa Gelora 10 Nopember . Dispora	89.550.000,00	-	-	89.550.000,00
10.	Piutang dividen PT. SKU tahun 2007	274.277.461,00	-	-	274.277.461,00
11.	Piutang kontribusi Bangun Guna/Kelola Serah Pasar Turi beserta sanksi denda 1% per bulan	439.758.064,52	-	439.758.064,52	0,00
12.	Piutang bantuan Parpol Hasil Pemilu 2014	0,00	109.436.000,00	-	109.436.000,00
	Jumlah	138.610.115.263,18	233.868.537.131,62	243.319.945.905,18	129.158.706.489,62

oo

1. Piutang RSUD dr. Mochamad Soewandhie

- a. Piutang Jamkesmas Kuota RSUD dr. Mochamad Soewandhie sebesar Rp11.864.264.215,00 merupakan klaim atas pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas Kuota Tahun 2014, sedangkan piutang Tahun 2013 sebesar Rp14.053.323.269,16 telah dilunasi Tahun 2014.
Piutang Jamkesmas Kuota RSUD dr. Moh. Soewandhie terbayar pada Bulan Januari dan Februari 2015 sebesar Rp11.857.041.816,00
- b. Piutang Jamkesmas Non Kuota RSUD dr. Mochamad Soewandhie sebesar Rp1.175.738.054,12 merupakan klaim atas pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas Non Kuota Tahun 2014.
Piutang Jamkesmas Non Kuota RSUD dr. Moh. Soewandhie terbayar pada Bulan Januari 2015 sebesar Rp1.174.324.113,00.
- c. Piutang askes RSUD dr. Mochamad Soewandhie yang merupakan klaim pelayanan kesehatan pasien askes ke PT. Askes Surabaya tahun 2014 tidak ada, sedangkan tahun 2013 sebesar Rp218.453.000,00 telah terbayar di tahun 2014.
- d. Piutang obat askes RSUD dr. Mochamad Soewandhie yang merupakan klaim pemakaian obat ke PT. Askes Surabaya tahun 2014 tidak ada, sedangkan tahun 2013 sebesar Rp193.844.191,00 telah terbayar di tahun 2014.
- e. Piutang obat In Health dr. Mochamad Soewandhie merupakan klaim pemakaian obat In Health selama tahun 2014 sebesar Rp931.443,00, sedangkan tahun 2013 sebesar Rp812.133,00 telah terbayar di tahun 2014.
Piutang Obat In Health RSUD dr. Moh. Soewandhie terbayar pada Bulan Februari 2015 sebesar Rp931.443,00.
- f. Piutang In Health dr. Mochamad Soewandhie sebesar Rp5.334.650,00 merupakan klaim pelayanan In Health Tahun 2014, sedangkan tahun 2013 sebesar Rp2.225.250,00 telah terbayar di tahun 2014.
Piutang Tindakan In Health RSUD dr. Moh. Soewandhie terbayar pada Bulan Januari dan Maret 2015 sebesar Rp5.334.650,00
- g. Piutang PT.KAI dr.Mochamad Soewandhie sebesar Rp64.549.300,00 merupakan klaim pelayanan kesehatan selama tahun 2014, sedangkan tahun 2013 sebesar Rp107.945.025,00 telah terlunasi di tahun 2014.
Piutang PT KAI terbayar pada Bulan Januari dan Februari 2015 sebesar Rp64.549.300,00.

oo

- h. Piutang Jamkesda dr.Mochamad Soewandhie sebesar Rp210.847.678,00 merupakan klaim pelayanan kesehatan selama tahun 2014, sedangkan tahun 2013 sebesar Rp97.706.751,00 telah terlunasi di tahun 2014.
Piutang Jamkesda terbayar pada Bulan Januari 2015 sebesar Rp162.466.604,00
- 2. Piutang lain-lain eks anggota DPRD sebesar Rp185.274.343,50 meliputi kelebihan pembayaran penghasilan DPRD Kota Surabaya tahun 2004 yang melebihi ketentuan SE Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 2 Desember 2003 dan sisa Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota DPRD Kota Surabaya Tahun 2001-2002 yang digunakan tidak sesuai ketentuan. Adapun nama para pejabat DPRD Kota Surabaya tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) HS,SH anggota DPRD senilai Rp41.251.668,70
 - b) YSS, anggota DPRD senilai Rp45.751.668,70
 - c) H.Ism, anggota DPRD senilai Rp40.051.668,70
 - d) FS, anggota DPRD senilai Rp36.751.668,70
 - e) MB, anggota DPRD senilai Rp21.467.668,70
- 3. Piutang bantuan Parpol Bakesbanglinmas per 31 Desember 2014 sebesar Rp155.000.000,00. Piutang ini merupakan sisa piutang pada Bakesbanglinmas atas kelebihan bantuan keuangan pada Parpol Tahun 2014. Saldo tersebut merupakan saldo kelebihan pemberian yang belum dikembalikan dari tujuh Parpol.
- 4. Piutang sewa Gedung Siola
 - a. Pada Tahun 2014 PT. Tunjungan City Hopefull mempunyai tunggakan sewa tanah dan bangunan sebesar Rp1.658.398.524,00. Piutang ini telah dilunasi oleh PT. Tunjungan City Hopefull pada tanggal 18 Februari 2015;
 - b. Piutang sewa Tahun 2014 Gedung Tunjungan Center Lt I, II, III Jl. Tunjungan No. 3 sebesar Rp1.958.343.229,00 oleh PT. Tunjungan City Hopefull. Piutang ini telah dilunasi oleh PT. Tunjungan City Hopefull pada tanggal 30 Januari 2015.
 - c. Piutang sewa selama Tahun 2014 atas JPO dan pertokoan diatas Jl. Tunjungan dan Jl. Tanjung Anom sebesar Rp274.916.762,00 oleh PT. Tunjungan City Hopefull. Piutang ini telah dilunasi oleh PT. Tunjungan City Hopefull pada tanggal 30 Januari 2015.

oo

5. Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya sebesar Rp2.696.404.190,00 belum ada pelunasan karena pihak TVRI masih mengajukan banding.
6. Piutang kepada Rekanan Penyedia Barang Jasa
 - a. Piutang kepada rekanan penyedia barang/jasa atas sanksi administrasi penyedia barang jasa sebesar Rp384.498.301,00 berdasarkan perhitungan bersama PPK SKPD. Tahun 2010 sampai Tahun 2014 belum ada pelunasan.
 - b. Sedangkan piutang atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan sebesar Rp871.922.880,00 berasal dari Nilai Jaminan yang semula berada di aset lain-lain, tapi jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan karena telah melewati batas waktu sehingga di konversi menjadi Piutang Lain-lain. Rincian saldo per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Rekanan	Piutang sanksi administrasi	Piutang Jaminan Pelaksanaan
1.	PT Rukun Jaya Madura Group	137.412.792,00	402.409.920,00
2.	PT Rukun Jaya Madura Group	121.435.375,00	210.180.000,00
3.	PT Daya Guna Permata	82.100.069,00	198.306.720,00
4.	CV Endah Elok Energi	43.550.065,00	61.026.240,00
Jumlah		384.498.301,00	871.922.880,00

- c. Piutang atas denda keterlambatan (Dinas Cipta Karya) pada tahun 2013 sebesar Rp31.281.816,00 telah terbayar di tahun 2014.
7. Piutang Dana Bagi Hasil dari Propinsi yang belum diterima oleh Pemerintah Kota Surabaya selama Tahun 2014 berasal dari : Bagi Hasil Pajak sebesar Rp102.584.767.826,00 dan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00.
8. Piutang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pusat menurut Provinsi yang belum diterima sebesar Rp4.594.251.633,00.
9. Piutang sewa Gelora 10 Nopember Tahun 2014 sebesar Rp89.550.000,00 merupakan sewa pemakaian lapangan oleh PSSI Surabaya sebesar Rp50.091.000,00 dan Panitia Festival Pemuda dan Hari Lapangan (FPHP) sebesar Rp39.459.000,00.
10. Piutang deviden pada PT Surya Karsa Utama sebesar Rp274.277.461,00, sesuai data laporan keuangan PT Surya Karsa Utama tahun 2014.
11. Piutang kontribusi Bangun Guna/Kelola Serah Pasar Turi beserta sanksi denda 1% per bulan sebesar Rp439.758.064,52 telah terbayar di tahun 2014, sedangkan kontribusi tahun 2014 yang merupakan kontribusi tahun ke-5 juga terbayar di tahun

oo

2014 berdasar bukti STS No.J22924/KAS/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 sebesar Rp437.500.000,00.

12. Piutang Bantuan Parpol Pemilu 2014 merupakan kelebihan pembayaran dana bantuan parpol hasil pemilu 2014 dimana piutang tersebut telah dikembalikan oleh Partai Politik yang bersangkutan pada bulan Februari 2015.

9. Bagian Lancar	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Tuntutan Ganti Rugi.	Rp353.308.881,31	Rp322.530.471,52

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp353.308.881,31 merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnya. Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang bahwa piutang ganti rugi yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketetapan penyelesaian yang telah ditetapkan disajikan sebagai aset lancar. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 sebesar Rp353.308.881,31 terdiri atas :

NO	N A M A	SISA CICILAN (Rp)
1	(Alm) STJ	6.350.000,00
2	(Alm) Drs. M	37.800.000,00
3	(Alm) M	6.000.000,00
4	S, BE	46.000.000,00
5	Drs. A C	8.000.000,00
6	Drs. SMJ	50.000.000,00
7	Drs. SMS	4.700.000,00
8	SNRY	5.350.000,00
9	MNW	36.000.000,00
10	MTN	71.160.000,00
11	FH	11.428.000,00
12	Sla	12.417.522,22
13	Drs MI	25.000.000,00
14	WH	6.250.000,00
15	Mty	13.428.409,09
16	USW	13.424.950,00
J U M L A H		353.308.881,31

10. Penyisihan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Piutang Tidak Tertagih	(Rp495.384.515.001,66)	(Rp462.155.735.876,51)

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota no.58 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi

oo

Pemerintah Kota Surabaya maka dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih berdasar atas umur piutang dan jenis piutang sebagai berikut :

No.	URAIAN	2014	2013
1	Penyisihan Piutang Pajak (Lampiran 2)	(473.361.837.610,00)	(449.310.985.329,00)
2	Penyisihan Piutang Retribusi (Lampiran 3)	(17.117.576.705,05)	(8.201.606.591,82)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain (Lampiran 4)	(4.624.674.925,50)	(4.371.783.955,69)
4	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (Lampiran 5)	(280.425.761,11)	(271.360.000,00)
T O T A L		(495.384.515.001,66)	(462.155.735.876,51)

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2014 sebesar (Rp473.361.837.610,00) terdiri dari :

No.	Piutang Pajak	2014	2013
1	Piutang Pajak Hotel	Rp (6.167.506.982,00)	Rp (5.203.075.487,00)
2	Piutang Pajak Restoran	Rp (11.963.464.541,00)	Rp (10.871.153.557,00)
3	Piutang Pajak Hiburan	Rp (1.291.876.097,00)	Rp (1.210.263.032,00)
4	Piutang Pajak Reklame	Rp (11.976.663.620,00)	Rp (7.817.616.095,00)
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Rp (88.242.918,00)	Rp (88.552.293,00)
6	Pajak Parkir	Rp (486.176.870,00)	Rp (452.365.759,00)
7	BPHTB	Rp (2.102.229.785,00)	Rp (1.808.504.335,00)
8	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp (439.269.166.457,00)	Rp (421.851.428.001,00)
9	Pajak Air Tanah	Rp (16.510.340,00)	Rp (8.026.770,00)
Jumlah Piutang Pajak		Rp (473.361.837.610,00)	Rp (449.310.985.329,00)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2014 sebesar (Rp17.117.576.705,05) terdiri dari :

No.	Piutang Retribusi	2014	2013
1	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp (88.653.875,00)	Rp (88.653.875,00)
2	Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi)	Rp (728.261.773,75)	Rp (680.265.158,75)
3	Retribusi THR	Rp (120.827.609,25)	Rp (115.545.373,50)
4	Retribusi Balai Pemuda	Rp (294.451.500,00)	Rp (174.657.000,00)
5	Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan)	Rp (1.300.012.475,58)	Rp (1.265.347.445,58)
6	Retribusi IMB (Cipta Karya)	Rp (14.216.712.089,00)	Rp (5.594.297.407,00)
7	Retribusi SKRK (Cipta Karya)	Rp (297.667.067,25)	Rp (195.962.811,50)
8	Retribusi sewa stand Terminal	Rp (25.421.835,50)	Rp (19.932.989,75)
9	Retribusi pelayanan (BDH)	Rp (24.514.305,25)	Rp (19.594.461,00)
10	Retribusi Gelanggang Remaja	Rp (500.000,00)	Rp (250.000,00)
11	Retribusi Pemakaian Tanah	Rp (20.554.174,47)	Rp (47.100.069,74)
Jumlah Piutang Retribusi		Rp (17.117.576.705,05)	Rp (8.201.606.591,82)

oo

Penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2014 sebesar (Rp4.624.674.925,50) terdiri dari :

No.	URAIAN	2014	2013
1	Piutang Lain-lain eks DPRD	Rp (185.274.343,50)	Rp (185.274.343,50)
2	Piutang Dividen PT SKU	Rp (274.277.461,00)	Rp (274.277.461,00)
3	Piutang bantuan Parpol Bakesbang-linmas	Rp (155.000.000,00)	Rp (155.000.000,00)
4	Koreksi atas sanksi administrasi penyedia barang jasa berdasar-kan perhitungan ber-sama PPK SKPD	Rp (384.498.301,00)	Rp (384.498.301,19)
5	Koreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari rekanan	Rp (871.922.880,00)	Rp (653.942.160,00)
6	Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya	Rp (2.696.404.190,00)	Rp (2.696.404.190,00)
7	Piutang gelora 10 November	Rp (57.297.750,00)	Rp (22.387.500,00)
Jumlah		Rp (4.624.674.925,50)	Rp (4.371.783.955,69)

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 sebesar (Rp280.425.761,11) terdiri dari:

No.	Nama	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	(Alm) STJ	Rp (6.350.000,00)	Rp (6.350.000,00)
2	(Alm) Drs. M	Rp (37.800.000,00)	Rp (37.800.000,00)
3	(Alm) M	Rp (6.000.000,00)	Rp (6.000.000,00)
4	S, BE	Rp (46.000.000,00)	Rp (46.000.000,00)
5	Drs. A C	Rp (8.000.000,00)	Rp (8.000.000,00)
6	Drs. SMJ	Rp (50.000.000,00)	Rp (50.000.000,00)
7	Drs. SMS	Rp (4.700.000,00)	Rp (4.700.000,00)
8	SNRY	Rp (5.350.000,00)	Rp (5.350.000,00)
9	MNW	Rp (36.000.000,00)	Rp (36.000.000,00)
10	MTN	Rp (71.160.000,00)	Rp (71.160.000,00)
11	FH	Rp (2.857.000,00)	Rp -
12	Sla	Rp (6.208.761,11)	Rp -
Jumlah		Rp (280.425.761,11)	Rp (271.360.000,00)

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
11. Piutang Bersih	Rp301.216.641.174,28	Rp314.696.480.257,11

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011

oo

tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya, maka piutang disajikan berdasar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian piutang secara nilai bersih yang dapat direalisasikan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Piutang Bersih	2014	2013
1	Piutang bersih Pajak	Rp 126.320.906.570,00	Rp 130.624.542.676,00
2	Piutang bersih Retribusi	Rp 50.288.819.919,96	Rp 49.782.435.802,10
3	Piutang bersih Lain-lain	Rp 124.534.031.564,12	Rp 134.238.331.307,49
4	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp 72.883.120,20	Rp 51.170.471,52
	Jumlah Piutang Bersih	Rp 301.216.641.174,28	Rp 314.696.480.257,11

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, diolah

12. Belanja	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Dibayar di Muka	Rp917.359.530,76	Rp0,00

Saldo Belanja dibayar dimuka sebesar Rp917.359.530,76 terdiri dari saldo asuransi dibayar dimuka dan saldo sewa dibayar dimuka.

Saldo Asuransi Dibayar di Muka per 31 Desember 2014 sebesar Rp74.133.944,83 merupakan saldo atas asuransi kendaraan, bangunan tower dan gedung yang masa jangka waktunya dimulai dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Asuransi Dibayar di Muka	2014
1	Bagian Umum dan Protokol	13.022.650,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.793.211,50
3	Dinas Perhubungan	37.500.000,00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	16.818.083,33
	Jumlah Asuransi Dibayar di Muka	74.133.944,83

Saldo Sewa Dibayar di Muka per 31 Desember 2014 sebesar Rp843.225.585,93 merupakan saldo atas pembayaran sewa aset tanah dan bangunan yang belum dinikmati manfaatnya oleh Pemerintah Kota Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Sewa Dibayar di Muka	2014
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan	710.271.105,60
2	Kecamatan Rungkut	18.333.333,33
3	Kecamatan Pabean Cantian	114.621.147,00
	Jumlah Sewa Dibayar di Muka	843.225.585,93

oo

13. Persediaan

Rp68.524.785.490,15

Rp70.501.232.579,77

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut (**Lampiran 6**):

No.	Persediaan	2014	2013
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 2.028.215.016,04	Rp 1.618.450.632,33
2	Persediaan Obat-obatan		
	· Dinas Kesehatan	Rp 5.163.374.738,20	Rp 9.682.643.227,00
	· RS Dr Soewandhie	Rp 4.830.516.190,00	Rp 2.521.492.221,29
	· Dinas Pertanian	Rp 36.126.573,00	Rp 36.464.738,00
	· RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp 13.192.358.640,46	Rp 16.813.385.027,48
3	Persediaan Bahan Makanan		
	· RSUD. Dr. Soewandhie	Rp 99.462.473,00	Rp 92.866.100,00
	· RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp 59.024.438,87	Rp 82.968.171,00
4	Persediaan Bahan Material		
	· Aspal dan Material Lainnya Dinas Bina Marga	Rp 1.062.172.310,35	Rp 1.801.636.176,45
	· Aspal dan Material Lainnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp 5.119.324.008,50	Rp 2.537.572.056,00
	· Bahan baku bangunan - Dinas Kebakaran	Rp -	Rp 1.210.000,00
	· Bahan baku bangunan - Dinas Cipta Karya	Rp 2.144.009.810,00	Rp 652.497.840,00
5	Persediaan Bahan Kimia		
	· Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp -	Rp -
	· Badan Lingkungan Hidup	Rp 1.604.900,00	Rp -
	· Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Rp 62.370,00	Rp 56.900,00
6	Persediaan Bahan Habis Pakai Kedokteran		
	· RSUD. Dr. Soewandhie	Rp 5.374.477.662,04	Rp 3.292.352.715,26
	· RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp 2.725.070.348,17	Rp 1.489.170.833,40
	Persediaan bongkaran gedung di Bagian Perlengkapan	Rp 374.227.500,00	Rp 307.687.750,00
	Persediaan Pakaian Dinas di Bagian Perlengkapan	Rp 542.856.600,00	
	Persediaan Bibit Tanaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp 430.243.000,00	Rp 98.450.000,00
	Persediaan Ternak Dinas Pertanian	Rp 117.437.470,00	Rp 156.349.100,00
	Persediaan Alat Kontrasepsi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga	Rp 1.733.020.338,00	Rp 422.444.000,00
	Persediaan alat listrik RSUD Bhakti Dharma Husada	Rp 251.512.367,24	Rp 117.761.389,70
7	Persediaan Habis Pakai Lainnya	Rp 23.239.688.736,28	Rp 28.775.773.701,86
	Jumlah Persediaan	Rp 68.524.785.490,15	Rp 70.501.232.579,77

Selain saldo persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp68.524.785.490,15, masih terdapat persediaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kebakaran yang belum tercatat di Neraca Pemerintah Kota Surabaya per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut:

oo

- (a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat persediaan berupa Blanko Pemberitahuan NIK Penduduk per Keluarga sejumlah 1.027.612 lembar dan Blanko Kartu Keluarga sejumlah 3.100 set yang tidak diketahui nilainya karena persediaan tersebut merupakan bantuan dari Depdagri pada Tahun 2010 dan 2009 yang tidak ditemukan bukti penerimaannya.

- (b) Dinas Kebakaran

Persediaan pada Dinas Kebakaran diakui sebesar Rp600.198.555,00, namun terdapat persediaan alat pelindung diri (APD) sebesar Rp1.903.852.500,00 yang didalamnya belum termasuk persediaan APD di UPTD karena belum diinventarisir.

B. INVESTASI JANGKA	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	PANJANG	Rp1.894.028.603.745,46

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi jangka panjang pada tahun 2014 sebesar Rp1.894.028.603.745,46 dan tahun 2013 sebesar Rp1.826.649.121.407,40 mengalami kenaikan 3,69%.

Investasi Jangka Panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya Per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.894.028.603.745,46 yang terdiri dari Investasi Non Permanen sebesar Rp0,00 dan Investasi Permanen sebesar Rp1.894.028.603.745,46.

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1. Investasi Non Permanen	Rp0,00	Rp1.725.000,00

oo

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berupa dana yang disisihkan oleh Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

a. Investasi Non Permanen Lainnya	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp3.949.380.381,27	Rp3.979.113.717,27

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.949.380.381,27 merupakan dana Pemerintah Kota Surabaya yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat/koperasi di bawah pengawasan Tim Pokja. Dana tersebut terdiri dari :

No.	Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1.	Dana Pembangunan Kota/ Kabupaten Surabaya (DPKK) Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp 133,703,742.00	Rp 133,703,742.00
2.	Bantuan Kepada Petemak Sapi Kereman Dinas Pertanian	Rp 18,300,000.00	Rp 18,300,000.00
3.	Bantuan Modal Bergulir untuk Pengembangan Usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima - Dinas Koperasi dan UMKM	Rp 3,797,376,639.27	Rp 3,827,109,975.27
Jumlah		Rp 3,949,380,381.27	Rp 3,979,113,717.27

- Dana Pembangunan Kota/Kabupaten Surabaya (DPKK) di Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp133.703.742,00.

Saldo awal dana bergulir sebesar Rp240.000.000,00 antara lain telah dilakukan penutupan rekening dana bergulir dengan sisa saldo sebesar Rp83.998.807,59 yang telah disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 08 Nopember 2010, selain itu juga terdapat honorarium dan biaya operasional yang diberikan berkaitan dengan penyampaian dana bergulir sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/114/402.01.04/2001 dan Nomor 188.45/115/402.01.04/2001 sebesar Rp22.297.450,00.

oo

Sehingga terdapat tunggakan sebesar Rp133.703.742,00 yang merupakan pinjaman Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Perdagangan yang digulirkan untuk :

- 22 UKM pada Tahap I dengan sisa tunggakan sebesar Rp91.355.083,00
- 9 UKM pada Tahap II dengan sisa tunggakan sebesar Rp42.348.659,00

Sejak Tahun 2003 sampai dengan saat ini tidak terjadi pengangsuran dari para UKM tersebut.

Pada bulan Nopember dan Desember 2009, telah dilakukan konfirmasi penagihan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan dan ditanda tangani langsung oleh pihak UKM atas pengakuan hutang dan kesanggupan membayar, namun sampai dengan saat ini belum ada UKM yang melakukan pengangsuran, meskipun sudah dilakukan penagihan/konfirmasi ulang.

Pada bulan September dan Nopember 2010 dilakukan upaya penagihan kembali dan proses pengembalian pinjaman terhambat dikarenakan beberapa hal antara lain :

- Peminjam telah meninggal dunia, ahli waris tidak mengetahui pinjaman tersebut sehingga tidak bersedia untuk bertanggung jawab
- Usaha peminjam pindah alamat keluar kota dan alamat tidak terdeteksi
- Usaha peminjam tutup dan tidak sanggup untuk melakukan pengembalian
- Peminjam mengakui telah melunasi, namun tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan (kwitansi), sementara data yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya tidak terdapat pembayaran sesuai rekening koran bank.

- **Bantuan kepada Peternak Sapi Kereman di Dinas Pertanian sebesar Rp18.300.000,00.**

Dana bergulir berupa penyerahan sapi kepada pengaduh untuk dipelihara dengan cara penggemukan oleh pengaduh sesuai dengan surat perjanjian no. 524/986.1/402.4.10/2003 tanggal 30 Juni 2003 dengan kewajiban selambat-lambatnya pada bulan ke-12 menyerahkan sapi hasil penggemukan kepada Dinas Pemantapan Pangan/Dinas Pertanian dengan sistem bagi hasil dengan pengembalian modal pokok untuk digulirkan kembali. Saldo awal dana bergulir sebesar Rp41.600.000,00 berupa modal pokok pembelian 13 ekor sapi anakan seharga Rp3.200.000,00 per ekornya. Dana tersebut diberikan kepada 13 pengaduh dilingkungan pemerintah kota surabaya. Posisi per 31 Desember

oo

2014 dari ke 13 pengaduh telah melakukan angsuran kepada Dinas pertanian sebesar Rp23.300.000,00, sehingga masih tersisa sebesar Rp18.300.000,00.

Hasil konfirmasi kepada pengaduh diketahui bahwa keberadaan sapi dana bergulir sudah tidak ada. Pengaduh telah menjual sapi yang dipeliharanya untuk kemudian hasil penjualan digunakan sebagai modal kerja, sewa lahan garapan dan membayar operasi keluarganya, namun atas hasil penjualan tersebut tidak disampaikan kepada Pemerintah Kota. Saldo bantuan sebesar Rp18.300.000,00 merupakan tunggakan seluruh masyarakat kepada Dinas Pertanian. Dan sampai akhir Desember 2014 belum ada pelunasan.

- **Bantuan Modal Bergulir untuk Pengembangan Usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima di Dinas Koperasi dan Sektor Informal sebesar Rp3.797.376.639,27.**

Mutasi tahun 2014 adalah :

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2014	Rp 3,827,109,975.27
2	Penambahan Tahun 2014	Rp -
3	Pengurangan Tahun 2014	Rp 29,733,336.00
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2014	Rp 3,797,376,639.27

Pengurangan Investasi sebesar Rp29.733.336,00 merupakan pengembalian Pokok Dana Bergulir ke Kas Umum Pemerintah Kota Surabaya, sehingga pokok dana bergulir berkurang menjadi sebesar Rp3.797.376.639,27.

b. Penyisihan Dana	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Bergulir Tidak Tertagih	(Rp3.949.380.381,27)	(Rp3.977.388.717,27)

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka dilakukan penyisihan investasi non permanen dana bergulir tidak tertagih berdasar atas investasi non permanen dana bergulir sebagai berikut :

oo

No.	Penyisihan Dana Bergulir tidak Tertagih	2014	2013
1	Penyisihan Dana Pembangunan Kota/Kabupaten (DPKK)	Rp (133.703.742,00)	Rp (133.703.742,00)
2	Penyisihan Dana Bantuan Sapi Kereman	Rp (18.300.000,00)	Rp (18.300.000,00)
3	Penyisihan Dana Pengembangan Koperasi Pengusaha Kecil dan Kaki	Rp (3.797.376.639,27)	Rp (3.825.384.975,27)
Jumlah Penyisihan Dana Bergulir tidak Tertagih (lampiran 7)		Rp (3.949.380.381,27)	Rp (3.977.388.717,27)

c. Investasi Non	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Permanen Bersih	Rp0,00	Rp1.725.000,00

Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka dana bergulir disajikan berdasar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian dana bergulir secara nilai bersih yang dapat direalisasikan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	2014	2013
1	Dana Pengembangan Koperasi Pengusaha Kecil dan Kaki Lima bersih	Rp -	Rp 1.725.000,00
T O T A L		Rp -	Rp 1.725.000,00

2. Investasi	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Permanen	Rp1.894.028.603.745,46	Rp1.826.647.396.407,40

a.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp1.894.028.603.745,46	Rp1.826.647.396.407,40

Penilaian Investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan Metode Ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai 100%, sedangkan untuk kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan Metode Biaya. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 31 Desember

oo

2014 dan 2013 sebesar Rp1.894.028.603.745,46 dan Rp1.826.647.396.407,40 adalah sebagai berikut :

No.	Perusahaan Milik Daerah	Penyertaan Modal	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1. Perusahaan Milik Daerah				
a.	Investasi pada perusahaan Daerah Air Minum	Rp 81.403.538.341,00	Rp 1.087.863.850.764,00	Rp 1.041.368.698.955,00
b.	Investasi pada PD Pasar Surya	Rp 15.993.122.665,00	Rp 32.192.372.197,00	Rp 30.649.755.611,00
c.	Investasi pada PD Rumah Potong Hewan	Rp 7.045.511.405,00	Rp 10.252.840.994,00	Rp 10.035.863.651,00
d.	Investasi pada PT Surya Karsa Utama	Rp 1.250.000.000,00	Rp 1.680.970.497,60	Rp 1.547.052.820,80
e.	Investasi pada PT BPR Surya Artha Utama (SAU)	Rp 4.508.000.000,00	Rp 8.524.814.843,86	Rp 7.242.752.151,60
f.	PD Taman Satwa KBS	Rp 581.043.085.000,00	Rp 569.979.287.982,00	Rp 571.188.477.768,00
Jumlah 1		Rp 691.243.257.411,00	Rp 1.710.494.137.278,46	Rp 1.662.032.600.957,40
2. Lembaga Keuangan Bank				
a.	Investasi pada PT Bank Jatim	Rp 79.810.864.250,00	Rp 79.810.864.250,00	Rp 79.810.864.250,00
b.	Investasi pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim	Rp 198.059.000,00	Rp 198.059.000,00	Rp 198.059.000,00
Jumlah 2		Rp 80.008.923.250,00	Rp 80.008.923.250,00	Rp 80.008.923.250,00
3. Pihak Ketiga				
a.	Investasi pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Rp 7.500.000.000,00	Rp 103.013.177.417,00	Rp 84.017.250.000,00
b.	Investasi pada PT Abbatoir Surya Jaya	Rp 900.000.000,00	Rp -	Rp -
c.	Investasi pada PT Sasana Taruna Aneka Ria (STAR)	Rp 249.000.000,00	Rp 512.365.800,00	Rp 588.622.200,00
Jumlah 3		Rp 8.649.000.000,00	Rp 103.525.543.217,00	Rp 84.605.872.200,00
TOTAL		Rp 779.901.180.661,00	Rp 1.894.028.603.745,46	Rp 1.826.647.396.407,40

1. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PDAM adalah 100%. Nilai Investasi pada PDAM yang tersaji sebesar Rp1.087.863.850.764,00 tersebut, terdapat selisih sebesar Rp30.085.347.945,00 dengan nilai ekuitas yang disajikan dalam Neraca PDAM. Hal itu karena aset saluran pipa milik Pemkot Surabaya yang digunakan oleh PDAM senilai Rp30.085.347.945,00, pada Neraca PDAM telah dicatat sebagai penyertaan Pemkot Surabaya. Namun, penyertaan tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan aset dimaksud masih tercatat sebagai Aset Lainnya dalam Neraca Pemkot Surabaya.
2. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PD Pasar Surya adalah sebesar 100% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas sebesar Rp32.192.372.197,00
3. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PD Rumah Potong Hewan adalah sebesar 100% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas sebesar Rp10.252.840.994,00.

oo

4. Kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT.Surya Karsa Utama (SKU) adalah sebesar Rp1.680.970.497,60 atau 96%.
5. Kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR SAU senilai Rp8.524.814.843,86 atau 98%.
6. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PD. Taman Satwa KBS adalah sebesar 100% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas sebesar Rp569.979.287.982,00.
7. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. Bank Jatim adalah sebesar 3,99%. Sedangkan untuk kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT.BPR Jatim adalah sebesar 0,29%. Sehingga pencatatan penilaian investasinya menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan modalnya dibawah 20%, jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya tahun 2013 untuk Bank Jatim dan BPR Jatim sebesar Rp79.810.864.250,00 dan Rp198.059.000,00.
8. Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. SIER sebesar 25% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas sebesar Rp103.013.177.417,00.
9. Kepemilikan modal PT. Abbatoir Surya Jaya sebesar 30% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas. Penyertaan pada PT. Abbatoir dinilai Rp0,00 karena Ekuitas PT. Abbatoir per 31 Desember 2013 bernilai minus, yaitu Rp1.716.714.677,10.
10. PT. STAR sebesar 30% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas sebesar Rp512.365.800,00.

Jumlah Kepemilikan Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut :

1. PDAM sebesar 100% dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp81.403.538.341,00.
2. PD Pasar Surya sebesar 100% dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp15.993.122.665,00.
3. PD Rumah Potong Hewan sebesar 100% dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp7.045.511.405,00.
4. Kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT. Surya Karsa Utama (SKU) sebesar Rp1.250.000.000,00 berupa saham sebanyak 1.250 lembar dengan harga per-sahamnya sebesar Rp1.000.000,00.

oo

5. Penyertaan modal pada PT. BPR SAU sebesar Rp2.597.000.000,00 berupa saham sebanyak 2.597 lembar dengan harga Rp1.000.000,00 per lembar sahamnya. Pada awalnya, Pemerintah Kota Surabaya menyetor modal ke PT. SKU sebesar Rp3.700.000.000,00 atau 3.700 lembar saham. Pada Tahun 2004, PT. SKU menyetor modal kepada PT. BPR SAU sebesar Rp2.450.000.000,00 atau 2.450 lembar saham. Pada Tahun 2010, PT. SKU mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya di PT. BPR SAU yang semula Tahun 2004 senilai Rp2.450.000.000,00 atau 2.450 lembar saham dan pada Tahun 2010 telah menjadi Rp2.597.000.000,00 atau 2.597 lembar saham kepada Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2013 terdapat penambahan modal Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp1.274.000.000,00 sesuai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. BPR SAU melalui pengalihan saham dari PT. SKU kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. BPR SAU Nomor 28 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris-PPAT Dedy Harijanto, ST, SH. Tahun 2014 juga terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp637.000.000,00 atau sebanyak 637 lembar saham sesuai Berita Acara RUPSLB PT. BPR Surya Artha Utama Nomor 87 Tanggal 25 Juni 2014.
6. Pada Tahun 2012 Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kepemilikan modal ke PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp565.868.600.000,00 berupa Tanah seluas 15,3 Ha. Pada tahun 2013 terdapat penambahan sebesar Rp5.174.485.000,00 kepada PD. Taman Satwa KBS sesuai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang PD Taman Satwa KBS. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Surat Direktur Utama PD. Taman Satwa KBS Tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 001/Ext/PDTS/VII/2013; Hal : Pencairan Dana.
- Per 31 Desember 2013, PD. KBS menguasai Aset Tetap berupa bangunan gedung dan peralatan yang berada diatas tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang diserahkan kepada PD. KBS sebagai penyertaan modal Pemkot Surabaya. Aset Tetap berupa bangunan gedung dan peralatan tersebut merupakan milik Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS) yang merupakan pihak pengelola Kebun Binatang Surabaya sebelumnya dan saat ini digunakan oleh PD. KBS dalam kegiatan pengelolaan KBS. Atas aset tersebut masih dalam status

oo

sengketa di pengadilan mulai mantan pengurus PTFSS. Berdasarkan laporan keuangan Kebun Binatang Surabaya tahun 2012 audited nilai aset tetap yang berada dalam penguasaan PD. KBS adalah sebesar Rp2.854.432.880,00. Tahun 2014 juga terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai SP2D No NP06949 tanggal 25 Juli 2014.

7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Lembaga Keuangan Bank adalah dengan Investasi pada PT. Bank Jatim dengan total investasi semula sebesar Rp32.230.000.000,00 berupa kepemilikan saham sebanyak 32.230 lembar harga per sahamnya sebesar Rp1.000.000,00 mendapat tambahan dana cadangan umum yang dikonversi menjadi saham sehingga total penyertaan menjadi sebesar Rp79.810.864.250,00 atau sebanyak 319.243.457 lembar harga per sahamnya sebesar Rp250,00, sesuai Berita Acara RUPS LB No 19 Tanggal 19 Maret 2012. Sedangkan investasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim sebesar Rp198.059.000,00 adalah berupa kepemilikan saham sebanyak 198 lembar yang harga persahamnya sebesar Rp1.000.000,00.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga adalah dengan melakukan Investasi pada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) sebesar Rp7.500.000.000,00, yang merupakan kepemilikan saham sebanyak 7.500 lembar yang harga per-lembaranya adalah sebesar Rp1.000.000,00.
9. Investasi kepada PT. Abbatoir Surya Jaya sebesar Rp900.000.000,00 merupakan kepemilikan saham sebanyak 9.000 lembar yang harga persahamnya sebesar Rp100.000,00,
10. Penyertaan modal kepada PT. STAR merupakan kepemilikan saham sebanyak 1.200 lembar saham senilai Rp249.000.000,00 atau senilai Rp207.500,00 per lembar saham atas Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Sasana Wisata sebagai penyertaan (*inbreng*) sebagai modal saham dalam PT. STAR sesuai perjanjian penggunaan tanah nomor 181.2/1739/411.12/87 tanggal 20 Juli 1987. Atas penyertaan modal tersebut Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan sertifikasi HGB diatas HPL Nomor 21/K, surat ukur Nomor 1271 Tahun 1988 atas nama PT. Sasana Wisata dan berakhir tahun 2006.

oo

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
C. ASET TETAP	Rp34.690.400.238.417,64	Rp32.904.208.124.230,20

Aset tetap tahun 2014 sebesar Rp34.690.400.238.417,64 dan tahun 2013 sebesar Rp32.904.208.124.230,20 mengalami kenaikan 5,43%.

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1.	Tanah	26.475.340.943.248,86	25.927.505.754.851,52
2.	Peralatan dan Mesin	1.780.486.966.954,79	1.596.950.573.698,57
3.	Gedung dan Bangunan	2.862.272.113.054,18	2.394.705.500.118,86
4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	3.304.614.532.028,05	2.774.347.096.373,03
5.	Aset Tetap Lainnya	71.967.855.601,25	48.740.161.128,84
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	195.717.827.530,51	161.959.038.059,38
Jumlah		34.690.400.238.417,64	32.904.208.124.230,20

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
1. Tanah	Rp26.475.340.943.248,86	Rp25.927.505.754.851,52

Dari jumlah saldo tanah sebesar Rp26.475.340.943.248,86 di antaranya seluas 39.150 m² lokasi Kelurahan Kendangsari Kecamatan Tenggilis Mejoyo dengan bukti kepemilikan berupa petok a.n Poernomo Kasidi senilai Rp2.505.600.000,00 yang telah dikuasai oleh pengembang PT. Griyo Mapan Sentosa. Terhadap kondisi di atas PT. Griyo Mapan Sentosa memberikan tanah pengganti seluas 10.750 m² di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dan seluas 33.550 m² di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut sesuai dengan BA Tukar Menukar nomor 188.45/270/436.1.2/2006 tanggal 14 Nopember 2006.

Tanah senilai Rp26.475.340.943.248,86 dan Rp25.927.505.754.851,52 merupakan nilai tanah per 31 Desember 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut:

oo

No.	Tanah	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	Tanah Kampung	1.038.347.885.974,20	1.052.631.291.234,89
2	Tanah Kuburan	92.070.311.424,00	89.512.084.841,00
3	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami	29.879.350.328,00	28.325.250.328,00
4	Tanah Kebun Campuran Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain	49.709.000,00	49.709.000,00
5	Tanah Hutan Untuk Penggunaan Khusus	1.715.199.008.110,00	1.715.199.008.110,00
6	Tanah Tambak	73.405.421.897,00	62.910.421.897,00
7	Tanah Danau	8.038.074.000,00	7.983.704.000,00
8	Tanah Penggalan	-	589.315.441,00
9	Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal	9.554.960.577.143,26	9.531.665.497.814,00
10	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan /Perusahaan	390.711.081.739,50	384.624.186.844,50
11	Tanah Untuk Bangunan Industri	12.630.000,00	12.630.000,00
12	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.584.820.254.231,10	1.591.989.994.349,33
13	Tanah Kosong	114.212.746.708,00	59.196.891.708,00
14	Tanah Bangunan Pengairan	50.364.180.776,00	50.364.180.776,00
15	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	611.758.514.981,50	609.367.554.981,50
16	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Stren	2.451.020.595,00	2.451.020.595,00
17	Tanah Lapangan Olahraga	241.454.054.487,00	225.901.187.749,00
18	Tanah Lapangan Parkir	2.162.530.600,00	2.162.530.600,00
19	Tanah Lapangan Penimbun Barang	376.537.766,00	376.537.766,00
20	Tanah Untuk Bangunan Jalan	10.399.274.144.958,80	10.231.003.705.286,80
21	Tanah Untuk Bangunan Air	523.076.741.729,50	238.472.884.729,50
22	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	18.734.050.000,00	18.734.050.000,00
23	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	-	-
24	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	23.982.116.800,00	23.982.116.800,00
Jumlah Tanah		26.475.340.943.248,86	25.927.505.754.851,52

Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah

Mutasi Tanah tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2014	Rp 25.927.505.754.851,50
2	Penambahan Tahun 2014	Rp 680.326.468.529,00
3	Pengurangan Tahun 2014	Rp (132.491.280.131,66)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2014	Rp 26.475.340.943.248,86

Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah

Penambahan Aset Tetap Tanah tahun 2014 sebesar 680.326.468.529,00 berasal dari:

1. Pengadaan/pembelian selama tahun 2014 sebesar Rp181.123.011.641,00 (**lampiran 8**) diperoleh dari :

Belanja modal tanah Tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp187.840.393.447,00 namun setelah melalui proses verifikasi dari Bendahara barang SKPD dan Bagian Perlengkapan, maka yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap tanah sebesar Rp181.123.011.641,00 dengan rincian sebagai berikut :

oo

No.	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	Alat Besar/Berat Darat	92.021.599.735,28	80.918.248.634,28
2	Alat Besar/Berat Apung	7.444.600,00	8.089.200,00
3	Alat-alat Bantu	100.511.731.467,26	76.622.852.373,26
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	305.783.970.854,77	259.882.490.035,78
5	Alat Angkutan darat Tak Bermotor	9.712.117.175,10	7.238.482.175,10
6	Alat Angkut Apung Bermotor	2.134.038.327,20	2.095.210.727,20
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	5.468.084.592,00	3.872.949.867,00
8	Alat Bengkel Bermesin	10.923.996.575,30	10.647.022.350,30
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	2.263.031.336,72	2.468.728.623,98
10	Alat Ukur	14.291.813.043,60	11.851.743.405,22
11	Alat Pengolahan	5.078.881.324,11	4.380.882.857,02
12	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	828.945.150,46	907.313.840,93
13	Alat Kantor	104.998.475.682,09	98.062.857.655,34
14	Alat Rumah Tangga	232.953.537.224,66	217.421.941.332,05
15	Komputer dan Printer	230.225.963.255,07	228.437.457.124,24
16	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.750.733.206,00	11.574.720.330,80
17	Alat Studio	51.884.482.382,93	46.509.816.256,07
18	Alat Komunikasi	14.122.023.965,62	13.909.043.253,70
19	Peralatan Pemancar	4.431.777.399,23	6.616.331.679,78
20	Alat kedokteran	385.285.429.809,98	335.496.403.125,27
21	Alat Kesehatan	13.785.504.031,61	11.526.994.936,61
22	Alat Unit-unit Laboratorium	100.950.209.736,81	99.459.540.801,44
23	Alat Peraga/Praktik Sekolah	41.166.962.121,68	36.961.871.375,89
24	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	571.374.186,60	580.794.186,60
25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.577.598.572,35	2.334.242.152,35
26	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	3.865.831.664,00	3.950.625.664,00
27	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	2.525.628.355,08	2.547.203.355,08
28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	18.783.964.358,59	18.831.482.858,59
29	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	1.512.854.970,69	1.761.429.470,69
30	Senjata Api	-	4.250.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	68.961.850,00	69.554.050,00
Jumlah Peralatan dan Mesin		1.780.486.966.954,79	1.596.950.573.698,57

Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2014	Rp 1.596.950.573.698,57
2	Penambahan Tahun 2014	Rp 273.263.977.181,74
3	Pengurangan Tahun 2014	Rp (89.727.583.925,52)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2014	Rp 1.780.486.966.954,79

Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah

oo

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2014 sebesar Rp273.263.977.181,74 berasal dari:

1. Pengadaan/pembelian selama tahun 2014 sebesar Rp252.893.687.922,56 (**lampiran 11**) diperoleh dari :

- (a) Belanja modal peralatan dan mesin selama tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp280.948.288.646,00 namun setelah melalui proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan, yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp250.996.589.712,81. Sisa belanja modal sebesar Rp29.915.698.951,00 yang menjadi aset tetap bukan peralatan dan mesin sebesar Rp29.564.686.951,00 yang menjadi bukan aset tetap sebesar Rp387.012.000,00.
- (b) Belanja modal selain peralatan dan mesin setelah proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang diklasifikasikan menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.569.977.569,75.
- (c) Belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp327.120.640,00.

2. Mutasi KDP tahun 2013 sebesar Rp82.700.000,00 berupa mobil *aerial ladder* pemadam kebakaran.

3. Hibah sebesar Rp.3.097.509.461,00 berasal dari :

a.	PT. Telekomunikasi Indonesia	Rp	290.125.000,00
b.	PT. Terminal Peti Kemas Surabaya	Rp	681.080.000,00
c.	PT. Perusahaan Gas Negara	Rp	314.325.000,00
d.	PT. Bank Negara Indonesia	Rp	335.750.000,00
e.	Bank Jatim	Rp	1.156.717.000,00
f.	Kementerian Kesehatan RI	Rp	16.192.461,00
g.	Bank Mandiri	Rp	303.320.000,00

JUMLAH Rp 3.097.509.461,00

4. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.175.100.609,30 terdiri dari Peralatan Mesin sebesar Rp9.999.387.479,30 yang belum tercatat dalam buku inventaris selama tahun 2014 dan sebesar Rp4.175.713.130,00 merupakan koreksi

oo

atas kurang pengakuan aset tetap yang diperoleh dari Belanja Dana BOS pada SMA/SMK Negeri .

5. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari koreksi nilai Rp0,00 yang mengakibatkan terjadinya koreksi nilai tambah aset Peralatan dan Mesin selama tahun 2014 sebesar Rp134.745.600,00.
6. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin lainnya berasal dari penggantian kendaraan yang hilang yang mengakibatkan terjadinya bertambahnya nilai aset Peralatan dan Mesin selama tahun 2014 sebesar Rp18.750.000,00.
7. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2014 sebesar Rp2.846.556.422,22.
8. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.910.500,00 merupakan koreksi atas kelebihan reklasifikasi peralatan dan mesin karena kesalahan sistem.
9. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.666,66 merupakan koreksi atas kelebihan koreksi hapus karena kesalahan sistem pada Puskesmas Gayungan sebesar Rp10.000,00 dan Puskesmas Tembok Dukuh sebesar Rp6.666,66.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2014 sebesar Rp89.727.583.925,52 terdiri atas:

1. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2014 berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/33/436.1.2/2014; 188.45/346/436.1.2/2014 dan 188.45/553/436.1.2/2014 sebesar Rp6.730.745.616,96;
2. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2014 sebesar Rp120.750.000,00 terdiri dari Rp110.000.000,00 merupakan pengurangan yang disebabkan adanya koreksi barang yang hilang (TGR) dan sebesar Rp10.750.000,00 merupakan koreksi atas kelebihan pencatatan dari TPTGR yang seharusnya diakui pada tahun 2015;
3. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2014 sebesar Rp15.299.847.143,00 karena koreksi hapus Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disebabkan adanya pencatatan ganda sebesar Rp3.117.704.003,00 dan salah pencatatan barang pakai habis yang dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.182.143.140,00;

oo

4. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2014 sebesar Rp67.408.293.341,40 merupakan pengurangan yang disebabkan adanya reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya;
5. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.428.409,09 merupakan reklasifikasi atas aset tetap yang hilang namun masih tercatat dalam Simbada.
6. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp154.519.411,00 merupakan koreksi atas pencatatan aset tetap yang tidak melebihi batas kapitalisasi.
7. Koreksi atas saldo awal sebesar Rp4,07.

Dari nilai peralatan dan mesin sebesar Rp1.780.486.966.954,79, pada Tahun 2014, Pemerintah Kota Surabaya telah menerima hibah berupa barang sebesar Rp65.116.693.840,00. Akan tetapi, masih terdapat hibah berupa 25 unit *Converter Kit* BBG sebesar Rp450.000.000,00 yang belum seluruhnya diterima dan dimanfaatkan oleh Pemkot Surabaya dan belum dilaporkan sebagai aktiva tetap.

5. Gedung dan Bangunan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp2.862.272.113.054,18	Rp2.394.705.500.118,86

Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.862.272.113.054,18 dan Rp2.394.705.500.118,86 merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.567.393.667.687,99	2.245.192.923.309,12
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	176.851.779.354,95	50.466.921.289,95
3	Bangunan Menara	1.206.308.889,58	1.142.459.346,58
4	Bangunan bersejarah	729.572.736,00	677.795.477,00
5	Tugu peringatan /Prasasti	9.521.811.272,00	8.930.311.151,00
6	Monumen / Bangunan Bersejarah	27.159.000,00	0,00
7	Tugu peringatan	227.540.799,00	316.282.522,40
8	Tugu Titik Kontrol/Pasti/Tanda Batas	22.963.279.069,62	22.251.216.289,62
9	Rambu-rambu	39.564.683.718,10	32.857.111.404,66
10	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5.237.432.062,70	3.897.862.006,70
11	Sarana Prasarana Taman	36.954.737.479,70	27.378.476.337,29
12	Sarana Prasarana Pemakaman	1.594.140.984,54	1.594.140.984,54
Jumlah Gedung dan Bangunan		Rp 2.862.272.113.054,18	Rp 2.394.705.500.118,86

oo

Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	
1	Saldo Awal per 1 Januari 2014	Rp	2.394.705.500.118,86
2	Penambahan Tahun 2014	Rp	814.930.140.033,92
3	Pengurangan Tahun 2014	Rp	(347.363.527.098,60)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2014	Rp	2.862.272.113.054,18

Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2014 sebesar Rp814.930.140.033,92 berasal dari:

1. Pengadaan tahun 2014 sebesar Rp373.936.376.597,44 (**lampiran 12**) diperoleh dari :
 - a. Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp408.302.726.466,00 namun setelah melalui proses verifikasi dari Bendahara barang SKPD dan Bagian Perlengkapan yang bisa diklasifikasikan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp334.854.044.323,44, sedangkan sisa belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp73.448.682.142,56 diklasifikasikan menjadi aset tetap selain gedung dan bangunan sebesar Rp1.109.235.665,00 dan non aset tetap sebesar Rp72.339.446.477,56;
 - b. Belanja modal selain gedung dan bangunan yang diklasifikasikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp36.666.890.626,00;
 - c. Belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp2.415.441.647,00.
2. Mutasi KDP tahun 2013 yang menjadi aset tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp22.502.591.476,60 merupakan KDP milik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp19.732.823.576,60, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp2.322.634.900 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp447.133.000;
3. Hibah dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk berdasarkan BAST nomor 415.4/5821/436.2.3/2014 berupa bangunan air mancur jalur hijau persimpangan sebesar Rp273.969.000,00 dan hibah dari PT. Perusahaan Gas Negara berdasarkan BAST nomor 415.4/7551/436.2.3/2014 berupa bangunan taman jalur hijau sebesar Rp180.400.000,00;
4. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum tercatat dalam buku inventaris selama tahun 2013 sebesar Rp115.157.305.466,00;

oo

5. Pemutakhiran nilai gedung dan bangunan yang mengakibatkan terjadinya koreksi nilai tambah terhadap asset tetap sebesar Rp302.647.228.378,88;
6. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp232.269.115,00 dikarenakan reklasifikasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2014 sebesar Rp347.363.527.098,60 terdiri atas :

1. Adanya penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2014 berdasarkan Kep. Walikota Surabaya Nomor 188.45/204/436.1.2/2014 dan 188.45/209/436.1.2/2014; sebesar Rp944.245.086,00;
2. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.498.469.719,96 dikarenakan adanya pemutakhiran nilai gedung dan bangunan, penghapusan sebagian gedung dan bangunan;
3. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2014 sebesar Rp310.872.409.792,42 terdiri dari Rp310.812.856.352,42 karena adanya koreksi hapus Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena pencatatan ganda, salah pencatatan dan kapitalisasi (penggabungan nilai) dan sebesar Rp59.553.440,00 merupakan koreksi atas pencatatan aset tetap yang tidak melebihi batas kapitalisasi.
4. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2014 sebesar Rp16.048.402.500,00.
5. Koreksi atas saldo awal sebesar Rp0,22.

6. Jalan, Jaringan dan Instalasi	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp3.304.614.532.028,05	Rp2.774.347.096.373,03

Jalan, Jaringan, dan Instalasi sebesar Rp3.304.614.532.028,05 dan Rp2.774.347.096.373,03 merupakan nilai jalan, jaringan dan instalasi per 31 Desember 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut:

oo

No.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	Jalan	1.474.433.683.082,59	1.299.043.546.828,81
2	Jembatan	216.083.281.711,11	197.518.928.215,30
3	Bangunan Air Irigasi	88.805.704.053,00	88.615.135.385,00
4	Bangunan Air Pasang Surut	45.258.765.878,00	45.249.000.528,00
5	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	12.304.544.061,10	12.304.544.061,10
6	Bangunan Air Pengaman Sungai dan Penanggulangan bencana alam	1.062.363.730.465,24	774.862.209.128,75
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5.399.523.557,30	5.385.143.557,30
8	Bangunan Air Bersih /Air Baku	8.332.377.684,56	6.516.075.184,56
9	Bangunan Air Kotor	42.002.322.890,89	41.406.794.602,70
10	Bangunan Air Laut	637.242.332,95	637.242.332,95
11	Instalasi Air Minum /Air Bersih	21.106.147.548,00	18.065.040.057,00
12	Instalasi Air Kotor	8.680.313.132,20	8.680.313.132,20
13	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	14.027.019.458,00	13.980.987.208,00
14	Instalasi Pembangkit Listrik	2.053.726.810,42	1.399.660.565,00
15	Instalasi Gardu Listrik	4.520.752.391,60	3.857.056.738,60
16	Instalasi Gas	1.900.933.771,50	1.646.611.186,50
17	Instalasi Pengaman	31.380.000,00	31.380.000,00
18	Jaringan Air Minum	5.785.104.447,00	5.691.123.329,00
19	Jaringan Listrik	289.489.424.831,19	248.034.250.410,86
20	Jaringan Telepon	38.289.001,00	61.789.001,00
21	Jaringan Gas	1.360.264.920,40	1.360.264.920,40
Jumlah Jalan, Jaringan dan Instalasi		Rp 3.304.614.532.028,05	Rp 2.774.347.096.373,03

Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah

Mutasi Jalan, Jaringan, dan Instalasi tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2014	Rp 2.774.347.096.373,03
2	Penambahan Tahun 2014	Rp 530.408.568.937,21
3	Pengurangan Tahun 2014	Rp (141.133.282,19)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2014	Rp 3.304.614.532.028,05

Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Instalasi selama tahun 2014 sebesar Rp530.408.568.937,21 berasal dari:

1. Pengadaan tahun 2014 sebesar Rp466.493.208.747,42 (**lampiran 13**) diperoleh dari :
 - a. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2014 dialokasikan sebesar Rp516.795.444.056,00 namun setelah melalui proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp465.577.192.994,42 sedangkan

oo

sisanya belanja modal sebesar Rp51.218.251.061,58 merupakan belanja modal yang menjadi aset tetap selain Jalan, Irigasi dan Jaringan;

- b. Belanja modal selain belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang setelah melalui proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan menjadi aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp135.362.900,00;
 - c. Belanja barang jasa yang diklasifikasikan menjadi aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp780.652.853,00.
2. Mutasi KDP tahun 2013 berupa jalan, jembatan dan saluran sebesar Rp63.343.841.036,27 di Dinas PU Bina Marga dan Pematuan sebesar Rp63.294.682.036,27 dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp49.159.000,00;
 3. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp34.733.333,33 merupakan kekurangan pencatatan nilai aset yang diperoleh dari penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial perumahan Palm Spring Regency berupa PJU.
 4. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Instalasi selama tahun 2014 sebesar Rp536.785.820,19

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi tahun 2014 sebesar Rp141.133.282,19 terdiri dari:

1. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2014 sebesar Rp138.051.082,19 merupakan pengurangan yang disebabkan adanya reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya;
2. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2014 sebesar Rp3.082.200,00 merupakan pengurangan yang disebabkan adanya koreksi hapus jalan instalasi dan jaringan.

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
7. Aset Tetap Lainnya	Rp71.967.855.601,25	Rp48.740.161.128,84

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp71.967.855.601,25 dan Rp48.740.161.128,84 merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut:

oo

No.	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1.	Buku	Rp 63.046.544.730,50	Rp 40.743.256.858,10
2.	Terbitan Berkala	Rp 234.245.658,00	Rp 234.245.658,00
3.	Barang-barang Perpustakaan	Rp 838.933.189,00	Rp 838.933.189,00
4.	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp 6.009.301.905,84	Rp 5.066.516.905,83
5.	Alat Olahraga Lainnya	Rp 728.010.976,96	Rp 733.410.976,96
6.	Hewan dan Ternak	Rp 32.528.276,15	Rp 32.528.276,15
7.	Tanaman	Rp 1.078.290.864,80	Rp 1.091.269.264,80
Jumlah Aset Tetap Lainnya		Rp 71.967.855.601,25	Rp 48.740.161.128,84

Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah

Mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2014	Rp 48.740.161.128,84
2	Penambahan Tahun 2014	Rp 33.061.296.188,00
3	Pengurangan Tahun 2014	Rp (9.833.601.715,59)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2014	Rp 71.967.855.601,25

Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah

Penambahan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2014 sebesar Rp33.061.296.188,00 berasal dari :

1. Pengadaan/pembelian selama tahun 2014 sebesar Rp10.236.675.106,00 (**lampiran 14**) diperoleh dari :
 - a. Belanja modal aset tetap lainnya Tahun 2014 dialokasikan Rp9.645.662.806,00 namun setelah melalui proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap lainnya sebesar Rp9.466.520.106,00 sedangkan sisa belanja modal sebesar Rp179.142.700,00 menjadi aset tetap selain aset tetap lainnya;
 - b. Belanja modal selain Aset Tetap Lainnya yang setelah proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang bisa menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp73.195.000,00;
 - c. Belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan menjadi aset tetap lainnya sebesar Rp696.960.000,00.
2. Penambahan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari reklasifikasi sebesar Rp3.395.000,00;

oo

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2014 sebesar Rp85.929.132.512,87 dikarenakan adanya pelaksanaan pekerjaan terhadap KDP yang pengerjaannya per 31 Desember 2014 sudah selesai dan siap dipakai terdiri dari :

(a) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Rp	19.781.982.576,60
(b) Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp	2.322.634.900,00
(c) Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Rp	63.294.682.036,27
(d) Dinas Kebakaran	Rp	82.700.000,00
(e) Dinas Perhubungan	<u>Rp</u>	<u>447.133.000,00</u>
Jumlah	Rp	85.929.132.512,87

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat dalam **Lampiran 15**.

Saldo Aset Tetap ó KDP masih mencatat Biaya Pengawasan dan Perencanaan atas Aset Tetap ó Jalan, Irigasi dan Jaringan pada DPUBMP secara global dan belum memperhatikan status penyelesaian pekerjaannya. Biaya Pengawasan dan Perencanaan tersebut belum diatribusikan secara proporsional ke dalam masing-masing Aset Tetap sesuai paket kegiatannya. Untuk selanjutnya akan dilakukan validasi dan dikoreksi kedalam Aset Tetap terkait.

D. ASET LAINNYA	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp305.836.695.384,67	Rp1.321.195.445.058,60

Aset lainnya tahun 2014 sebesar Rp305.836.695.384,67 dan tahun 2013 sebesar Rp1.321.195.445.058,60 mengalami penurunan sebesar -76.85%.

Berikut adalah saldo aset lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013 yang terdiri dari :

a. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TPTGR)	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp9.999.800,00	Rp87.906.000,00

Mutasi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2014	Rp 87.906.000,00
2	Penambahan Tahun 2014	Rp -
3	Pengurangan Tahun 2014	Rp (77.906.200,00)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2014	Rp 9.999.800,00

oo

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) sebesar Rp9.999.800,00 terdiri atas :

No.	NAMA	SISA CICILAN (Rp)
1	YKDC	Rp 9.999.800,00
JUMLAH		Rp 9.999.800,00

Tahun 2014 terdapat reklasifikasi dari Aset Lainnya tagihan TPTGR atas nama Drs MI sebesar Rp25.000.000,00 dan WH sebesar Rp6.250.000,00 ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan MP telah melakukan pelunasan di tahun 2014.

b. Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp186.112.082.293,02	Rp186.112.082.293,02

Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp186.112.082.293,02 dan Rp186.112.082.293,02 terdiri dari :

No.	Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1.	Bangun, Kelola, Serah (BKS)	Rp 147.779.494.793,02	Rp 147.779.494.793,02
2.	Bangun, Serah, Kelola (BSK)	Rp 4.969.192.500,00	Rp 4.969.192.500,00
3.	Kerjasama Operasi (KSO)	Rp 33.363.395.000,00	Rp 33.363.395.000,00
Jumlah Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga		Rp 186.112.082.293,02	Rp 186.112.082.293,02

▪ Bangun, Kelola, Serah (BKS)	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp147.779.494.793,02	Rp147.779.494.793,02

Bangun, Kelola, Serah (BKS) per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp147.779.494.793,02 dan Rp147.779.494.793,02 dapat dirinci sebagai berikut :

oo

No.	URAIAN	2014	2013
1.	Tempat Usaha Jl. Kusuma bangsa No. 116 Surabaya Perjan-jian No. 511.3/953/402.1.02/1989 tanggal 7 April 1989 dengan PT Sasana Boga Berlaku 30 tahun sejak pembangunan selesai Seluruh BKS didanai dari pihak ketiga	Rp 13.490.000.000,00	Rp 13.490.000.000,00
2.	Pembangunan dan pe-ngelolaan Pasar Turi (Jl. Pasar Turi 21). Sesuai perjanjian kerja-sama tanggal 9 Maret 2010 Nomor 180/1096/436.1.2/2010 dengan PT. Gala Bumi Per-kasa. Berlaku 25 tahun sejak penyerahan obyek berupa tanah. Seluruh BKS didanai dari pihak ketiga. Dari aset tanah seluas 43.800 m2 senilai Rp.121.720.200.000, yang merupakan milik Pemerintah Kota Sura-baya adalah 27.519 m2 bila dinilai secara proporsional sebesar Rp.76.475.301.000,00.	Rp 76.475.301.000,00	Rp 76.475.301.000,00
3.	Perjanjian Kerjasama Nomor 658.1/4347/436.6.5/2012 dan Nomor 88/JBU-SO/8/ 2012 tanggal 8 Agustus 2012 dalam hal kerjasama penyediaan Prasarana dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo dengan PT. Sumber Organik dengan jangka waktu 20 Tahun.	Rp 57.814.193.793,02	Rp 57.814.193.793,02
Jumlah		Rp147.779.494.793,02	Rp 147.779.494.793,02

▪ Bangun, Serah, Kelola (BSK)	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp4.969.192.500,00	Rp4.969.192.500,00

Bangun, Serah, Kelola (BSK) per 31 Desember 2014 sebesar Rp4.969.192.500,00 merupakan tanah Pemkot Surabaya yang disertakan dalam kerjasama pembangunan Rumah Susun di Lokasi Warugunung Kecamatan Karangpilang, sesuai perjanjian dengan Perum Perumnas Nomor 648.21.1412.1/402.601/97 dan Nomor Dirut/507/22/V/97 tanggal 9 Mei 1997 dan berakhir sampai dengan Pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan pengembalian investasi tersebut. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Bangunan merupakan milik Perum Perumnas sampai dengan Pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan pengembalian investasi tersebut. Pengembalian biaya investasi yang telah dibayar Pemerintah Kota Surabaya kepada Perum Perumnas hingga Desember 2014 sebesar Rp1.298.340.952,00.

oo

▪ Kerjasama Operasi (KSO)	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp33.363.395.000,00	Rp33.363.395.000,00

Kerjasama Operasi (KSO) per 31 Desember 2014 sebesar Rp33.363.395.000,00 merupakan Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah (Incenerator), perjanjian dengan PT.Unicomindo Perdana Nomor 658.1/11/402.1.02/ 1989 tanggal 26 Juli 1989 yang berlaku selama 9 tahun, sebagaimana telah diadendum dengan kontrak Nomor 658.1/11/402.1.01/1989 tanggal 16 Nopember 1989 yang berlaku selama 8 tahun. Saat ini Incenerator tersebut dalam kondisi rusak dan sudah tidak difungsikan serta belum ada penyelesaian pembayaran selisih kurs, angsuran pokok serta beban biaya operasional dan pemeliharaan antara PT.Unicomindo dengan Pemerintah Kota Surabaya.

c. Aset Tak Berwujud	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp6.174.598.510,87	Rp5.981.739.200,87

Aset Tak Berwujud senilai Rp6.174.598.510,87 dan Rp5.981.739.200,87 merupakan nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2014 dan 2013 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aset Tak Berwujud	2014	2013
1.	Perangkat Lunak/software	Rp 5.515.888.942,47	Rp 5.223.894.802,47
2.	Hak Cipta/Paten/Lisensi	Rp 658.709.568,40	Rp 757.844.398,40
Jumlah Aset Tak Berwujud		Rp 6.174.598.510,87	Rp 5.981.739.200,87

Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah

Mutasi Aset Tak Berwujud tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2014	Rp 5.981.739.200,87
2	Penambahan Tahun 2014	Rp 987.899.500,00
3	Pengurangan Tahun 2014	Rp (795.040.190,00)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2014	Rp 6.174.598.510,87

Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah

oo

Penambahan Aset Tak Berwujud tahun 2014 sebesar Rp987.899.500,00 (**lampiran 16**) berasal dari:

1. Belanja modal aset tetap lainnya yang bisa diklasifikasikan menjadi aset tetap lainnya sebesar Rp822.910.000,00.
2. Belanja modal selain Aset Tak Berwujud setelah proses verifikasi antara Bendahara barang SKPD dengan Bagian Perlengkapan yang bisa menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp142.175.000,00.
3. Penambahan Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari reklasifikasi sebesar Rp22.814.500,00;

Pengurangan Aset Tak Berwujud tahun 2014 sebesar Rp795.040.190,00 berasal dari pengurangan Aset Tidak Berwujud yang diperoleh dari reklasifikasi sebesar Rp795.040.190,00.

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
d. Aset Lain-lain	Rp113.540.014.780,78	Rp1.129.013.717.564,71

Aset lain – lain per 31 Desember 2014 dan 2013 mempunyai saldo sebesar Rp113.540.014.780,78 dan Rp1.129.013.717.564,71 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Aset Lain-Lain	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1.	Piutang Banpol Bakesbang Linmas	Rp 660.000.000,00	Rp 660.000.000,00
2.	Inventaris yang akan dihapus ó Bagian Perlengkapan	Rp 82.790.666.835,78	Rp 1.098.264.369.619,71
3.	Pembayaran dana bergulir ó Dinas Koperasi	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
4.	Penyertaan Modal PDAM	Rp 30.085.347.945,00	Rp 30.085.347.945,00
Jumlah Aset Lain-lain		Rp 113.540.014.780,78	Rp1.129.013.717.564,71

- Aset lain-lain berupa piutang Banpol dari Bakesbang Linmas sebesar Rp645.000.000,00 yang disita dan menjadi barang bukti di Kejaksaan Negeri Surabaya sesuai surat No.24/O.5.10.4/Fd.1/05/2007 tanggal 9 Mei 2007 sebesar Rp445.000.000,00 dan dua penyetoran tanggal 10 Juli 2007 dengan total sebesar Rp200.000.000,00. Dan berdasar hasil konfirmasi BPK RI ke Kejaksaan Negeri

oo

Surabaya, terdapat pengembalian yang disetor langsung ke Kejaksaan Negeri Surabaya sebesar Rp15.000.000,00.

- Inventaris yang akan dihapuskan sebesar Rp82.790.666.835,78 berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya serta aset tidak berwujud dari seluruh SKPD.
- Saldo sebesar Rp4.000.000,00 dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan pembayaran bantuan modal dana bergulir yang salah masuk rekening Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur.
- Aset lain-lain sebesar Rp30.085.347.945,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Pemerintah Kota Surabaya untuk penyertaan modal kepada PDAM, tetapi karena Perda untuk penyertaan modal masih dalam proses penyusunan maka dicatat dalam Aset Lainnya.

Per 31 Desember 2014 terjadi penurunan nilai aset lain-lain - aset lain-lain dibandingkan nilai per 31 Desember 2013, hal tersebut disebabkan adanya aset tetap yang telah dilakukan penghapusan dan koreksi hapus karena pencatatan ganda.

II. KEWAJIBAN	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp105.182.299.203,34	Rp100.412.621.185,86

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek (Kewajiban lancar) dan Kewajiban jangka panjang .

Kewajiban tahun 2014 sebesar Rp105.182.299.203,34 dan tahun 2013 sebesar Rp100.412.621.185,86 mengalami kenaikan sebesar 4,75%.

Pemerintah Kota Surabaya Per 31 Desember 2014 mempunyai kewajiban sebesar Rp105.182.299.203,34.

oo

A. KEWAJIBAN	31 Desember 2014	31 Desember 2013
JANGKA		
PENDEK	Rp105.182.299.203,34	Rp100.412.621.185,86

Kewajiban jangka pendek secara komparatif rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	Rp 33.360.515.521,76	Rp 36.371.110.733,76
2.	Utang Bunga	Rp -	Rp -
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp -	Rp -
4.	Pendapatan diterima di muka	Rp 6.784.388.303,92	Rp -
5.	Utang Jangka Pendek lainnya	Rp 65.037.395.377,56	Rp 64.041.510.452,10
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 105.182.299.203,24	Rp 100.412.621.185,86

1. Utang	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Perhitungan Pihak		
Ketiga (PFK)	Rp33.360.515.521,76	Rp36.371.110.733,76

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tersebut di atas dirinci sebagai berikut:

No.	Utang PFK	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1.	Titipan Pihak Ketiga	Rp 33.360.515.521,76	Rp 36.371.110.733,76
Jumlah Utang PFK		Rp 33.360.515.521,76	Rp 36.371.110.733,76

Titipan Pihak Ketiga di BUD sebesar Rp33.360.515.521,76 terdiri dari :

NO.	Titipan Pihak ketiga	SALDO PER 31 Desember 2014
1	Bongkar reklame	Rp 28.900.394.100,00
2	Rusun Waru Gunung	Rp 4.401.630,00
3	Partisipasi pengelolaan kebun bibit	Rp 160.000.000,00
4	Pelepasan tanah Jalan Kenari	Rp 4.231.318.000,00
5	Pihak Ketiga salah setor	Rp 28.518.000,00
6	PFK Gaji PNSD Tahun 2014	Rp 35.883.791,76
Jumlah Titipan Pihak Ketiga		Rp 33.360.515.521,76

- Bongkar reklame sebesar Rp28.900.394.100,00 merupakan jaminan biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang

oo

perhitungan nilai sewa reklame, tahun 2014 terdapat pemindahbukuan dari titipan bongkar reklame sebesar Rp7.405.526.356,00 sesuai Surat dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan No. 973/0945/436.6.13/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Pengajuan Jaminan Bongkar, ke rekening pendapatan lain lain. Di samping itu berdasar hasil audit BPK RI Tahun 2014 terdapat pengurangan jumlah utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp1.546.135.900,00 karena adanya reklasifikasi dari utang PFK menjadi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- Rusun Waru Gunung sebesar Rp4.401.630,00 merupakan titipan pembayaran penghuni rusun di lokasi Waru Gunung sesuai perjanjian dengan Perum Perumnas No.648.21.1412.1/402.601/97 dan No. Dirut/507/22/V/97 tanggal 9 Mei 1997.
- Partisipasi pengelolaan kebun bibit sebesar Rp160.000.000,00 berdasarkan perjanjian Nomor 593/19/402.1.04/98 tanggal 17 Pebruari 1998 antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Surya Inti Permata. Atas partisipasi pengelolaan kebun bibit terdapat sengketa gugatan perdata yang diajukan oleh PT. Surya Inti Permata sebagai Penggugat melawan Pemerintah Kota Surabaya sebagai Tergugat I dan PT. Floraya Indah Sentosa sebagai Tergugat II, saat ini pada tingkat peninjauan kembali.
- Pelepasan tanah Jalan Kenari Rp4.231.318.000,00 merupakan penyetoran uang titipan atas pelepasan ganti rugi tanah di jalan kenari oleh PT. Sentral Tunjungan Perkasa Surabaya.
- Adanya pihak ketiga yang salah setor ke rekening Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp28.518.000,00.
- PFK Gaji PNSD tahun 2014 yang terdiri dari Iuran Wajib Pegawai, Tapperum, dan ASKES, yang masih belum bisa tersetor ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I sebesar Rp35.883.791,76.

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
2. Pendapatan Diterima di Muka	Rp6.784.388.303,92	Rp0,00

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp6.784.388.303,92 dan Rp0,00 merupakan koreksi atas Pendapatan Sewa Tanah dan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Pengeloalaan Tanah dan Bangunan yang seharusnya baru bisa diakui sebagai pendapatan pada tahun berikutnya sebesar Rp6.784.338.303,92.

oo

Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagai berikut :

No.	Pendapatan Diterima di Muka	SALDO PER 31 Desember 2014	
1	JPO Jalan Wonokromo (Depan Bioskop Surya)	Rp	454.869.414,00
2	JPO Jalan Ahmad Yani (Depan Disperta Jatim)	Rp	511.179.517,00
3	JPO Jalan Prof Dr. Moestopo (Depan FKG Unair)	Rp	416.479.033,00
4	JPO Jalan Basuki Rahmad (Depan Hotel Hyatt)	Rp	534.394.518,00
5	JPO Jalan Wonokromo (Depan Pasar)	Rp	454.869.414,00
6	JPO Jalan Diponegoro (Depan RS. RKZ)	Rp	686.995.697,00
7	JPO Jalan Pemuda (Depan BRI)	Rp	509.240.518,00
8	JPO Jalan Raya Darmo (Depan Sekolah Santa Maria)	Rp	686.995.697,00
9	JPO Jalan Gubernur Suryo (Depan SMUN 6)	Rp	615.251.071,00
10	JPO Jalan Ahmad Yani (Depan SMKN 3)	Rp	617.596.071,00
11	JPO Jalan Stasiun Wonokromo (Depan Stasiun)	Rp	465.572.423,00
12	JPO Jalan Ngagel Jaya Selatan (Depan Ubaya)	Rp	213.627.600,00
13	JPO Jalan Urip Sumoharjo (Depan Hotel Olympic)	Rp	84.274.266,42
14	JPO Jalan Urip Sumoharjo (Depan Kampus Udatin)	Rp	84.274.266,42
15	JPO Jalan Basuki Rahmad (Depan Gedung WBS/SBC)	Rp	71.666.896,00
16	JPO Jalan Basuki Rahmad (Depan Dunkin Donuts)	Rp	90.052.644,50
17	JPO Jalan Basuki Rahmad (Depan ex Apollo/Metro)	Rp	73.092.730,08
18	JPO Jalan Raya Darmo (Depan ex Delby Samping KBS)	Rp	111.356.527,50
19	Sewa bangunan di Jalan Walikota Mustajab No. 84	Rp	102.600.000,00
	Jumlah Titipan Pihak Ketiga	Rp	6.784.388.303,92

	31 Desember 2014	31 Desember 2013
3. Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp65.037.395.377,56	Rp64.041.510.452,10

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp65.037.395.377,56 dan Rp64.041.510.452,10 terdiri dari :

No.	Utang Jangka Pendek Lainnya	2014	2013
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp 28.947.300.999,01	Rp 35.935.259.035,97
2.	Utang Pemerintah Pusat Inpres No 15/1979	Rp 8.707.541,55	Rp 8.707.541,55
3.	Kewajiban utang pokok termijn 15 dan 16 yang belum dibayar sesuai Surat dari PT Unicomindo Nomor : 641/UP/I/2004 tanggal 5 Januari 2004	Rp 3.336.339.500,00	Rp 3.336.339.500,00
4.	Kewajiban akibat beda kurs atas pembayaran termijn 13, 14, 15 dan 16	Rp 15.769.789.528,00	Rp 15.769.789.528,00
5.	Bagi hasil retribusi terminal Purabaya bag Kab Sidoarjo	Rp 3.529.027.410,00	Rp 1.697.149.260,00
6.	Utang pembayaran pengolahan sampah TPA Benowo kepada PT. Sumber Organik . DKP	Rp 13.446.230.399,00	Rp 6.067.911.150,00
7.	Utang biaya prepayment premium atas percepatan pembayaran pinjaman Pemerintah Kota Surabaya.	Rp -	Rp 1.226.354.436,58
	Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 65.037.395.377,56	Rp 64.041.510.452,10

oo

- **Utang Kepada Pihak Ketiga** sebesar Rp28.947.300.999,01 merupakan utang yang timbul sebagai akibat adanya belanja dengan pihak ketiga yang sampai dengan 31 Desember 2014 belum dibayar oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Mutasi Utang Kepada Pihak Ketiga selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Mutasi Utang Pihak Ketiga	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2014	Rp 35.935.259.035,97
2	Penambahan Tahun 2014	Rp 108.203.531.025,95
3	Pengurangan Tahun 2014	Rp (115.191.489.062,91)
4	Saldo Akhir per 31 Desember 2014	Rp 28.947.300.999,01

Utang kepada Pihak Ketiga tersebut terdiri dari :

No.	Utang Pihak Ketiga	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	Utang Belanja atas pekerjaan yang belum diselesaikan pembayarannya (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	Rp 2.776.909.336,00	Rp 3.917.347.930,00
2	Utang pembelian obat dan alat kesehatan (RSUD dr Soewandhie)	Rp 6.390.380.369,00	Rp 1.198.121.581,00
3	Utang pelayanan jamkesmas dan askes (RSUD dr Soewandhie)	Rp 7.265.278.180,00	Rp 4.955.128.945,97
4	Utang klaim jamkesmas non kuota (Dinas Kesehatan)	Rp 3.281.085.304,01	Rp 24.781.547.700,00
5	Utang klaim jamkesda propinsi (Dinas Kesehatan)	Rp 346.108.519,00	Rp 1.083.112.879,00
6	Utang jasa pelayanan Non Kapitasi Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Rp 259.683.500,00	Rp -
7	Utang Dana Kapitasi JKN Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Rp 3.653.994.200,00	Rp -
8	Utang kekurangan bayar pada pihak ketiga (Bina Marga)	Rp 204.067.950,00	Rp -
9	Utang Jasa Pelayanan JKN (BDH)	Rp 4.769.793.641,00	Rp -
Jumlah Utang Pihak Ketiga		Rp 28.947.300.999,01	Rp 35.935.259.035,97

oo

Mutasi Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No.	Utang Pihak Ketiga	Saldo Awal 01/01/2014	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31/12/2014
1.	Utang Belanja atas pekerjaan yang belum diselesaikan (Cipta Karya)	3.917.347.930,00	1.600.761.185,00	2.741.199.779,00	2.776.909.336,00
2.	Utang pembelian obat dan alat kesehatan (RSUD dr Soewandhie)	1.198.121.581,00	44.191.938.901,00	38.999.680.113,00	6.390.380.369,00
3.	Utang pelayanan jamkesmas dan askes (RSUD dr Soewandhie)	4.955.128.945,97	39.359.390.082,94	37.049.240.848,91	7.265.278.180,00
4.	Utang klaim jamkesmas non kuota (Dinas Kesehatan)	24.781.547.700,00	3.281.085.304,01	24.781.547.700,00	3.281.085.304,01
5.	Utang klaim jamkesda propinsi (Dinas Kesehatan)	1.083.112.879,00	346.108.519,00	1.083.112.879,00	346.108.519,00
6.	Utang jasa pelayanan Non Kapitasi Puskesmas	0,00	259.683.500,00	0,00	259.683.500,00
7.	Utang belanja Dana Kapitasi JKN Puskesmas (Dinkes)	0,00	3.653.994.200,00	0,00	3.653.994.200,00
8.	Utang kurang bayar ke pihak ketiga (Bina Marga)	0,00	204.067.950,00	0,00	204.067.950,00
9.	Utang Jasa Pelayanan Okt-Des 2014 (BDH)	0,00	4.769.793.641,00	0,00	4.769.793.641,00
Jumlah Utang Pihak Ketiga		35.935.259.035,97	97.666.823.282,95	104.654.781.319,91	28.947.300.999,01

Utang Kepada Pihak Ketiga selama tahun 2014 sebesar Rp28.947.300.999,01, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Utang belanja atas pekerjaan yang belum diselesaikan pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp2.776.909.336,00 terdiri atas :

No	Utang Belanja atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan	Jumlah
1	PT. Daya Guna Permata	Rp 143.386.035,00
2	PT. Rukun Jaya Madura Group	Rp 147.980.587,00
3	PT. Rukun Jaya Madura Group	Rp 187.473.089,00
4	CV. Endah Elok Energi	Rp 78.667.680,00
5	PT. Royan Jaya	Rp 177.563.153,00
6	PT. Surya Unggul Nusa Cons	Rp 25.261.827,00
7	PT. Surya Unggul Nusa Cons	Rp 16.669.651,00
8	CV. Dinamika Raya	Rp 49.644.705,00
9	CV. Dinamika Raya	Rp 34.589.500,00
10	PT. Delta Buana	Rp 49.633.100,00
11	PT. Mitra Karya Mandiri Jaya	Rp 265.278.824,00
12	CV. Azkhindo	Rp 49.830.000,00
13	CV. Bintari Jaya Konsultan	Rp 25.850.000,00
14	PT. Handaru Adhiputra	Rp 799.274.640,00
15	PT. Satya Kencana Karya	Rp 329.860.896,00
16	PT. Gorga Marga Mandiri	Rp 395.945.649,00
Jumlah Utang Belanja atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan		Rp 2.776.909.336,00

oo

- b. Utang pembelian obat dan alat kesehatan sebesar Rp6.390.380.369,00 merupakan utang yang timbul sebagai akibat adanya belanja dengan pihak ketiga yang sampai 31 Desember 2014 belum dibayar oleh RSUD dr.M Soewandhie.
- c. Utang pelayanan jamkesmas dan askes RSUD Soewandhie sebesar Rp7.265.278.180,00 sampai 31 Desember 2014 belum dibayar oleh RSUD dr.M Soewandhie.
- d. Utang klaim jamkesmas non kuota Dinas Kesehatan tahun 2014 sebesar Rp3.281.085.304,01 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	RSUD dr. Soetomo	Rp 1.816.191.349,89
2.	BKMM	Rp 4.420.000,00
3.	RSI A Yani	Rp 321.000,00
4.	AI Irsyad	Rp 23.307.200,00
5.	Darus Syifa	Rp 11.310.700,00
6.	RSI Jemursari	Rp 16.938.500,00
7.	RS Mata Undaan	Rp 8.537.200,00
8.	RS Brawijaya	Rp 1.558.600,00
9.	BP 4	Rp 13.390.100,00
10.	Bhakti Rahayu	Rp 34.018.600,00
11.	RS Jiwa Menur	Rp 45.464.500,00
12.	RSU Haji Surabaya	Rp 99.059.800,00
13.	RSUD Soewandhie	Rp 1.175.738.054,12
14.	RSJ Lawang	Rp 361.800,00
15.	RS UNAIR	Rp 30.467.900,00
	Jumlah	Rp 3.281.085.304,01

- e. Utang klaim jamkesda propinsi Dinas Kesehatan selama tahun 2014 sebesar Rp346.108.519,00, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	RSUD dr. Soetomo	Rp 197.541.303,00
2.	BKMM	Rp 310.800,00
3.	RSJ Menur	Rp 44.908.500,00
4.	RSU Haji	Rp 14.971.100,00
5.	BP4	Rp 3.722.013,00
6.	RSUD Soewandhie	Rp 81.233.303,00
7.	RS Kusta Sumber Glagah	Rp 3.421.500,00
	Jumlah	Rp 346.108.519,00

- f. Utang jasa pelayanan Non Kapitasi Puskesmas untuk Tribulan III dan IV tahun 2014 sebesar Rp259.683.500,00.

oo

- g. Utang belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas bulan Desember 2014 untuk belanja Jasa Pelayanan sebesar Rp3.653.994.200,00.
 - h. Utang kurang bayar kepada pihak ketiga yaitu CV Muhana Manna sebesar Rp204.067.950,00, yang belum terselesaikan sampai dengan 31 Desember 2014.
 - i. Utang Jasa Pelayanan RSUD Bhakti Dharma Husada bulan Oktober-Desember 2014 yang belum terselesaikan sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp4.769.793.641,00
- **Utang Pemerintah Pusat** sesuai Inpres No.15/1979 sebesar Rp8.707.541,55 merupakan utang yang digunakan untuk membangun Pasar Blauran.
 - **Utang Belanja Kepada PT Unicomindo Perdana** sebesar Rp3.336.339.500,00 merupakan kewajiban utang pokok termijn 15 dan 16 yang belum dibayar sesuai Surat dari PT Unicomindo Nomor : 641/UP/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 perihal Laporan Posisi Kewajiban Pemerintah Kota Surabaya dan Perkembangan Keadaan Pabrik Pembakaran Sampah di Sukolilo Surabaya.

Hutang ini timbul sebagai akibat adanya Perjanjian/Kontrak antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. UNICOMINDO PERDANA Nomor 658.1/11/402.1.02/1989 tanggal 26 Juli 1989 tentang Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen dalam rangka Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah dan telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Surat Keputusan Nomor 658.1-676 tanggal 2 September 1989. Terhadap Kontrak diatas telah diadakan Addendum Nomor 658.1/34/402.01.02/1989 tanggal 16 Nopember 1989 jo 658.1/14/402.1.02/94 tanggal 7 Maret 1994.

Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 81/Pdt.6/2011 Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2011 mewajibkan Pemerintah Kota Surabaya untuk membayar kerugian yang diminta oleh PT. UNICOMINDO PERDANA atas kerugian materiil sebesar Rp4.137.060.980,00, dengan rincian Pembayaran termin 15 dan 16 sebesar Rp3.336.339.500,00 dan beban bunga (moratorium) sebesar 6% per tahun atas keterlambatan pemenuhan setoran hasil usaha ke 15 dan 16 sebesar Rp800.721.480,00. Atas putusan PN Surabaya tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan banding, dan sampai dengan

oo

tanggal 6 Mei 2012 belum ada keputusan hukum yang berlaku tetap (inkrah) atas hal tersebut.

- **Kewajiban akibat beda Kurs** sebesar Rp15.769.789.528,00 dihitung berdasarkan kurs Rp6.250 / US\$ sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 658.1/183/PUMDA tanggal 18 April 2000 tentang kesepakatan mengenai nilai kurs yang digunakan untuk menghitung kewajiban beda kurs atas sisa pembayaran (termijn 13, 14, 15 dan 16) dan Surat dari PT. Unicomindo kepada Pemerintah Kota Surabaya Nomor SP.10.05.01.2000 tanggal 10 Mei 2000, tentang Permohonan Pembayaran Biaya Beda Kurs termijn 13,14, 15 dan 16 Pabrik Pembakaran Sampah di Sukolilo Surabaya.

Pada tanggal 01 November 2011, PT Unicomindo mengajukan gugatan sebesar Rp133.075.549.248,00 (terdiri dari piutang Rp137.212.610.228,00 dikurangi Rp4.137.060.980,00 yang diajukan gugatan dengan Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.SBY) kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas kewajiban yang belum terpenuhi sekaligus dampak kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota Surabaya, terdiri dari Setoran Hasil Usaha (SHU) ke 15 dan 16, serta beda kurs termin SHU ke 13, 14, 15 dan 16. Atas gugatan PT. Unicomindo tersebut, sudah ada putusan sela tanggal 10 April 2012, yang isinya antara lain pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan atas perkara tersebut, karena berdasarkan pertimbangan mejelis hakim penyelesaian melalui panitia arbitrase sebagaimana dalam perjanjian. Sampai dengan tanggal 6 Mei 2012 belum ada kesepakatan dalam bentuk perjanjian lebih lanjut antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Unicomindo untuk pembayaran beda kurs termin 13, 14, 15, 16.

- **Bagi hasil retribusi Terminal Purabaya bagian Kabupaten Sidoarjo** untuk saldo tahun 2014 yang belum terbayar Rp3.529.027.410,00 dengan rincian hutang atas bagi hasil tahun 2013 sebesar Rp1.697.149.260,00 dan tahun 2014 sebesar Rp1.831.878.150,00.

- **Utang Biaya Pengolahan Sampah TPA Benowo** merupakan utang untuk periode 28 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp13.446.230.399,00. Hal ini dikarenakan adanya Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Prasarana dan Sarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo

oo

Nomor 000.0/0000/000.0.0/0000 tanggal 08 Agustus 2012 antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sumber Organik, dimana serah terima obyek kerjasama telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo Nomor 000.0/00000/000.0.0/0000 tanggal 23 Oktober 2012.

- **Utang biaya prepayment premium** atas percepatan pembayaran pinjaman Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp1.226.354.436,58 pada tahun 2014 telah dihapuskan sesuai surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No S-57/MK.05/2015 tanggal 23 Januari 2015 perihal Percepatan Pelunasan Penerusan Pinjaman Nomor SLA-764/DP3/1994.

III. EKUITAS DANA	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp38.500.755.366.136,33	Rp37.350.480.867.071,45

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp38.500.755.366.136,33 dan Rp37.350.480.867.071,45 kenaikan sebesar 3,01% yang terdiri dari :

A. Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp1.610.489.828.588,56	Rp1.298.428.176.375,25

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013. Ekuitas dana lancar terdiri dari :

NO.	Ekuitas Dana Lancar	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1.311.544.540.066,85	977.089.154.745,47
2.	Pendapatan yang Ditangguhkan	108.286.008,00	182.819.245,00
3.	Cadangan Piutang	302.134.000.705,04	314.696.480.257,11
4.	Cadangan Persediaan	68.524.785.490,15	70.501.232.579,77
5.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(71.821.783.681,48)	(64.041.510.452,10)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		1.610.489.828.588,56	1.298.428.176.375,25

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp1.311.544.540.066,85	Rp977.089.154.745,47

oo

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp1.311.544.540.066,85 berasal dari realisasi Pendapatan sebesar Rp6.052.441.118.039,47 dikurangi dengan jumlah realisasi Belanja sebesar Rp5.707.378.466.054,09 ditambah dengan jumlah realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp966.481.888.081,47.

SILPA milik Pemkot Surabaya sebesar Rp1.311.544.540.066,85 terdiri dari:

- a. Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp1.204.902.634.583,00 yang berasal dari rekening kas umum daerah sebesar Rp1.238.263.150.104,76 dikurangi dengan utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp33.360.515.521,76.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran berupa sisa Uang Persediaan sebesar Rp83.538.522,00.
- c. BLUD RSUD dr.M. Soewandhie sebesar Rp92.413.827.517,85.
- d. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Rp14.144.539.444,00

2. Pendapatan Yang Ditangguhkan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp108.286.008,00	Rp182.819.245,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp108.286.008,00 dan Rp182.819.245,00. Pendapatan yang ditangguhkan merupakan lawan Akun dari Kas di Bendahara Penerimaan.

3. Cadangan Piutang	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp302.134.000.705,04	Rp314.696.480.257,11

Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp302.134.000.705,04 dan Rp314.696.480.257,11 merupakan lawan Akun Piutang bersih.

4. Cadangan Persediaan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp68.524.785.490,15	Rp70.501.232.579,77

Jumlah tersebut merupakan saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp68.524.785.490,15 dan Rp70.501.232.579,77 yang merupakan lawan akun Persediaan.

oo

5. Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	(Rp71.821.783.681,48)	(Rp64.041.510.452,10)

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar (Rp71.821.783.681,48) dan (Rp64.041.510.452,10). Jumlah ini merupakan lawan dari kewajiban jangka pendek, kecuali Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

B. EKUITAS DANA INVESTASI	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp36.890.265.537.547,77	Rp36.052.052.690.696,20

Saldo Ekuitas dana investasi tahun 2014 sebesar Rp36.890.265.537.547,77 dan 2013 sebesar Rp36.052.052.690.696,20 mengalami kenaikan sebesar 2,33%.

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dan 2013. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari:

No.	Ekuitas Dana Investasi	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	1,894,028,603,745.46	1,826,649,121,407.40
2.	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	34.690.400.238.417,64	32,904,208,124,230.20
3.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	305,836,695,384.67	1,321,195,445,058.60
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		36.890.265.537.547,77	36.052.052.690.696,20

1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp1.894.028.603.745,46	Rp1.826.649.121.407,40

Jumlah tersebut merupakan saldo Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2014 dan 2013 merupakan lawan akun Investasi jangka panjang. Untuk tahun 2014, Investasi Jangka panjang Non Permanen bersih sebesar Rp0,00 dan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp1.894.028.603.745,46. Sedangkan untuk tahun 2013, Investasi Jangka Panjang Non Permanen bersih sebesar Rp1.725.000,00 dan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp1.826.647.396.407,40.

oo

2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp34.690.400.238.417,64	Rp32.904.208.124.230,20

Jumlah tersebut merupakan saldo Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013, merupakan lawan Akun Aset Tetap yang terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Instalasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan dengan perincian sebagai berikut :

No.	ASET TETAP	2014	2013
1	Tanah	26.475.340.943.248,86	25.927.505.754.851,52
2	Peralatan dan Mesin	1.780.486.966.954,79	1.596.950.573.698,57
3	Gedung dan Bangunan	2.862.272.113.054,18	2.394.705.500.118,86
4	Jalan Jaringan dan Instalasi	3.304.614.532.028,05	2.774.347.096.373,03
5	Aset Tetap Lainnya	71.967.855.601,25	48.740.161.128,84
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	195.717.827.530,51	161.959.038.059,38
Jumlah		34.690.400.238.417,64	32.904.208.124.230,20

3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp305.836.695.384,67	Rp1.321.195.445.058,60

Jumlah tersebut merupakan saldo Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013. Jumlah ini merupakan lawan Akun Aset Lainnya terdiri atas Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Negara, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset tak Berwujud dan Aset lain-lain dengan perincian sebagai berikut :

No.	ASET LAINNYA	2014	2013
1	Tuntutan Ganti Kerugian Negara	9,999,800.00	87,906,000.00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	186,112,082,293.02	186,112,082,293.02
3	Aset Tak Berwujud	6,174,598,510.87	5,981,739,200.87
4	Aset Lain - lain	113,540,014,780.78	1,129,013,717,564.71
Jumlah		305,836,695,384.67	1.321.195.445.058,60

Dengan demikian per 31 Desember 2014 Pemerintah Kota Surabaya mempunyai Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp38.605.937.665.339,57. Jumlah ini merupakan jumlah dari Kewajiban total Rp105.182.299.203,24 dan Ekuitas Dana sebesar Rp38.500.755.366.136,33.

oo

5.2 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

I. PENDAPATAN

Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2014 dan 2013 bahwa sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya PAD dan penerimaan daerah lainnya. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2014 dan 2013 sebesar Rp6.052.441.118.039,47 dan Rp5.235.293.716.914,17 dari target pendapatan tahun 2014 dan 2013 sebesar Rp6.150.194.212.902,80 dan Rp5.255.244.153.444,00 atau terealisasi pada tahun 2014 sebesar 98,41% dan pada tahun 2013 terealisasi sebesar 99,62%. Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana ikhtisar sebagai berikut :

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan 2014

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)			
		Anggaran	Realisasi 2014	Realisasi 2013	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	6.150.194.212.902,80	6.052.441.118.039,47	5.235.293.716.914,17	98,41
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.247.459.154.137,00	3.307.323.863.978,47	2.791.580.050.709,51	101,84
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.471.025.909.302,00	2.427.647.860.148,15	2.154.652.323.797,88	98,24
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	285.197.286.889,00	270.112.725.497,14	229.680.153.171,85	94,71
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.855.713.722,00	120.856.635.210,40	111.967.697.968,77	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	370.380.244.224,00	488.706.643.122,78	295.279.875.771,01	131,95
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.879.105.797.765,80	2.721.487.993.061,00	2.443.713.666.204,66	94,53
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana	1.597.890.575.334,40	1.488.374.891.545,00	1.460.891.497.629,00	93,15
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	317.816.601.094,40	246.211.550.026,00	255.690.446.250,00	77,47
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya	13.002.385.240,00	21.419.313.519,00	15.247.050.379,00	164,73
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.200.889.359.000,00	1.200.889.359.000,00	1.160.025.693.000,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	66.182.230.000,00	19.854.669.000,00	29.928.308.000,00	30,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	448.297.975.000,40	448.340.154.000,00	360.003.798.000,66	100,01
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	448.297.975.000,40	448.340.154.000,00	360.003.798.000,66	100,01
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	832.917.247.431,00	784.772.947.516,00	622.818.370.575,00	94,22
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	823.489.838.067,00	779.576.048.153,00	613.629.385.380,00	94,67
1.2.3.2	Bantuan Keuangan	7.067.090.000,00	2.836.580.000,00	8.238.075.000,00	40,14
1.2.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	2.360.319.364,00	2.360.319.363,00	950.910.195,00	100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	23.629.261.000,00	23.629.261.000,00	0,00	100,00
1.3.7	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	23.629.261.000,00	23.629.261.000,00	0,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN		6.150.194.212.902,80	6.052.441.118.039,47	5.235.293.716.914,17	98,41

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah

oo

Rekapitulasi Pendapatan daerah berdasarkan SKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 dan Tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan 2014 dan 2013 untuk SKPD

No	Nama SKPD	2014			2013		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Kesehatan	53.357.693.138,00	64.347.109.000,00	120,60	21.306.352.371,00	21.450.065.240,00	100,67
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie	98.653.926.460,00	148.212.557.986,16	150,23	76.053.295.812,00	76.633.833.150,89	100,76
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	28.500.000.000,00	32.322.660.338,92	113,41	18.500.000.000,00	15.650.034.736,22	84,59
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	-	-	-	-	-	0,00
5	Dinas Kebakaran	2.039.938.477,00	1.626.853.000,00	79,75	2.030.648.477,00	1.980.031.575,00	97,51
6	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	84.982.696.174,00	51.865.105.818,08	61,03	41.242.862.985,00	41.260.069.866,98	100,04
7	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	119.617.354.360,00	177.558.830.178,00	148,44	89.055.233.115,00	121.899.125.120,00	136,88
8	Dinas Perhubungan	40.000.000.000,00	35.526.512.167,00	88,82	37.111.182.500,00	33.640.704.491,00	90,65
9	Badan Lingkungan Hidup	10.000.000.000,00	15.100.963.697,90	151,01	8.000.000.000,00	9.517.808.488,64	118,97
10	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	67.722.510.000,00	76.600.612.871,58	113,11	35.347.169.454,00	55.357.793.071,20	156,61
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.040.220.000,00	3.896.720.000,00	191,00	4.803.100.000,00	7.344.450.000,00	152,91
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	314.782.500,00	205.554.600,00	65,30	161.422.500,00	1.645.837,00	1,02
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.409.317.619,00	5.290.438.111,00	119,98	3.416.405.640,00	4.051.476.692,00	118,59
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.372.600.000,00	1.612.969.948,00	117,51	1.000.000.000,00	1.000.846.500,00	100,08
15	Bagian Perlengkapan	1.500.000.000,00	1.531.691.200,00	102,11	1.010.800.000,00	1.420.174.050,00	140,50
16	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	5.630.186.987.694,80	5.429.543.161.456,83	96,44	4.911.368.259.088,00	4.839.810.321.372,24	98,54
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	450.008.300,00	465.288.850,00	103,40	256.612.300,00	157.540.150,00	61,39
18	Badan Arsip dan Perpustakaan	7.717.400,00	24.855.600,00	322,07	8.045.100,00	33.491.700,00	416,30
19	Dinas Pertanian	311.472.000,00	312.819.720,00	100,43	233.604.000,00	-	-
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.726.988.780,00	6.396.413.496,00	135,32	4.339.160.102,00	4.030.069.320,00	92,88
21	Bagian Umum dan Protokol	-	-	-	-	54.235.553,00	100,00
J U M L A H		6.150.194.212.902,80	6.052.441.118.039,47	98,41	5.255.244.153.444,00	5.235.293.716.914,17	99,62

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dengan target pada tahun 2014 sebesar Rp3.247.459.154.137,00 dan tahun 2013 sebesar Rp2.657.109.226.595,00 terealisasi sebesar Rp3.307.323.863.978,47 atau 101,84% pada tahun 2014 dan terealisasi sebesar Rp2.791.580.050.709,51 atau 105,06% pada tahun 2013, terdiri dari :

a) Pajak Daerah

Pada tahun 2014 dan tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp2.471.025.909.302,00 dan Rp2.118.292.666.000,00 terealisasi sebesar Rp2.427.647.860.148,15 dan Rp2.154.652.323.797,88 atau sebesar 98,24% dari target tahun 2014 dan sebesar

oo

101,72% dari target tahun 2013. Secara terinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun 2014 dan 2013 bersumber dari:

No.	Pajak	2014	2013
1.	Pajak Hotel	Rp 181.526.872.512,15	Rp 151.418.187.250,00
2.	Pajak Restoran	Rp 242.620.778.756,00	Rp 211.755.737.412,00
3.	Pajak Hiburan	Rp 47.787.724.836,00	Rp 41.979.608.730,88
4.	Pajak Reklame	Rp 124.300.629.650,00	Rp 106.146.474.640,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	Rp 310.032.293.040,00	Rp 260.672.641.280,00
6.	Pajak Parkir	Rp 47.437.814.976,00	Rp 35.245.703.221,00
7.	Pajak Air Bawah Tanah	Rp 1.329.605.206,00	Rp 1.296.286.760,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 683.018.418.610,00	Rp 606.061.761.816,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp 789.593.722.562,00	Rp 740.075.922.688,00
Jumlah		Rp 2.427.647.860.148,15	Rp 2.154.652.323.797,88

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Pajak Daerah	2014	2013
Pajak Hotel			
1	Hotel Bintang Lima	Rp 71.064.333.828,15	Rp 66.663.085.800,00
2	Hotel Bintang Empat	Rp 46.506.333.969,00	Rp 37.487.552.188,00
3	Hotel Bintang Tiga	Rp 31.216.650.240,00	Rp 21.468.532.083,00
4	Hotel Bintang Dua	Rp 4.834.477.093,00	Rp 3.190.194.755,00
5	Hotel Bintang Satu	Rp 1.020.282.510,00	Rp 1.261.482.597,00
6	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	Rp 895.065.877,00	Rp 685.842.471,00
7	Hotel Non Bintang	Rp 25.989.728.995,00	Rp 20.661.497.356,00
Jumlah		Rp 181.526.872.512,15	151.418.187.250,00
Pajak Restoran			
1	Restoran	Rp 224.043.162.255,00	Rp 197.262.408.665,00
2	Katering	Rp 18.577.616.501,00	Rp 14.493.328.747,00
Jumlah		242.620.778.756,00	211.755.737.412,00
Pajak Hiburan			
1	Tontonan Film / Bioskop	Rp 20.024.408.106,00	Rp 20.624.103.500,00
2	Hiburan Non Bioskop	Rp 25.839.056.630,00	Rp 19.530.498.155,88
3	Hiburan Insidentil	Rp 1.924.260.100,00	Rp 1.825.007.075,00
Jumlah		47.787.724.836,00	41.979.608.730,88
Pajak Reklame			
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	Rp 110.010.205.850,00	Rp 92.727.479.465,00
2	Reklame Insidentil	Rp 14.290.423.800,00	Rp 13.418.995.175,00
Jumlah Pajak Reklame		124.300.629.650,00	106.146.474.640,00
Pajak Penerangan Jalan			
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	Rp 309.617.414.098,00	Rp 260.253.065.885,00
2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Rp 414.878.942,00	Rp 419.575.395,00
Jumlah		Rp 310.032.293.040,00	Rp 260.672.641.280,00
Pajak Parkir			
1	Pajak Parkir	Rp 47.437.814.976,00	Rp 35.245.703.221,00
Jumlah Pajak Parkir		Rp 47.437.814.976,00	Rp 35.245.703.221,00
Pajak Air Tanah			
1	Pajak Air Tanah	Rp 1.329.605.206,00	Rp 1.296.286.760,00
Jumlah Air Tanah		Rp 1.329.605.206,00	Rp 1.296.286.760,00
Pajak Bumi Bangunan			
1	Pajak Bumi Bangunan	Rp 683.018.418.610,00	Rp 606.061.761.816,00
Jumlah Pajak Bumi Bangunan		Rp 683.018.418.610,00	Rp 606.061.761.816,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp 789.593.722.562,00	Rp 740.075.922.688,00
Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		Rp 789.593.722.562,00	Rp 740.075.922.688,00
Jumlah Pajak Daerah		Rp 2.427.647.860.148,15	Rp 2.154.652.323.797,88

oo

b) Retribusi Daerah

Pada tahun 2014 dan tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp285.197.286.889,00 dan Rp235.196.801.853,00, terealisasi sebesar Rp270.112.725.497,14 dan Rp229.680.153.171,85 atau terealisasi sebesar 94,71% dari target tahun 2014 dan sebesar 97,65% dari target tahun 2013. Untuk Pendapatan Retribusi tersebut dapat dirinci secara kelompok sebagai berikut :

No.	Retribusi Daerah	2014	2013
1.	Reribusi Jasa Umum	Rp 90.873.013.853,68	Rp 92.211.812.869,48
2.	Retribusi Jasa Usaha	Rp 50.208.811.470,46	Rp 45.398.093.912,37
3.	Retribusi Perijinan Tertentu	Rp 129.030.900.173,00	Rp 92.070.246.390,00
Jumlah Retribusi Daerah		Rp 270.112.725.497,14	Rp 229.680.153.171,85

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Retribusi Daerah	2014	2013
Retribusi Jasa Umum			
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 11.682.105.000,00	Rp 16.904.118.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Rp 31.190.428.808,00	Rp 28.020.846.498,00
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	Rp 21.520.000,00	Rp 1.183.550.000,00
4	Reribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Rp 2.601.800.000,00	Rp 2.157.550.000,00
5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp 12.918.649.000,00	Rp 11.805.883.000,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 12.530.833.400,00	Rp 12.592.003.600,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Rp 1.609.513.000,00	Rp 1.980.031.575,00
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Rp 1.054.363.746,00	Rp 1.081.068.884,00
9	Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	Rp 10.402.098.553,68	Rp 12.299.151.342,48
10	Retribusi Penyedotan Kaskus	Rp -	Rp -
11	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp 6.396.413.496,00	Rp 4.030.069.320,00
12	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	Rp 465.288.850,00	Rp 157.540.150,00
Jumlah Retribusi Jasa Umum		Rp 90.873.013.853,68	Rp 92.211.812.869,48
Retribusi Jasa Usaha			
1	Retribusi Terminal	Rp 7.555.744.567,00	Rp 6.945.690.931,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp 1.740.996.000,00	Rp 1.486.293.000,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Rp 4.711.795.111,00	Rp 3.784.466.692,00
4	Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya	Rp 33.891.334.014,96	Rp 31.597.842.937,43
5	Pemakaian Rumah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya	Rp 701.172.717,50	Rp 629.289.351,94
6	Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI	Rp 227.643.000,00	Rp 172.010.000,00
7	Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya	Rp 55.475.000,00	Rp 64.970.000,00
8	Pemakaian Gedung Serba Guna	Rp 790.316.500,00	Rp 717.531.000,00
9	Retribusi Pemakaian Gedung Diklat	Rp 17.340.000,00	Rp -
10	Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi	Rp 204.810.000,00	Rp -
11	Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Pertanian	Rp 312.184.560,00	Rp -
Jumlah Retribusi Jasa Usaha		Rp 50.208.811.470,46	Rp 45.398.093.912,37
Retribusi Perizinan Tertentu			
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Rp 113.182.577.085,00	Rp 81.749.793.102,00
2	Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	Rp 15.068.033.888,00	Rp 9.509.619.328,00
3	Retribusi Izin Trayek	Rp 780.289.200,00	Rp 810.833.960,00
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu		Rp 129.030.900.173,00	Rp 92.070.246.390,00
Jumlah Retribusi Daerah		Rp 270.112.725.497,14	Rp 229.680.153.171,85

oo

c) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Pada tahun 2014 dan tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp120.855.713.722,00 dan Rp111.966.678.336,00, terealisasi sebesar Rp120.856.635.210,40 dan Rp111.967.697.968,77 atau sebesar 100% dari target tahun 2014 dan sebesar 100% dari target tahun 2013. Rincian pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai berikut :

No.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	2014	2013
1.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	Rp 113.645.201.541,40	Rp 104.829.908.232,14
2.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)	Rp 6.889.841.701,00	Rp 6.816.890.459,63
3.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	Rp 321.591.968,00	Rp 320.899.277,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan		Rp 120.856.635.210,40	Rp 111.967.697.968,77

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	2014	2013
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD			
1	Bagian Laba PDAM	Rp 97.811.566.113,00	Rp 89.421.585.052,00
2	Bagian laba PD Pasar Surya	Rp 2.041.117.370,00	Rp 1.756.068.839,00
3	Bagian Laba PD Rumah Potong Hew an	Rp -	Rp 300.801.187,00
4	Bagian Laba PT.Bank Jatim	Rp 12.964.476.788,77	Rp 12.686.734.981,18
5	Bagian Laba PT. BPR Jatim	Rp 14.792.000,00	Rp 13.862.000,00
6	Bagian laba PT. Surya Artha Utama	Rp 813.249.269,63	Rp 650.856.172,96
Jumlah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD		Rp 113.645.201.541,40	Rp 104.829.908.232,14
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah / BUMN			
1	Bagian laba PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	Rp 6.889.841.701,00	Rp 6.816.890.459,63
Jumlah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah / BUMN		Rp 6.889.841.701,00	Rp 6.816.890.459,63
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta			
1	Bagian Laba PT. STAR / Taman Remaja Surabaya	Rp 321.591.968,00	Rp 320.899.277,00
Jumlah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta		Rp 321.591.968,00	Rp 320.899.277,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan		Rp 120.856.635.210,40	Rp 111.967.697.968,77

d) **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Pada tahun 2014 dan tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp370.380.244.224,00 dan Rp191.653.080.406,00 terealisasi sebesar Rp488.706.643.122,78 dan Rp295.279.875.771,01 atau sebesar 131,95% dari target tahun 2014 dan sebesar

oo

154,07% dari target tahun 2013, dapat dirinci lebih lanjut atas penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagai berikut :

No.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2014	2013
1.	Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	Rp 1.485.035.000,00	Rp 1.349.316.050,00
2.	Penerimaan Jasa Giro (Bank Jatim)	Rp 17.713.822.648,93	Rp 14.832.492.134,93
3.	Bunga Deposito	Rp 76.938.219.209,64	Rp 57.579.864.797,57
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Bag.Perengkapan)	Rp 46.656.200,00	Rp 70.858.000,00
5.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp 5.605.439.606,00	Rp 5.513.026.332,46
6.	Pendapatan Denda Pajak	Rp 90.000.000,00	Rp 202.500.000,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi	Rp 2.830.804.249,52	Rp 2.668.548.377,25
8.	Hasil Eksekusi Atas Jaminan	Rp 1.873.407.200,00	Rp 6.015.350.050,09
9.	Pendapatan dari Pengembalian (Lampiran 17)	Rp 521.016.478,00	Rp 607.628.352,00
10.	Pendapatan lain-lain	Rp 159.126.611.382,29	Rp 129.806.458.525,82
11.	Pendapatan BLUD-RSUD Dr. Soew andhie	Rp 148.212.557.986,16	Rp 76.633.833.150,89
12.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	Rp 74.263.073.162,24	Rp -
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		Rp 488.706.643.122,78	Rp 295.279.875.771,01

Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2014	2013
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan			
1	Pelepasan Hak atas Tanah	Rp -	Rp -
2	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	Rp 1.485.035.000,00	Rp 1.349.316.050,00
Jumlah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		Rp 1.485.035.000,00	Rp 1.349.316.050,00
Penerimaan jasa Giro			
1	Jasa Giro Kas Daerah	Rp 16.284.098.636,78	Rp 13.354.363.582,50
2	Jasa Giro Pemegang kas	Rp 1.219.148.531,95	Rp 1.172.382.154,51
4	Jasa Giro BOPDA	Rp 210.575.480,20	Rp 305.746.397,92
Jumlah Penerimaan Jasa Giro		Rp 17.713.822.648,93	Rp 14.832.492.134,93
Pendapatan Bunga Deposito			
1	Rekening Deposito pada Bank Jatim	Rp 16.598.972.602,58	Rp 11.338.356.164,29
2	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	Rp 18.581.506.849,23	Rp 8.157.762.244,34
3	Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara	Rp 16.538.904.109,83	Rp 16.510.458.610,94
4	Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia	Rp 7.646.575.373,00	Rp 13.264.383.667,00
5	Rekening Deposito pada Bank Negara Indonesia	Rp 17.572.260.275,00	Rp 8.308.904.111,00
Jumlah Pendapatan Bunga Deposito		Rp 76.938.219.209,64	Rp 57.579.864.797,57
Tuntutan ganti Kerugian Daerah			
1	Kerugian Barang Daerah	Rp 46.656.200,00	Rp 70.858.000,00
Jumlah Tuntutan ganti Kerugian Daerah		Rp 46.656.200,00	Rp 70.858.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			
1	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pendidikan	Rp 732.617.776,00	Rp 1.441.275,00
2	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kesehatan	Rp 124.720.708,00	Rp 316.472.553,00
3	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum	Rp 1.674.743.600,00	Rp 1.226.881.560,00
4	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat	Rp 28.053.942,00	Rp 65.688.890,00
5	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Penataan Ruang	Rp 1.946.795.147,00	Rp 1.813.038.660,00
6	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perencanaan Pembangunan	Rp -	Rp -

oo

No.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2014	2013
7	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perhubungan	Rp 517.857.413,00	Rp 358.488.573,00
8	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup	Rp 132.441.015,00	Rp 348.558.695,00
9	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 2.225.997,00	Rp 15.444.275,00
10	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Rp 3.706.560,00	Rp -
11	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Tenaga Kerja	Rp 25.227.378,00	Rp -
12	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Sosial	Rp -	Rp -
13	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp 11.925.660,00	Rp 17.980.900,00
14	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Penanaman Modal	Rp 595.270,00	Rp -
15	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pemuda dan Olah Raga	Rp 212.744.887,00	Rp 614.975.994,46
16	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Rp -	Rp 7.811.211,00
17	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pemerintahan Umum	Rp 14.683.584,00	Rp 526.350,00
18	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Komunikasi dan Informatika	Rp 82.406.019,00	Rp 17.236.681,00
19	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 5.858.180,00	Rp 1.093.010,00
20	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Pertanian	Rp -	Rp -
21	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Rp -	Rp 701.101,00
22	Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kehutanan	Rp -	Rp 6.000.000,00
23	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perdagangan	Rp 16.553.920,00	Rp 691.704,00
24	Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Perlengkapan	Rp 72.282.550,00	Rp -
25	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Bidang Kebakaran	Rp -	Rp 699.994.900,00
Jumlah		Rp 5.605.439.606,00	Rp 5.513.026.332,46
Pendapatan Denda Pajak			
1	Pendapatan BPHTB	Rp 90.000.000,00	Rp 202.500.000,00
Jumlah		Rp 90.000.000,00	Rp 202.500.000,00
Pendapatan Denda Retribusi			
1	Denda Retribusi Jasa Umum	Rp 5.699.700,00	Rp 2.346.300,00
2	Denda Retribusi Jasa Usaha	Rp 2.449.882.461,62	Rp -
3	Denda Retribusi Perizinan Tertentu	Rp 375.222.087,90	Rp 112.143.530,64
Jumlah		Rp 2.830.804.249,52	Rp 114.489.830,64
Pendapatan Hasil eksekusi atas Jaminan			
1	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	Rp 1.873.407.200,00	Rp 6.015.350.050,09
Jumlah		Rp 1.873.407.200,00	Rp 6.015.350.050,09
Pendapatan dari Pengembalian			
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp 521.016.478,00	Rp 607.628.352,00
Jumlah		Rp 521.016.478,00	Rp 607.628.352,00
Penerimaan Lain-Lain			
1	Penerimaan Gedung Wanita Chandra Kencana	Rp 238.475.000,00	Rp 229.325.000,00
2	Pendapatan Lain-Lain	Rp 14.573.484.003,21	Rp 3.248.916.077,30
3	Rumah Peristirahatan	Rp 900.000,00	Rp 800.000,00
4	Penyetoran atas Temuan Hasil Pemeriksaan	Rp 639.169.380,50	Rp 295.525.780,68

oo

Pendapatan Lain-lain tahun 2014 sebesar Rp159.126.611.382,29, yang sudah diketahui jenis dan klasifikasinya sebesar Rp159.092.368.896,29 (**Lampiran 18**) dan sisanya belum diketahui jenis dan klasifikasinya sebesar Rp34.242.486,00 (**Lampiran 19**).

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berupa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp74.263.073.162,24 terdiri dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan bulan Januari-Juni 2014 yang belum diberikan kepada FKTP sebesar Rp22.288.086.000,00, Dana Kapitasi yang berada di Bendahara FKTP sebesar Rp.30.059.352.000,00 dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional milik RSUD Bhakti Dharma Husada sebesar Rp21.915.635.162,24 berasal dari Pendapatan klaim BPJS.

2. Pendapatan Transfer

Sumber Pendapatan ini berasal dari Transfer Pemerintah Pusat ó Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi. Pada tahun 2014 dan tahun 2013 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp2.879.105.797.765,80 dan Rp2.598.043.013.849,00, terealisasi sebesar Rp2.721.487.993.061,00 dan Rp2.443.713.666.204,66 atau terealisasi sebesar 94,53% dari target tahun 2014 dan sebesar 94,06% dari target tahun 2013.

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Untuk lebih jelasnya Pendapatan dari Dana Perimbangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat

Pada tahun 2014 dan tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp317.816.601.094,40 dan Rp325.840.995.606,00, terealisasi sebesar Rp246.211.550.026,00 dan Rp255.690.446.250,00 atau sebesar 77,47% dari target tahun 2014 dan sebesar 78,47% dari target tahun 2013, yang dapat dirinci lebih lanjut atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut :

No.	Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat	2014	2013
1.	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 19.643.070.339,00	Rp 23.076.346.283,00
2	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25, 29, 21	Rp 189.882.716.690,00	Rp 200.156.562.314,00
3	Cukai Hasil Tembakau	Rp 36.685.762.997,00	Rp 32.457.537.653,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat		Rp 246.211.550.026,00	Rp 255.690.446.250,00

oo

- Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Pada tahun 2014 dan tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp13.002.385.240,00 dan Rp13.002.385.240,00, terealisasi sebesar Rp21.419.313.519,00 dan Rp15.247.050.379,00 atau sebesar 164,73% dari target tahun 2014 dan 117,26% dari target tahun 2013 yang ditetapkan yang bersumber dari :

No.	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	2014	2013
1.	Provisi Sumber Daya Hutan	Rp 323.215.213,00	Rp 308.370.680,00
2.	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi	Rp 42.227.010,00	Rp 12.457.853,00
3.	Pungutan Hasil Perikanan	Rp 383.182.410,00	Rp 347.408.873,00
4.	Pertambangan Minyak Bumi	Rp 18.283.783.314,00	Rp 12.491.505.745,00
5.	Pertambangan Gas Bumi /Gas Alam	Rp 2.374.891.304,00	Rp 2.080.538.678,00
6.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas	Rp 12.014.268,00	Rp 6.768.550,00
Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		Rp 21.419.313.519,00	Rp 15.247.050.379,00

- Dana Alokasi Umum

Pada tahun 2014 dan tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp1.200.889.359.000,00 dan Rp1.160.025.693.000,00 terealisasi sebesar Rp1.200.889.359.000,00 dan Rp1.160.025.693.000,00 atau sebesar 100% dari target tahun 2014 dan sebesar 100% dari target tahun 2013.

- Dana Alokasi Khusus

Pada tahun 2014 dan tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp66.182.230.000,00 dan Rp68.180.790.000,00, terealisasi sebesar Rp19.854.669.000,00 dan Rp29.928.308.000,00 atau sebesar 30% dari target tahun 2014 dan 43,90% dari target tahun 2013.

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

- Dana Penyesuaian

Pada tahun 2014 dan tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp448.297.975.000,40 dan Rp359.911.885.000,00, terealisasi sebesar Rp448.340.154.000,00, dan Rp360.003.798.000,66, atau sebesar 100,01% dari target tahun 2014 dan 100,03% dari target tahun 2013. Realisasi tahun 2013 terdapat kelebihan sebesar Rp91.913.000,00 yang merupakan reklasifikasi dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut :

oo

No.	Dana Penyesuaian	2014	2013
1.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2013	Rp -	Rp 4.385.500.000,00
2.	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2014	Rp 448.297.975.000,00	Rp 355.526.385.000,66
3.	Dana Penyesuaian DP2D2	Rp 42.179.000,00	Rp 91.913.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian		Rp 448.340.154.000,00	Rp 360.003.798.000,66

c. Transfer Pemerintah Provinsi

- Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi

Pada tahun 2014 dan tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp823.489.838.067,00 dan Rp664.150.585.652,00, terealisasi sebesar Rp779.576.048.153,00 dan Rp613.629.385.380,00 atau sebesar 94,67% dari target tahun 2014 dan 92,39% dari target tahun 2013.

Secara terinci pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Bagi Hasil Pajak Pemerintah Propinsi	2014	2013
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 288.364.715.775,00	Rp 206.097.921.542,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp 282.429.886.309,00	Rp 241.408.766.066,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp 167.547.790.900,00	Rp 164.784.080.833,00
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Rp 1.784.262.977,00	Rp -
5.	Pajak Rokok	Rp 39.393.395.788,00	Rp 1.281.517.625,00
6.	Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)	Rp 55.996.404,00	Rp 57.099.314,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak Pemerintah Propinsi		Rp 779.576.048.153,00	Rp 613.629.385.380,00

- Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi

Untuk pendapatan dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi pada tahun 2014 dan tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp2.360.319.364,00 dan Rp757.294.351,00, terealisasi sebesar Rp2.360.319.363,00 dan Rp950.910.195,00 atau sebesar 100,00% dari target tahun 2014 dan 125,57% dari target tahun 2013, yang terdiri dari pendapatan:

No.	Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi	2014	2013
1.	TERA	Rp -	Rp 950.910.195,00
2.	Bagi Hasil RP3HH	Rp 2.360.319.363,00	Rp -
Jumlah Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi		Rp 2.360.319.363,00	Rp 950.910.195,00

oo

Tabel 5.3
Realisasi Belanja 2014

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Realisasi 2013
		Anggaran	Realisasi 2014	(Rp)	%	
1	2	3	4	6 = (4-3)	7	5
2	BELANJA DAERAH	7.072.715.425.304,00	5.707.378.466.054,09	(1.365.336.959.249,91)	80,70	5.057.279.664.344,95
2.1	Belanja Operasi	5.050.929.597.673,00	4.303.012.040.633,09	(747.917.557.039,91)	85,19	3.770.796.965.236,89
2.1.1	Belanja Pegawai	2.497.792.485.109,00	2.187.887.736.524,00	(309.904.748.585,00)	87,59	2.049.262.468.474,52
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.116.689.109.008,00	1.814.062.371.710,00	(302.626.737.298,00)	85,70	1.466.759.779.177,53
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	432.726.689.556,00	300.184.342.399,09	(132.542.347.156,91)	69,37	253.316.709.084,84
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.651.000.000,00	89.670.000,00	(1.561.330.000,00)	5,43	853.703.500,00
2.1.7	Belanja Bantuan keuangan	2.070.314.000,00	787.920.000,00	(1.282.394.000,00)	38,06	604.305.000,00
2.2	Belanja Modal	2.010.585.827.631,00	1.404.366.425.421,00	(606.219.402.210,00)	69,85	1.281.394.616.149,06
2.2.1	Belanja Tanah	364.481.478.617,00	187.840.393.447,00	(176.641.085.170,00)	51,54	238.158.398.925,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	307.847.050.136,00	280.948.288.646,00	(26.898.761.490,00)	91,26	205.018.395.845,00
2.2.3	Belanja Gedung dan	490.763.424.505,00	408.302.726.466,00	(82.460.698.039,00)	83,20	372.679.990.044,33
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan	832.323.903.854,00	516.795.444.056,00	(315.528.459.798,00)	62,09	464.140.371.614,73
2.2.5	Belanja Aset Tetap lainnya	14.323.983.069,00	9.645.662.806,00	(4.678.320.263,00)	67,34	449.432.800,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya/Aset Tak Berwujud	845.987.450,00	833.910.000,00	(12.077.450,00)	98,57	948.026.920,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	0,00	(10.000.000.000,00)	0,00	0,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	0,00	(10.000.000.000,00)	0,00	0,00
2.4	Transfer	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	0,00	5.088.082.959,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	0,00	5.088.082.959,00

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Pusat / Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2014 dan tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp5.050.929.597.673,00 dan Rp4.192.882.705.877,00 direalisasikan sebesar Rp4.303.012.040.633,09 atau 85,19% dan Rp3.770.796.965.236,89 atau 89,93%.

a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2014 dan tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp2.497.792.485.109,00 dan Rp2.208.822.728.463,00 terealisasi Rp2.187.887.736.524,00 dan Rp2.049.262.468.474,52 atau sebesar 87,59% dari target tahun 2014 dan sebesar 92,78% dari target tahun 2013. Belanja Pegawai yang terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar Rp436.530.395.926,00 dan Rp450.351.680.331,00 terealisasi sebesar Rp344.917.914.825,00 dan Rp364.203.647.705,52 atau sebesar 79,01% dari target tahun 2014 dan sebesar 80,87% dari target tahun 2013. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan dianggarkan sebesar Rp2.061.262.089.183,00 dan Rp1.758.471.048.132,00 direalisasikan sebesar

oo

No.	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	210.739.205.096,00
2.	Belanja Bahan / Material	62.969.134.401,00
3.	Belanja Jasa Kantor	493.967.961.300,00
4.	Belanja Premi Asuransi	237.303.759,00
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.023.589.123,00
6.	Belanja Sewa Rumah / Gedung	9.129.132.207,00
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.907.966.175,00
8.	Belanja Sewa Alat Berat	1.845.039.570,00
9.	Belanja Sewa Perlengkapan	12.515.882.960,00
10.	Belanja Sewa Peralatan Kerja Lapangan	138.110.000,00
11.	Belanja Makan Minum	146.288.706.803,00
12.	Belanja Pakaian dan Atributnya	15.996.794.595,00
13.	Belanja Perjalanan Dinas	41.375.295.488,00
14.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.002.000.000,00
15.	Belanja Kursus/Diklat/Bintek PNS	8.421.923.359,00
16.	Belanja Jasa Konsultansi	26.824.379.925,00
17.	Belanja Pemeliharaan	166.130.688.548,00
18.	Belanja Transport Lokal	65.038.376.750,00
19.	Belanja Rumah Tangga KDH/WKDH	2.489.567.020,00
20.	Belanja Pemberian Hadiah	20.997.506.850,00
21.	Belanja Jasa Operasional Kegiatan	378.479.982.971,00
22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOPDA	112.204.901.654,00
23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kpd Masyarakat	487.004.000,00
24.	Belanja Barang dan Jasa Pelayanan JKN	8.851.919.156,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		1.814.062.371.710,00

Sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa Anggaran dan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat harus dikonversi ke Belanja Hibah. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat dikonversi ke Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebesar Rp54.583.821.994,00 dan Rp28.323.479.778,00. Sehingga Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya sebesar Rp2.171.272.931.002,00 dan Rp1.842.385.851.488,00 menjadi Rp2.116.689.109.008,00 dan Rp1.814.062.371.710,00.

c. Belanja Bunga

Pada tahun 2014 tidak dianggarkan dan ada penghapusan sesuai surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-57/MK.05/2015 tanggal 23 Januari 2015. Pada tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp1.226.354.437,00. Pada tahun 2013 tidak

oo

ada realisasi karena hutang Loan IBRD Nomor 3726 Nomor SLA 764 DP3 1994 telah dilunasi tahun 2012.

d. Belanja Hibah (Lampiran 20)

Pada tahun 2014 dan 2013 dianggarkan sebesar Rp432.726.689.556,00 dan Rp284.910.615.394,00, dan direalisasikan sebesar Rp300.184.342.399,09 atau 69,37% dan Rp253.316.709.084,84 atau 88,91% dari target yang ditetapkan, digunakan untuk :

No.	Belanja Hibah	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Masyarakat	300.184.342.399,09	253.316.709.084,84
Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Hibah		300.184.342.399,09	253.316.709.084,84

Anggaran dan Belanja Barang Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat sesuai dengan Permendagri 39 Tahun 2012 harus dikonversi ke Belanja Hibah, sehingga Anggaran dan Belanja Hibah tahun 2014 yang semula sebesar Rp378.142.867.562,00 dan Rp271.860.862.621,09 menjadi Rp432.726.689.556,00 dan Rp300.184.342.399,09.

e. Belanja Bantuan Sosial (Lampiran 21)

Pada tahun 2014 dan 2013 dianggarkan sebesar Rp1.651.000.000,00 dan Rp1.651.000.000,00 terealisasi sebesar Rp89.670.000,00 atau 5,43% dan Rp853.703.500,00 atau 51,71% dari target yang ditetapkan dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No.	Belanja Bantuan Sosial	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	0,00	791.250.000,00
2.	Bantuan Sosial Kepada individu dan / keluarga dan / atau masyarakat dan/ lembaga non pemerintahan	89.670.000,00	53.953.500,00
3.	Bantuan Sosial Kepada Individu, keluarga dan / atau masyarakat	0,00	8.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		89.670.000,00	853.703.500,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

Pada tahun 2014 dan 2013 dianggarkan sebesar Rp2.070.314.000,00 dan Rp1.900.000.000,00, terealisasi sebesar Rp787.920.000,00 atau sebesar 38,06%, sedangkan Rp604.305.000,00 atau sebesar 31,81% dari target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

oo

No.	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	787.920.000,00	604.305.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		787.920.000,00	604.305.000,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2014 dan 2013 dianggarkan sebesar Rp2.010.585.827.631,00 dan Rp1.747.356.759.354,00 direalisasikan sebesar Rp1.404.366.425.421,00 atau 69,85% dan sebesar Rp1.281.394.616.149,06 atau 73,33% dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tanah

Pada tahun 2014 dan 2013 dianggarkan sebesar Rp364.481.478.617,00 dan Rp309.714.099.809,00 terealisasi sebesar Rp187.840.393.447,00 atau sebesar 51,54% dan Rp238.158.398.925,00 atau sebesar 76,90% dari target yang ditetapkan. Rincian realisasi Belanja Tanah Tahun 2014 sebesar Rp187.840.393.447,00 adalah sebagai berikut :

No.	Belanja Tanah	Jumlah
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Penggunaan Lain	400.726.583,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	13.503.338.900,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	173.936.327.964,00
Jumlah Belanja Tanah		187.840.393.447,00

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Pada tahun 2014 dan 2013 dianggarkan sebesar Rp307.847.050.136,00 dan Rp264.793.778.831,00 terealisasi sebesar Rp280.948.288.646,00 atau sebesar 91,26% dan Rp205.018.395.845,00 atau sebesar 77,43% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2014 sebesar Rp280.948.288.646,00 adalah sebagai berikut:

No.	Belanja Peralatan dan mesin	Jumlah
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat Berat	61.182.652.835,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan	59.588.189.801,00
3.	Belanja Modal Alat Bantu Kerja	4.318.841.250,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian/Pertamanan	518.006.500,00
5.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	80.980.545.208,00
6.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi	9.929.537.186,00
7.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	63.771.517.866,00
8.	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	658.998.000,00
Jumlah Belanja Peralatan dan mesin		280.948.288.646,00

oo

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2014 dan 2013 dianggarkan sebesar Rp490.763.424.505,00 dan Rp502.131.712.829,00 terealisasi sebesar Rp408.302.726.466,00 atau sebesar 83,20% dan Rp372.679.990.044,33 atau sebesar 74,22% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2014 sebesar Rp408.302.726.466,00 adalah sebagai berikut:

No.	Belanja Gedung dan Bangunan	Jumlah
1.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	385.965.917.046,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan Pemakaman	10.786.427.377,00
3.	Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas	11.550.382.043,00
Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan		408.302.726.466,00

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun 2014 dan 2013 dianggarkan sebesar Rp832.323.903.854,00 dan Rp668.911.732.364,00 terealisasi sebesar Rp516.795.444.056,00 atau sebesar 62,09% dan Rp464.140.371.614,73 atau sebesar 69,39% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2014 sebesar Rp516.795.444.056,00 sebagai berikut:

No.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
1.	Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan	218.220.872.623,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	253.074.634.133,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi	3.329.662.076,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	42.170.275.224,00
Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		516.795.444.056,00

e. Belanja Aset Tetap lainnya

Pada tahun 2014 dan 2013 dianggarkan sebesar Rp14.323.983.069,00 dan Rp712.112.145,00 terealisasi sebesar Rp9.645.662.806,00 atau sebesar 67,34% dan Rp449.432.800,00 atau sebesar 63,11% dari target yang ditetapkan. Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2014 sebesar Rp9.645.662.806,00 sebagai berikut :

No.	Belanja Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1.	Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Buku dan Perpustakaan	9.288.100.106,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	357.562.700,00
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya		9.645.662.806,00

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah

oo

f. Belanja Aset Lainnya (Lampiran 22)

Belanja Aset Tak Berwujud pada tahun 2014 dan 2013 dianggarkan sebesar Rp845.987.450,00 dan Rp1.093.323.376,00 terealisasi sebesar Rp833.910.000,00 atau sebesar 98,57% dan Rp948.026.920,00 atau sebesar 86,71%.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2014 dan tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Rp10.000.000.000,00, tidak ada realisasi di tahun 2014 dan 2013.

4. Transfer

Pada Tahun 2014 Transfer dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00 untuk bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tidak ada realisasi. Sedangkan pada Tahun 2013 anggaran Transfer adalah Rp5.088.082.959,00 dengan realisasi sebesar Rp5.088.082.959,0 yang merupakan pelunasan hutang bagi hasil retribusi Terminal Purabaya mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Dalam pengelolaan belanja, Pemerintah Kota Surabaya menekankan tentang penggunaan Belanja Daerah yang harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan. Pada Tahun 2014 dan tahun 2013 untuk belanja daerah dianggarkan sebesar Rp7.072.715.425.304,00 dan Rp5.955.327.548.190,00 dan sedangkan realisasinya sebesar Rp5.707.378.466.054,09 dan Rp5.057.279.664.344,95 per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

oo

Tabel 5.4

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2014 per SKPD

Nomor	Nama SKPD	2014		Bertambah/ (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
1	Dinas Pendidikan	1.720.091.624.196,00	1.469.159.860.326,00	(250.931.763.870,00)	85,41
2	Dinas Kesehatan	564.116.177.647,00	456.026.777.938,00	(108.089.399.709,00)	80,84
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie	185.095.539.707,00	172.063.546.333,00	(13.031.993.374,00)	92,96
4	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada	96.871.491.207,00	83.137.664.732,00	(13.733.826.475,00)	85,82
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan	1.170.772.024.898,00	764.279.256.492,00	(406.492.768.406,00)	65,28
6	Dinas Kebakaran	89.377.074.351,00	85.657.705.334,00	(3.719.369.017,00)	95,84
7	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	245.711.855.534,00	153.312.655.973,00	(92.399.199.561,00)	62,40
8	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	430.366.854.520,00	384.755.583.863,00	(45.611.270.657,00)	89,40
9	Badan Perencanaan Pembangunan	27.554.789.481,00	23.465.169.810,00	(4.089.619.671,00)	85,16
10	Dinas Perhubungan	176.038.498.079,00	138.252.458.867,00	(37.786.039.212,00)	78,54
11	Badan Lingkungan Hidup	22.329.922.068,00	19.518.361.288,00	(2.811.560.780,00)	87,41
12	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	501.070.961.775,00	449.105.265.915,00	(51.965.695.860,00)	89,63
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20.898.936.109,00	17.981.225.950,00	(2.917.710.159,00)	86,04
14	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga	40.925.996.851,00	34.352.987.606,00	(6.573.009.245,00)	83,94
15	Dinas Sosial	139.115.285.019,00	116.584.543.967,00	(22.530.741.052,00)	83,80
16	Dinas Tenaga Kerja	30.883.211.699,00	23.985.090.524,00	(6.898.121.175,00)	77,66
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	30.182.458.630,00	21.039.663.370,00	(9.142.795.260,00)	69,71
18	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal	13.519.464.223,00	11.689.741.712,00	(1.829.722.511,00)	86,47
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	37.162.696.323,00	33.582.606.498,00	(3.580.089.825,00)	90,37
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	84.280.804.425,00	63.286.968.490,00	(20.993.835.935,00)	75,09
21	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	29.439.018.656,00	25.337.190.946,00	(4.101.827.710,00)	86,07
22	Satuan Polisi Pamong Praja	39.872.368.378,00	34.332.563.219,00	(5.539.805.159,00)	86,11
23	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.342.814.090,00	15.110.160.933,00	(1.232.653.157,00)	92,46
24	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.193.356.025,00	2.110.583.556,00	(82.772.469,00)	96,23
25	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	7.107.296.508,00	5.976.264.836,00	(1.131.031.672,00)	84,09
26	Bagian Hukum	8.443.419.486,00	7.434.362.880,00	(1.009.056.606,00)	88,05
27	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	4.154.862.734,00	3.469.767.000,00	(685.095.734,00)	83,51
28	Bagian Kerjasama	17.153.903.464,00	11.149.103.435,00	(6.004.800.029,00)	64,99
29	Bagian Bina Program	11.864.270.026,00	10.143.931.240,00	(1.720.338.786,00)	85,50
30	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	3.319.932.287,00	2.884.282.826,00	(435.649.461,00)	86,88
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3.393.608.868,00	3.020.030.870,00	(373.577.998,00)	88,99

oo

Nomor	Nama SKPD	2013		Bertambah / (Berkurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
36	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	448.229.639.018,00	382.621.202.289,84	(65.608.436.728,16)	85,36
37	Inspektorat	11.577.944.781,00	10.935.855.098,00	(642.089.683,00)	94,45
38	Kecamatan Genteng	10.952.834.610,00	10.083.175.297,00	(869.659.313,00)	92,06
39	Kecamatan Simokerto	10.404.780.386,00	9.264.062.442,00	(1.140.717.944,00)	89,04
40	Kecamatan Tegalsari	10.823.690.272,00	9.622.713.480,00	(1.200.976.792,00)	88,90
41	Kecamatan Bubutan	10.649.166.345,00	10.047.082.590,00	(602.083.755,00)	94,35
42	Kecamatan Kenjeran	8.933.534.106,00	8.055.989.880,00	(877.544.226,00)	90,18
43	Kecamatan Pabean Cantian	9.962.455.861,00	8.692.847.899,00	(1.269.607.962,00)	87,26
44	Kecamatan Semampir	10.593.696.271,00	9.235.070.717,00	(1.358.625.554,00)	87,18
45	Kecamatan Krembangan	10.383.718.649,00	9.620.470.620,00	(763.248.029,00)	92,65
46	Kecamatan Tambaksari	13.193.375.614,00	12.237.251.465,00	(956.124.149,00)	92,75
47	Kecamatan Gubeng	12.389.267.694,00	11.275.211.667,00	(1.114.056.027,00)	91,01
48	Kecamatan Rungkut	10.885.288.719,00	9.838.114.421,00	(1.047.174.298,00)	90,38
49	Kecamatan Gunung Anyar	8.399.571.546,00	7.683.155.425,00	(716.416.121,00)	91,47
50	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	8.725.158.289,00	7.814.248.955,00	(910.909.334,00)	89,56
51	Kecamatan Sukolilo	11.946.515.383,00	10.796.523.274,00	(1.149.992.109,00)	90,37
52	Kecamatan Mulyorejo	10.790.546.542,00	9.209.590.014,00	(1.580.956.528,00)	85,35
53	Kecamatan Wonokromo	13.399.719.442,00	12.221.690.977,00	(1.178.028.465,00)	91,21
54	Kecamatan Karang Pilang	8.765.376.972,00	7.974.155.683,00	(791.221.289,00)	90,97
55	Kecamatan Dukuh Pakis	8.763.131.476,00	7.881.484.214,00	(881.647.262,00)	89,94
56	Kecamatan Gayungan	8.534.576.478,00	7.836.978.227,00	(697.598.251,00)	91,83
57	Kecamatan Jambangan	8.315.668.812,00	7.747.597.441,00	(568.071.371,00)	93,17
58	Kecamatan Wonocolo	9.608.835.147,00	8.673.662.848,00	(935.172.299,00)	90,27
59	Kecamatan Sawahan	13.044.160.133,00	12.175.067.973,00	(869.092.160,00)	93,34
60	Kecamatan Wiyung	7.899.767.121,00	7.183.474.721,00	(716.292.400,00)	90,93
61	Kecamatan Tandes	10.921.217.032,00	9.821.964.035,00	(1.099.252.997,00)	89,93
62	Kecamatan Asemrowo	8.314.030.366,00	7.264.869.691,00	(1.049.160.675,00)	87,38
63	Kecamatan Sukomanunggal	9.511.373.716,00	8.852.157.459,00	(659.216.257,00)	93,07
64	Kecamatan Benowo	8.288.544.938,00	6.902.721.555,00	(1.385.823.383,00)	83,28
65	Kecamatan Lakarsantri	9.883.721.049,00	8.703.149.537,00	(1.180.571.512,00)	88,06
66	Kecamatan Sambikerep	8.210.552.530,00	7.651.200.756,00	(559.351.774,00)	93,19
67	Kecamatan Pakal	9.816.489.717,00	8.726.038.862,00	(1.090.450.855,00)	88,89
68	Kecamatan Bulak	8.590.403.041,00	7.333.466.597,00	(1.256.936.444,00)	85,37
69	Badan Kepegawaian dan Diklat	22.618.774.707,00	19.324.739.399,00	(3.294.035.308,00)	85,44
70	Kantor Ketahanan Pangan	2.889.047.204,00	2.650.630.426,00	(238.416.778,00)	91,75
71	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.846.425.273,00	28.739.607.671,00	(2.106.817.602,00)	93,17
72	Badan Arsip dan Perpustakaan	20.810.838.241,00	20.151.281.447,00	(659.556.794,00)	96,83
73	Dinas Pertanian	28.366.888.656,00	26.692.118.450,00	(1.674.770.206,00)	94,10
74	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	29.473.902.463,00	23.776.118.681,52	(5.697.783.781,48)	80,67
JUMLAH		5.955.327.548.190,00	5.057.279.664.344,95	(898.047.883.845,05)	84,92

Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah

oo

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup Defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran, sedangkan Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Neto tahun anggaran 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp966.481.888.081,47 dan Rp799.075.102.176,25 apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp922.521.212.401,80 dan Rp786.436.485.568,25 terdapat selisih kurang sebesar Rp43.960.675.679,67 dan selisih kurang sebesar Rp12.638.616.608,00. Perangkaan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2014 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut :

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	943.185.351.353,40	977.089.154.745,47	33.903.803.392,07	103,59
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	29.733.336,00	29.733.336,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	943.185.351.353,40	977.118.888.081,47	33.933.536.728,07	103,59
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	20.664.138.951,60	10.637.000.000,00	(10.027.138.951,60)	51,48
	Jumlah Pengeluaran	20.664.138.951,60	10.637.000.000,00	(10.027.138.951,60)	51,48
	Pembiayaan Neto	922.521.212.401,80	966.481.888.081,47	43.960.675.679,67	104,77
3.3	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	1.311.544.540.066,85	1.311.544.540.066,85	-

Sedangkan Perangkaan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2013 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut :

Kode	Uraian	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	805.419.392.938,25	805.419.392.938,25	-	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	104.194.238,00	104.194.238,00	0,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	805.419.392.938,25	805.523.587.176,25	104.194.238,00	100,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	18.972.668.470,00	6.448.485.000,00	(12.524.183.470,00)	33,99
3.2.3	Pembayaran pokok utang	10.238.900,00	0,00	(10.238.900,00)	0,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	18.982.907.370,00	6.448.485.000,00	(12.534.422.370,00)	33,96
	Pembiayaan Neto	786.436.485.568,25	799.075.102.176,25	12.638.616.608,00	101,61
3.3	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)	86.353.090.822,00	977.089.154.745,47	890.736.063.923,47	-

oo

1. **Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2014 dan 2013 dianggarkan sebesar Rp943.185.351.353,40 dan Rp805.419.392.938,25 terealisasi sebesar Rp977.118.888.081,47 dan Rp805.523.587.176,25 atau 103,60% dan 100,01%. Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah.

a. **Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA)**

Pada Tahun 2014 dan Tahun 2013, Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) dianggarkan sebesar Rp943.185.351.353,40 dan Rp805.419.392.938,25 terealisasi sebesar Rp977.089.154.745,47 dan Rp805.419.392.938,25 atau 103,59% dan 100%, berasal dari SiLPA tahun sebelumnya.

b. **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**

Pada Tahun 2014 dan 2013, Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah tidak dianggarkan. Namun terdapat realisasi penerimaan yang berasal dari pengembalian dana bergulir :

- Tahun 2014 sebesar Rp29.733.336,00 dari Dinas Koperasi;
- Tahun 2013 sebesar Rp104.194.238,00 dari Dinas Koperasi.

2. **Pengeluaran Pembiayaan**

Pembiayaan Pengeluaran terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri.

a. **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Pada Tahun 2014 dianggarkan penyertaan modal untuk Kebun Binatang Surabaya, PT. BPR Surya Artha Utama dan PD. Pasar Surya sebesar Rp20.664.138.951,60 dan terealisasi sebesar Rp10.637.000.000,00 atau 51,48% yang terdiri dari penambahan penyertaan modal Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00 dan PT. Surya Artha Utama sebesar Rp637.000.000,00. Pada Tahun 2013 dianggarkan penyertaan modal untuk Kebun Binatang Surabaya, PT. BPR Surya Artha Utama dan PD. Pasar Surya sebesar Rp18.972.668.470,00 dan terealisasi sebesar Rp6.448.485.000,00 atau 33,99% yang terdiri dari penambahan penyertaan modal Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp5.174.485.000,00 dan PT. Surya Artha Utama sebesar Rp1.274.000.000,00.

oo

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2014 dan 2013 sebesar Rp1.311.544.540.066,85 dan Rp977.089.154.745,47 terdiri dari :

No.	Uraian	2014	2013
1	SILPA Pemkot	Rp 1.204.986.173.105,00	Rp 943.185.351.352,78
2	SILPA BLUD RS dr Soewandhie	Rp 92.413.827.517,85	Rp 33.903.803.392,69
3	SILPA Kapitasi	Rp 14.144.539.444,00	Rp -
Jumlah		Rp 1.311.544.540.066,85	Rp 977.089.154.745,47

5.3 PENJELASAN KOMPONEN – KOMPONEN ARUS KAS

A. INFORMASI UMUM

Pengelolaan pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan penyajian laporan keuangan yang handal, tepat waktu dan dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Surabaya harus menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD. Untuk hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya berinisiatif menyusun laporan keuangan dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Surabaya telah meng-implementasikan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (SABK) dan Sistem Administrasi Penatausahaan Anggaran (SAPA) menghasilkan antara lain laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas dan Neraca sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahkan Lembaran Negara Nomor 5165), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana

oo

telah diubah dengan kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.

❖ **Penyajian Laporan Keuangan**

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasikan
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

❖ **Laporan Arus Kas** adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas pada awal dan pada akhir periode akuntansi.

Arus kas disajikan ke dalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran (Perhitungan Pihak Ketiga).

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi.

Arus bersih kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan:

- a. Pendapatan Pajak Daerah
- b. Pendapatan Retribusi Daerah
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- e. Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak
- f. Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
- g. Pendapatan dari Dana Alokasi Umum
- h. Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus
- i. Pendapatan dari Dana Penyesuaian
- j. Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Propinsi

oo

- k. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi
- l. Pendapatan Hibah
- m. Bantuan Keuangan dari Propinsi
- n. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Bunga
- d. Belanja Hibah
- e. Belanja Bantuan Sosial
- f. Belanja Bantuan Keuangan
- g. Belanja Tidak Terduga
- h. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Lainnya

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap yang bertujuan untuk meningkatkan dan menunjang operasi pemerintahan dan menghasilkan potensi pendapatan daerah di masa datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/penjualan aset tetap.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan diperoleh dari pembelian aset tetap atau belanja modal.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas pembiayaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana pembiayaan, yang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari :

- a. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
- b. Pencairan Dana Cadangan
- c. Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan Kembali Pinjaman

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi

oo

- b. Pembentukan Dana Cadangan
- c. Penyertaan Modal (investasi jangka panjang)
- d. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah Lainnya

d. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas keuangan pemerintah yang tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Transaksi non anggaran berasal dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Transaksi Non anggaran meliputi:

1. Arus Masuk Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) yaitu penerimaan kas daerah yang berasal dari potongan pembayaran (SP2D), seperti Pajak penghasilan, potongan Taspen, Askes, Taperum dan potongan untuk pihak ketiga lainnya.

2. Arus Keluar Kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) yaitu pengeluaran kas daerah untuk penyetoran pungutan atau potongan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang berhak.

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

1. Arus Kas dari	<u>Tahun 2014</u>	<u>Tahun 2013</u>
Aktivitas Operasi	Rp1.675.113.033.837,22	Rp1.448.456.264.366,39

Arus Kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2014 dan Tahun 2013 masing-masing surplus sebesar Rp1.675.113.033.837,22 dan Rp1.448.456.264.366,39 Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

oo

No.	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
Arus Masuk Kas:			
1.	Pajak Daerah	2.427.647.860.148,15	2.154.652.323.797,88
2.	Retribusi Daerah	270.112.725.497,14	229.680.153.171,85
3.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	120.856.635.210,40	111.967.697.968,77
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	308.949.698.136,62	217.296.726.570,12
5.	Dana Bagi Hasil Pajak	246.211.550.026,00	255.690.446.250,00
6.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	21.419.313.519,00	15.247.050.379,00
7.	Dana Alokasi Umum	1.200.889.359.000,00	1.160.025.693.000,00
8.	Dana Alokasi Khusus	19.854.669.000,00	29.928.308.000,00
9.	Dana Penyesuaian	448.340.154.000,00	360.003.798.000,66
10.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	779.576.048.153,00	613.629.385.380,00
11.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi	2.360.319.363,00	950.910.195,00
12.	Bantuan Keuangan Propinsi	2.836.580.000,00	8.238.075.000,00
13.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	23.629.261.000,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		5.872.684.173.053,31	5.157.310.567.713,28
Arus Keluar Kas:			
1.	Belanja Pegawai	2.157.692.031.253,00	2.032.535.593.593,52
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.738.817.175.564,00	1.416.455.909.209,53
3.	Belanja Bunga	-	-
4.	Belanja Hibah	300.184.342.399,09	253.316.709.084,84
5.	Belanja Bantuan Sosial	89.670.000,00	853.703.500,00
6.	Belanja Bantuan Keuangan	787.920.000,00	604.305.000,00
7.	Belanja Tidak Terduga	-	-
8.	Belanja Bagi Hasil	-	5.088.082.959,00
Jumlah Arus Kas Keluar		4.197.571.139.216,09	3.708.854.303.346,89
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.675.113.033.837,22	1.448.456.264.366,39

Jumlah Arus Masuk Kas Tahun 2014 dan 2013 dari Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar Rp2.427.647.860.148,15 dan Rp2.154.652.323.797,88 terdiri dari:

No.	Pajak Daerah	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Pajak Hotel	181.526.872.512,15	151.418.187.250,00
2.	Pajak Restoran	242.620.778.756,00	211.755.737.412,00
3.	Pajak Hiburan	47.787.724.836,00	41.979.608.730,88
4.	Pajak Reklame	124.300.629.650,00	106.146.474.640,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	310.032.293.040,00	260.672.641.280,00
6.	Pajak Parkir	47.437.814.976,00	35.245.703.221,00
7.	Pajak Air Tanah	1.329.605.206,00	1.296.286.760,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	683.018.418.610,00	606.061.761.816,00
9.	BPHTB	789.593.722.562,00	740.075.922.688,00
Jumlah Pendapatan Pajak		2.427.647.860.148,15	2.154.652.323.797,88

oo

Dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pajak Daerah	2014	2013
Pajak Hotel			
1	Hotel Bintang Lima	71.064.333.828,15	66.663.085.800,00
2	Hotel Bintang Empat	46.506.333.969,00	37.487.552.188,00
3	Hotel Bintang Tiga	31.216.650.240,00	21.468.532.083,00
4	Hotel Bintang Dua	4.834.477.093,00	3.190.194.755,00
5	Hotel Bintang Satu	1.020.282.510,00	1.261.482.597,00
6	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	895.065.877,00	685.842.471,00
7	Hotel Non Bintang	25.989.728.995,00	20.661.497.356,00
Jumlah Pajak Hotel		181.526.872.512,15	151.418.187.250,00
Pajak Restoran			
1	Restoran	224.043.162.255,00	197.263.404.124,00
2	Katering	18.577.616.501,00	14.492.333.288,00
Jumlah Pajak Restoran		242.620.778.756,00	211.755.737.412,00
Pajak Hiburan			
1	Tontonan Film / Bioskop	20.024.408.106,00	20.624.103.500,00
2	Hiburan Non Bioskop	25.839.056.630,00	19.530.498.155,88
3	Hiburan Insidentil	1.924.260.100,00	1.825.007.075,00
Jumlah Pajak Hiburan		47.787.724.836,00	41.979.608.730,88
Pajak Reklame			
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	110.010.205.850,00	92.727.479.465,00
2	Reklame Insidentil	14.290.423.800,00	13.418.995.175,00
Jumlah Pajak Reklame		124.300.629.650,00	106.146.474.640,00
Pajak Penerangan Jalan			
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	309.617.414.098,00	260.253.065.885,00
2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	414.878.942,00	419.575.395,00
Jumlah Pajak Penerangan Jalan		310.032.293.040,00	260.672.641.280,00
Pajak Parkir			
1	Pajak Parkir	47.437.814.976,00	35.245.703.221,00
Jumlah Pajak Parkir		47.437.814.976,00	35.245.703.221,00
Pajak Air Tanah			
1	Pajak Air Bawah Tanah	1.329.605.206,00	1.296.286.760,00
Jumlah Pajak Air Tanah		1.329.605.206,00	1.296.286.760,00
Pajak Bumi Bangunan			
1	Pajak bumi Bangunan	683.018.418.610,00	606.061.761.816,00
Jumlah		683.018.418.610,00	606.061.761.816,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	789.593.722.562,00	740.075.922.688,00
Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		789.593.722.562,00	740.075.922.688,00
Total		2.427.647.860.148,15	2.154.652.323.797,88

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp270.112.725.497,14 dan Rp229.680.153.171,85 terdiri dari:

No.	Retribusi	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	90.873.013.853,68	92.211.812.869,48
2.	Retribusi Jasa Usaha	50.208.811.470,46	45.398.093.912,37
3.	Retribusi Perijinan Tertentu	129.030.900.173,00	92.070.246.390,00
Jumlah Retribusi		270.112.725.497,14	229.680.153.171,85

oo

Retribusi Jasa Umum tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp90.873.013.853,68 dan Rp92.211.812.869,48 terdiri dari:

No.	Retribusi Jasa Umum	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	11.682.105.000,00	16.904.118.500,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)	31.190.428.808,00	28.020.846.498,00
3.	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil (Dinas Catatan Sipil)	21.520.000,00	1.183.550.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguban Mayat (Dinas Kebersihan dan Pertamanan)	2.601.800.000,00	2.157.550.000,00
5.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dinas Perhubungan)	12.918.649.000,00	11.805.883.000,00
6.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	12.530.833.400,00	12.592.003.600,00
7.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Dinas Kebakaran)	1.609.513.000,00	1.980.031.575,00
8.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	1.054.363.746,00	1.081.068.884,00
9.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Komunikasi dan Informatika)	6.396.413.496,00	4.030.069.320,00
10.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	465.288.850,00	157.540.150,00
11.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Bhakti Darma Husada	10.402.098.553,68	12.299.151.342,48
Jumlah Retribusi Jasa Umum		90.873.013.853,68	92.211.812.869,48

Retribusi Jasa Usaha tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp50.208.811.470,46 dan Rp45.398.093.912,37 terdiri dari:

No.	Retribusi Jasa Usaha	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan)	7.555.744.567,00	6.945.690.931,00
2.	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan)	1.740.996.000,00	1.486.293.000,00
3.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	4.711.795.111,00	3.784.466.692,00
4.	Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kota (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan)	33.891.334.014,96	31.597.842.937,43
5.	Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota (Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah)	701.172.717,50	629.289.351,94
6.	Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI (Dinas Pariwisata)	227.643.000,00	172.010.000,00
7.	Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya (Dinas Pemuda dan Olah Raga)	55.475.000,00	64.970.000,00
8.	Pemakaian Gedung Serba Guna (Bagian Umum dan Protokol)	790.316.500,00	717.531.000,00
9.	Retribusi Pemakaian Gedung Diklat (Dinas Kebakaran)	17.340.000,00	0,00
10.	Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi	204.810.000,00	0,00
11.	Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Pertanian	312.184.560,00	0,00
Jumlah Retribusi Jasa Usaha		50.208.811.470,46	45.398.093.912,37

oo

Retribusi Perijinan Tertentu tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp129.030.900.173,00 dan Rp92.070.246.390,00 terdiri dari:

No.	Retribusi Perijinan Tertentu	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang)	113.182.577.085,00	81.749.793.102,00
2.	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	15.068.033.888,00	9.509.619.328,00
3.	Retribusi Izin Trayek (Dinas Perhubungan)	780.289.200,00	810.833.960,00
Jumlah Retribusi Perijinan Tertentu		129.030.900.173,00	92.070.246.390,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp120.856.635.210,40 dan Rp111.967.697.968,77 terdiri dari :

No.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	113.645.201.541,40	104.829.908.232,14
2.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)/ PT SIER	6.889.841.701,00	6.816.890.459,63
3.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta PT STAR / Taman Remaja Surabaya	321.591.968,00	320.899.277,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		120.856.635.210,40	111.967.697.968,77

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) terdiri dari:

No.	Penyertaan Modal	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Perusahaan Daerah Air minum	97.811.566.113,00	89.421.585.052,00
2.	Perusahaan Daerah Pasar Surya	2.041.117.370,00	1.756.068.839,00
3.	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan	0,00	300.801.187,00
4.	P.T Bank Pembangunan Daerah Jatim	12.964.476.788,77	12.686.734.981,18
5.	P.T Bank Perkreditan Rakyat Jatim	14.792.000,00	13.862.000,00
6.	P.T BPR Surya Artha Utama	813.249.269,63	650.856.172,96
Jumlah Penyertaan Modal		113.645.201.541,40	104.829.908.232,14

- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN) adalah bagian laba PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
- Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta adalah bagian laba PT.STAR/Taman Remaja Surabaya.

oo

Jumlah Arus Masuk Kas dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2014 Rp308.949.698.136,62 dan tahun 2013 sebesar Rp217.296.726.570,12 tidak termasuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang berasal dari BLUD RSUD dr. M. Soewandhie sebesar Rp148.212.557.986,16 dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp30.059.352.000,00. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari :

No.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Penerimaan Jasa Giro	17.713.822.648,93	14.832.492.134,93
2.	Bunga Deposito	76.938.219.209,64	57.579.864.797,57
3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	46.656.200,00	70.858.000,00
4.	Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.605.439.606,00	5.513.026.332,46
5.	Denda Pajak	90.000.000,00	202.500.000,00
6.	Denda Retribusi	2.830.804.249,52	2.668.548.377,25
7.	Hasil Eksekusi Atas Jaminan	1.873.407.200,00	6.015.350.050,09
8.	Pendapatan Pengembalian	521.016.478,00	607.628.352,00
9.	Penerimaan Lain-Lain	159.126.611.382,29	129.806.458.525,82
10.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	44.203.721.162,24	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		308.949.698.136,62	217.296.726.570,12

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp44.203.721.162,24 terdiri dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan bulan Januari ó Juni 2014 yang belum diberikan kepada FKTP sebesar Rp22.288.086.000,00 dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional milik RSUD Bhakti Dharma Husada sebesar Rp21.915.635.162,24 berasal dari Pendapatan klaim BPJS.

Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan bagi hasil pajak tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp246.211.550.026,00 dan Rp255.690.446.250,00 terdiri dari :

No.	Bagi Hasil Pajak	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Pajak Bumi dan Bangunan	19.643.070.339,00	23.076.346.283,00
2.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, 29 dan 21	189.882.716.690,00	200.156.562.314,00
3.	Cukai Hasil Tembakau	36.685.762.997,00	32.457.537.653,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak		246.211.550.026,00	255.690.446.250,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan bagi hasil bukan pajak tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp21.419.313.519,00 dan Rp15.247.050.379,00 terdiri dari:

oo

No.	Bagi Hasil Bukan Pajak	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Provisi Sumber Daya Hutan	323.215.213,00	308.370.680,00
2.	Iuran Eksplorasi dan Iuran eksploitasi (Royalti)	42.227.010,00	12.457.853,00
3.	Pungutan Hasil Perikanan	383.182.410,00	347.408.873,00
4.	Pertambangan Minyak Bumi	18.283.783.314,00	12.491.505.745,00
5.	Pertambangan Gas Bumi	2.374.891.304,00	2.080.538.678,00
6.	Pertambangan Panas Bumi	12.014.268,00	6.768.550,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak		21.419.313.519,00	15.247.050.379,00

Jumlah Arus Masuk kas dari Dana Alokasi Umum untuk Tahun 2014 adalah sebesar Rp1.200.889.359.000,00 dan pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp1.160.025.693.000,00.

No.	Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Dana Alokasi Umum	1.200.889.359.000,00	1.160.025.693.000,00
Jumlah Dana Alokasi Umum		1.200.889.359.000,00	1.160.025.693.000,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Dana Alokasi Khusus untuk tahun 2014 sebesar Rp19.854.669.000,00 dan pada Tahun 2013 sebesar Rp29.928.308.000,00 Dana Alokasi Khusus tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi.

No.	Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Dana Alokasi Khusus	19.854.669.000,00	29.928.308.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus		19.854.669.000,00	29.928.308.000,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Dana Penyesuaian tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp448.340.154.000,00 dan Rp360.003.798.000,66 Terdiri dari :

No.	Dana Penyesuaian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2013	0,00	4.385.500.000,00
2	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2013	0,00	355.526.385.000,66
3	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2014	448.297.975.000,00	0,00
6	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)	42.179.000,00	91.913.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian		448.340.154.000,00	360.003.798.000,66

Jumlah Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp779.576.048.153,00 dan Rp613.629.385.380,00 yang terdiri dari :

oo

No.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	288.364.715.775,00	206.097.921.542,00
2	Bea Nalik Nama Kendaraan Bermotor	282.429.886.309,00	241.408.766.066,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	167.547.790.900,00	164.784.080.833,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.784.262.977,00	0,00
5	Pajak Air Permukaan	39.393.395.788,00	1.281.517.625,00
6	Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)	55.996.404,00	57.099.314,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		779.576.048.153,00	613.629.385.380,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp2.360.319.363,00 dan Rp950.910.195,00 yang terdiri dari:

No.	Bagi Hasil Lainnya Provinsi	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Retribusi TERA	0,00	950.910.195,00
2.	Bagi Hasil RP3HH	2.360.319.363,00	0,00
Jumlah Bagi Hasil Lainnya Provinsi		2.360.319.363,00	950.910.195,00

Bantuan Keuangan Propinsi tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp2.836.580.000,00 dan Rp8.238.075.000,00 yang terdiri dari :

No.	Bantuan Keuangan Propinsi	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	2.836.580.000,00	8.238.075.000,00
Jumlah Bagi Hasil Lainnya Provinsi		2.836.580.000,00	8.238.075.000,00

Jumlah Arus Masuk Kas dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2014 sebesar Rp23.629.261.000,00 dan tahun 2013 tidak ada realisasi, terdiri dari:

No.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Dana Insentif Daerah (DID)	23.629.261.000,00	0,00
Jumlah Bagi Hasil Lainnya Provinsi		23.629.261.000,00	0,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Pegawai tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp2.157.692.031.253,00 dan Rp2.032.535.593.593,52 tidak termasuk belanja pegawai yang direalisasikan melalui BLUD RSUD dr. M. Soewandhie sebesar Rp23.132.811.871,00 dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan sebesar Rp7.062.893.400,00 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

oo

No.	Belanja Pegawai	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	1.842.969.821.699,00	1.685.058.820.769,00
2.	Belanja Langsung	314.722.209.554,00	347.476.772.824,52
Jumlah Belanja Pegawai		2.157.692.031.253,00	2.032.535.593.593,52

Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp1.738.817.175.564,00 dan Rp1.416.455.909.209,53, tidak termasuk Belanja Barang dan Jasa yang direalisasikan melalui BLUD RSUD dr.M.Soewandhie sebesar Rp66.393.276.990,00 dan Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan sebesar Rp8.851.919.156,00.

Jumlah Belanja Hibah tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp300.184.342.399,09 dan Rp253.316.709.084,84 yang terdiri dari :

No.	Belanja Hibah	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Masyarakat	300.184.342.399,09	253.316.709.084,84
Jumlah Belanja Hibah		300.184.342.399,09	253.316.709.084,84

Sesuai Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 39 bahwa "Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" sehingga Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang semula sebesar Rp2.171.272.931.002,00 dan Rp1.840.596.825.732,00 menjadi Rp2.116.689.109.008,00 dan Rp1.814.062.371.710,00 dikonversi ke Anggaran dan Belanja Hibah yang semula sebesar Rp378.142.867.562,00 dan Rp271.860.862.621,09 menjadi 432.726.689.556,00 dan Rp300.184.342.399,09

oo

Jumlah Belanja Bantuan Sosial tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp89.670.000,00 dan Rp853.703.500,00 yang terdiri dari:

No.	Belanja Bantuan Sosial	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	0,00	791.250.000,00
2.	Bantuan Sosial Kepada Individu, keluarga dan / atau masyarakat	0,00	8.500.000,00
3.	Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga dan/atau Masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintahan	89.670.000,00	53.953.500,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		89.670.000,00	853.703.500,00

Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar Rp787.920.000,00 dan Rp604.305.000,00 terdiri dari :

No.	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	787.920.000,00	604.305.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		787.920.000,00	604.305.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada tahun 2014 tidak ada realisasi dan tahun 2013 Rp5.088.082.959,00 terkait dengan pembayaran bagi hasil kerjasama pengelolaan Terminal Purabaya Bungurasih.

2. Arus Kas dari	31 Desember 2013	31 Desember 2012
Aktivitas Investasi		
Aset Non Keuangan	(Rp1.402.704.945.421,00)	(Rp1.271.498.798.298,06)

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun 2014 dan Tahun 2013 masing-masing defisit sebesar Rp1.402.704.945.421,00 dan Rp1.271.498.798.298,06. Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus masuk kas investasi dikurangi dengan arus keluar kas investasi.

oo

Jumlah Arus Masuk Kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp29.733.336,00 merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman dari dana bergulir dari Dinas Koperasi.

Jumlah Arus Keluar Kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp10.637.000.000,00 merupakan penambahan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada :

- PT BPR Surya Artha Utama sebesar Rp637.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham dari PT Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BPR Surya Artha Utama No. 87 tanggal 25 Juni 2014 oleh Notaris-PPAT Kukuh Muljo Rahardjo, SH.
- PD Taman Satwa KBS sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Peraturan Walikota Surabaya No. 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Surat Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Tanggal 16 Juli 2014 No: 449/Ext/PDTS/VII/2014.

4. Arus Kas dari Aktivitas	31 Desember 2014	31 Desember 2013
Non Anggaran	(Rp1.742.448.849,00)	Rp5.196.891.230,76

Arus kas dari aktivitas non anggaran tahun 2014 defisit sebesar Rp1.742.448.849,00 dan tahun 2013 surplus sebesar Rp5.196.891.230,76. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari arus masuk kas non anggaran (Perhitungan Fihak Ketiga-PFK) dikurangi dengan arus keluar kas non anggaran (PFK).

oo

Rincian arus kas dari aktivitas non anggaran Tahun 2014 dan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
<u>Arus Masuk Kas</u>		
1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	103.534.407.213,00	93.184.508.295,76
2. Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu	1.342.218.985,00	699.959.598,00
Jumlah Arus Masuk Kas	104.876.626.198,00	93.884.467.893,76
<u>Arus Keluar Kas</u>		
1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	106.535.536.525,00	87.345.357.678,00
2. Pengeluaran Sisa UP tahun berjalan	83.538.522,00	1.342.218.985,00
Jumlah Arus Keluar Kas	106.619.075.047,00	88.687.576.663,00
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(1.742.448.849,00)	5.196.891.230,76

Arus masuk kas dari transaksi non anggaran Tahun 2014 dan Tahun 2013 sebesar Rp104.876.626.198,00 dan Rp93.884.467.893,76 terdiri atas penerimaan :

No.	Penerimaan Non Anggaran	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Iuran Wajib Pegawai	74.275.896.094,00	71.424.656.304,76
2.	Potongan Taperum	1.568.748.917,00	1.606.808.835,00
3.	Potongan ASKES	22.306.274.110,00	13.115.322.156,00
4.	Lain-lain PFK	5.383.488.092,00	7.037.721.000,00
5.	Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu	1.342.218.985,00	699.959.598,00
	Jumlah Penerimaan Non Anggaran	104.876.626.198,00	93.884.467.893,76

Arus Keluar Kas dari transaksi non anggaran sebesar Tahun 2014 dan Tahun 2013 sebesar Rp106.619.075.047,00 dan Rp88.687.576.663,00 terdiri dari pembayaran untuk :

No.	Pengeluaran Non Anggaran	31 Desember 2014 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Iuran Wajib Pegawai	74.274.324.657,00	71.417.065.889,00
2.	Potongan Taperum	1.569.236.917,00	1.606.303.000,00
3.	Potongan ASKES	22.303.017.338,00	13.113.901.051,00
4.	Lain-lain PFK	8.388.957.613,00	1.208.087.738,00
5.	Penerimaan Sisa UP tahun berjalan	83.538.522,00	1.342.218.985,00
	Jumlah Pengeluaran Non Anggaran	106.619.075.047,00	88.687.576.663,00

oo

5. Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah	1 Januari 2014	1 Januari 2013
	Rp978.204.777.201,54	Rp802.394.710.664,45

Saldo kas per tanggal 1 Januari 2014 dan 2013 masing masing sebesar Rp978.204.777.201,54 dan Rp802.394.710.664,45 terdiri atas :

No.	Uraian	1 Januari 2014 (Rp)	1 Januari 2013 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	978.204.777.201,54	802.394.710.664,45
Jumlah Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		978.204.777.201,54	802.394.710.664,45

6. Saldo Akhir Kas	31 Desember 2014	31 Desember 2013
	Rp1.345.013.341.596,61	Rp1.013.643.084.724,23

Saldo akhir kas per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.345.013.341.596,61 dan Rp1.013.643.084.724,23 terdiri atas :

No.	Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2013 (Rp)
1.	Kas Daerah	1.238.263.150.104,76	978.204.777.201,54
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	83.538.522,00	1.351.684.885,00
3.	Kas di Bendahara Penerimaan	108.286.008,00	182.819.245,00
4.	Kas BLUD dr.M. Soewandhie	92.413.827.517,85	33.903.803.392,69
5.	Kas di Bendahara Kapitasi	14.144.539.444,00	0,00
Jumlah Saldo Akhir Kas		1.345.013.341.596,61	1.013.643.084.724,23

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 sebesar Rp83.538.522,00 terdiri dari :

Kas di Bendahara Pengeluaran		31 Desember 2013
1	Dinas Perhubungan	502,00
2	Sekretariat DPRD	83.538.000,00
3	Kecamatan Wiyung	20,00
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran		83.538.522,00

Sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp83.538.522,00 dari Dinas Perhubungan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Wiyung telah disetor kembali oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kas Daerah pada Tahun 2015.

oo

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp108.286.008,00 merupakan pendapatan Tahun 2014 yang baru dapat disetor oleh bendahara penerimaan ke Kas Daerah pada Tahun 2015, yang terdapat pada SKPD :

No.	Kas di Bendahara Penerimaan	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perhubungan	44.268.400,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18.269.000,00
3	Dinas Kesehatan	35.907.000,00
4	RSUD Bhakti Dharma Husada	9.841.608,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		108.286.008,00

Kas di BLUD RSUD dr. M. Soewandhie per 31 Desember 2014 sebesar Rp92.413.827.517,85.

Kas di Bendahara Kapitasi JKN Dinas Kesehatan per 31 Desember 2014 sebesar Rp14.144.539.444,00.

5.4. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Tidak ada rekonsiliasi, karena entitas pelaporan menerapkan basis kas atas pendapatan dan belanja.

5.5. PENJELASAN LAIN - LAIN

Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp1.345.013.341.596,61 terdiri atas SILPA sebesar Rp1.311.544.540.066,85 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp33.360.515.521,76 dan pendapatan ditangguhkan sebesar Rp108.286.008,00.

oo

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada

Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Surabaya merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah Kota Surabaya merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur, secara administratif terbagi ke dalam 31 Kecamatan dan 160 Kelurahan. Secara geografis terletak pada posisi 07.21÷Lintang selatan dan 112.36øó 112.54ø Bujur Timur yang berbatasan langsung dengan selat Madura di sebelah Utara, selat Madura di sebelah Timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan dan Kabupaten Gresik di sebelah Barat.

Luas Wilayah Kota Surabaya 33.306,30 km² dengan bentuk permukaan lahan wilayah Kota Surabaya 3 ó 6 meter di atas permukaan laut (dataran rendah) kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah lidah dan gayungan dengan ketinggian 25 ó 50 meter di atas permukaan laut.

B. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Pemerintah Kota Surabaya merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kota Surabaya juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

C. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi Pemerintah Kota Surabaya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kota Surabaya.

D. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Dalam Tahun 2014 terjadi beberapa kali mutasi dan penggantian beberapa pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

oo

E. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Pada periode Tahun Anggaran 2014 tidak terdapat penggabungan atau pemekaran entitas.

F. Putusan Pengadilan Terkait Hak dan Kewajiban Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014

Pada periode tahun anggaran 2014 terdapat hak dan kewajiban Pemerintah Kota Surabaya yang masih menunggu putusan pengadilan sebagai berikut :

No.	Permasalahan	Kewajiban Bayar Pemerintah Kota	Keterangan
1.	Perkara nomor 581/Pdt.G/2002/PN.Sby. Jis. 1503 K/Pdt/2004 terkait dengan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Jembatan Penyeberangan di Jalan Mayjen. Sungkono Surabaya tanggal 30 Juni 1996 Nomor : 611.52/3251/402.5.08/1996 dengan PT. Gawih Jaya.	1. Menghukum Pemerintah Kota Surabaya untuk membayar kerugian materiil kepada PT. Gawih Jaya sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah). 2. Menghukum Pemerintah Kota Surabaya untuk membayar kerugian immateriil kepada PT. Gawih Jaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). 3. Menghukum Pemerintah Kota Surabaya untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.	- Berkekuatan hukum tetap. - Belum dibayar.

oo

No.	Permasalahan	Kewajiban Bayar Pemerintah Kota	Keterangan
2.	Perkara nomor 655/Pdt.G/2006/PN.Sby. terkait dengan wanprestasi atas kesepakatan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan angkut sampah melalui Surat Perintah Kerja (SPK) antara Dinas Kebersihan Kota Surabaya dengan PT. Sarana Panca Sakti, cs.	Menghukum Dinas Kebersihan Kota Surabaya untuk membayar kepada PT. Sarana Panca Sakti, cs. biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 290.485.000,- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).	- Berkekuatan hukum tetap. - Belum dibayar.
3.	Perkara nomor 85/Pdt.G/2008/PN.Sby. Jis. 684 PK/Pdt/2012 terkait dengan ganti rugi jalan tembus Mayjend. Sungkono menuju gudang peluru Kel. Dukuh Pakis kepada Linda Handayani Nyoto.	Menghukum PT. Inti Insan Lestari dan Dinas Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya secara tanggung renteng untuk membayar kepada Linda Handayani Nyoto sebagian kerugian yang diderita, dengan rincian : Kerugian materiil berupa terpotongnya tanah seluas 923 m2 dikalikan dengan harga jual obyek pajak yaitu Rp. 4.155.000,- per-M2 Rp. 3.835.065.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.	- Berkekuatan hukum tetap. - Belum dibayar.

oo

No.	Permasalahan	Kewajiban Bayar Pemerintah Kota	Keterangan
6.	Perkara nomor 425/Pdt.G/2010/PN.Sby. jo. 275/Pdt/2011/PT.Sby. terkait dengan sengketa kepemilikan tanah yang digunakan untuk SDN Gading III terletak di Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya antara Pemerintah Kota dengan Ny. Sri Prapti, BA.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ganti rugi materiil Rp. 1.009.974.382,43,- (satu milyar sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua koma empat puluh tiga rupiah). 2. Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan adanya pelaksanaan putusan perkara ini. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkekuatan hukum tetap. - Belum dibayar. - Proses Peninjauan Kembali.
7.	Perkara nomor 604/Pdt.G/2010/PN.Sby. Jis 1367 K/PDT/2011 terkait dengan permintaan penyesuaian harga pembangunan Stadion Surabaya Barat dengan PT. Adhi Karya (Persero).	Menghukum PPKM Pembangunan Stadion di Wilayah Surabaya Barat, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya secara tanggung renteng membayar biaya penyesuaian harga pembangunan stadion di wilayah barat Surabaya dengan nilai total sejumlah Rp. 29.365.543.000,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dibayarkan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.	<ul style="list-style-type: none"> - Berkekuatan hukum tetap. - Belum dibayar.

oo

No.	Permasalahan	Kewajiban Bayar Pemerintah Kota	Keterangan
8.	<p>Perkara nomor 81/Pdt.G/2011/PN.Sby. jo 768/PDT/2012/PT.Sby. terkait dengan Perbuatan melanggar hukum tidak melaksanakan Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Desember 2006 dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 624/Pdt.G/2006/PN.Sby tanggal 7 Desember 2006 dengan PT. Unicomindo.</p>	<p>Menghukum Pemerintah Kota Surabaya untuk membayar ganti kerugian berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran hasil setoran ke 15 dan 16 sebesar Rp. 3.336.399.500,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). 2. Beban bunga 6% per tahun atas keterlambatan pemenuhan setoran hasil usaha ke 15 dan 16 Rp. 800.721.480,- (delapan ratus juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum berkekuatan hukum tetap. - Proses kasasi.

oo

No.	Permasalahan	Kewajiban Bayar Pemerintah Kota	Keterangan
9.	<p>Perkara nomor 649/Pdt.G/2012/PN.Sby. jo. 77/PDT/2014/PT.Sby. terkait dengan penyesuaian perhitungan rupiah terhadap dollar Amerika untuk setoran hasil usaha 13,14,15 dan 16, dalam kontrak bagi hasil usaha dan perjanjian manajemen antara Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana dalam rangka pembangunan instalasi pembakaran sampah nomor 658.1/11/402.2.02/1989 tanggal 2 Juli 1989 jo. Addendum kesatu Konrak Bagi Hasil Nomor 658.1/34/402.1.02/1989 tertanggal 16 November 1989 jo. Addendum Kedua Kontrak Bagi Hasil Nomor 658.1/14/402.1.02/94 tertanggal 7 Maret 1994 jo. Surat Penetapan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 658.1/183/PUMDA tertanggal 18 April 2000.</p>	<p>Menghukum Pemerintah Kota Surabaya karenanya sebagai akibat wansprestasi kepada PT. Unicomindo Perdana untuk membayar penyesuaian perhitungan kurs rupiah terhadap dollar Amerika untuk setoran hasil usaha ke 13, 14, 15 dan 16, pembebanan bunga atas keterlambatan pembayaran, denda pembayaran, denda akibat potensi keuntungan yang hilang, distress cost dan biaya tenaga kerja menjaga asset investasi selama 12 tahun serta interest charge selama 12 tahun, sehingga seluruhnya sejumlah Rp. 104.241.354.128,- (seratus empat milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah);</p>	<p>- Belum berkekuatan hukum tetap. - Proses kasasi.</p>

oo

No.	Permasalahan	Kewajiban Bayar Pemerintah Kota	Keterangan
10.	Perkara nomor 590/Pdt.G/2014/PN.Sby. terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tedjo Bawono dalam pembuatan perjanjian dan perikatan lainnya terkait pengalihan pengelolaan Kolam Renang Brantas (KRB)	1. Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk kompensasi kepada Tedjo Bawono atas biaya perawatan bangunan dan lingkungan cagar budaya Kolam Renang Brantas (KRB). 2. Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Tedjo Bawono untuk setiap hari kelalaian Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan SPPT PBB, perpanjangan ijin usaha hiburan Kolam Renang Brantas (KRB) dan IMB terhitung sejak berkekuatan hukum tetap.	- Belum berkekuatan hukum tetap. - Proses banding.

oo

BAB VII
PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan menjelaskan Laporan Keuangan lembar muka (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas). Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kota Surabaya selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Surabaya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya dalam penyampaian laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Surabaya telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2014 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Surabaya, .

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

oo